

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2020



DINAS PERUMAH RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

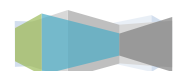
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat RahmatNya jualah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2020 ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunn Anggran 2020 yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang ada. Hasil pengukuran Kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2020 dan diharapkan dapat pula menjadi sumber informasi yang memadai sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di masa mendatang, khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentu belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kepada semua pihak/pengguna Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di tahun yang akan datang.



Akhir kata dengan senantiasa selalu mengharap ridho dari Allah SWT, selanjutnya kami berharap pula Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 ini, akan menjadi pendorong dan motivasi dalam rangka pelaksanaan percepatan peningkatan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kedepan

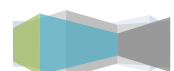
Pelaihari, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup,



Ir. H. Muhammad Mursyi, M.Si

NIP. 19680304 199803 1 009



IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2020, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 10 program dan 30 kegiatan.

Pada tahun anggaran 2020 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp41.646.470.015,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp31.802.248.724,- dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 9.844.221.291,-.



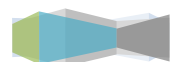
Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 85.99%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup,

Ir. H. Muhammad Mursyi, M.Si

NIP. 19680304 199803 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	3
3. Isu Strategis.....	5
4. Produk dan Layanan.....	10
5. Sistematisasi Penyajian.....	13
BAB II . PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
1. VISI MISI.....	15
2. MISI RPJMD.....	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategi.....	17
4. Indikator Kinerja Utama.....	24
5. Perjanjian Kinerja.....	26
6. Program dan Kegiatan.....	37
BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
1. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	15
2. Akuntabilitas Keuangan	255
BAB IV . PENUTUP.....	246
1. Simpulan.....	246



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut diberikan mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan kota dan pengelolaan persampahan serta lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan mandat ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun LAKIP DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 antara lain didasarkan atas :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- g) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
- h) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut



B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a) *Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup* ;
- b) *Kesekretariatan*, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
- c) *Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 2) Seksi Data dan Perencanaan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman; dan
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.
- d) *Bidang Tata Kota dan Kebersihan*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 3) Seksi Kebersihan dan Limbah; dan
 - 4) Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

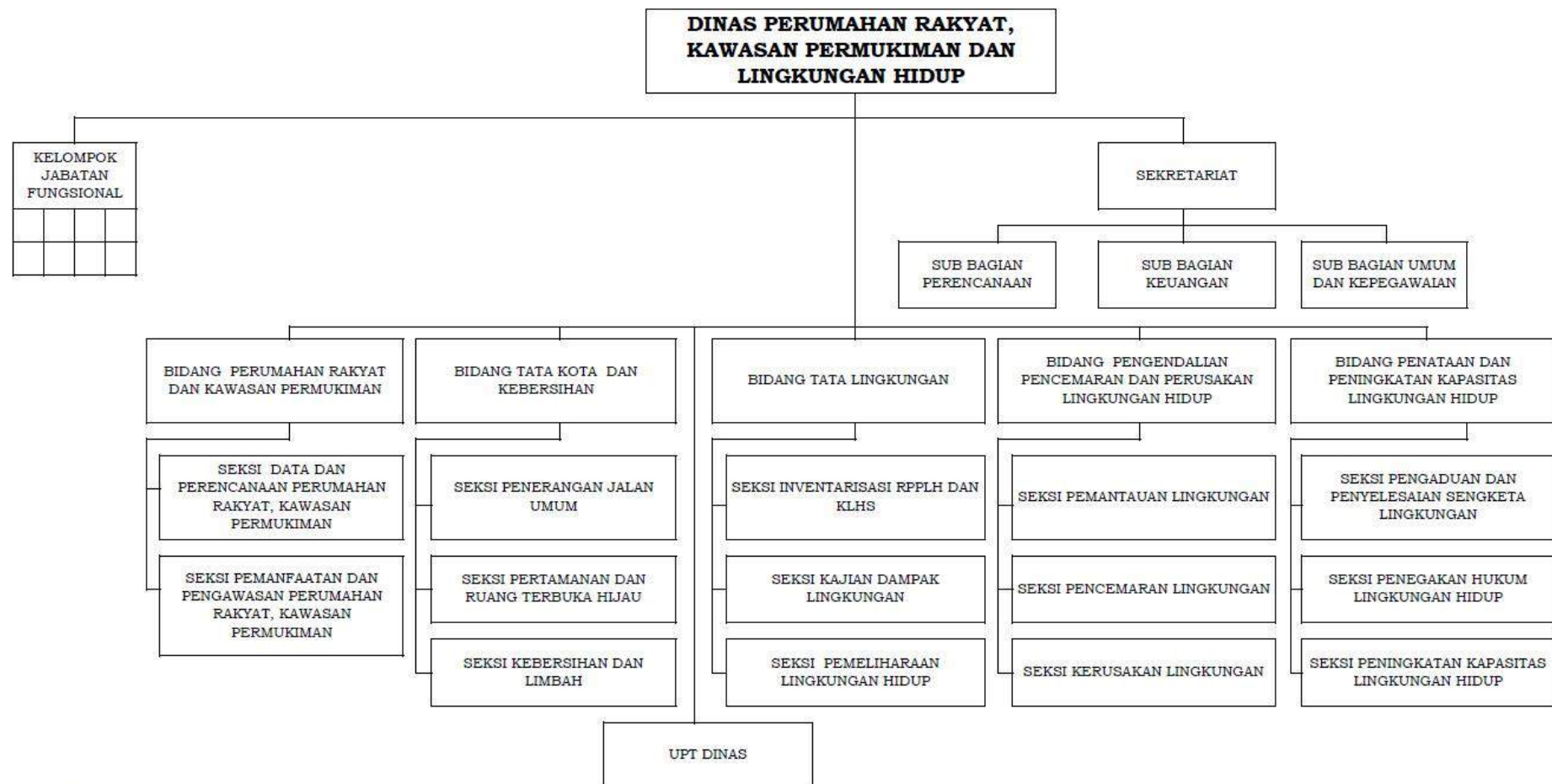


- e) *Bidang Tata Lingkungan*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Seksi Inventarisasi RPPLH & KLHS.
- f) *Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 2) Kerusakan Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemantuan Lingkungan;
 - 4) Seksi Pencemaran Lingkungan.
- g) *Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 3) Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa; dan
 - 4) Seksi Penegakan Lingkungan Hidup.
- h) *UPT Laboratorium* :
 - 1) Kepala Laboratorium;
 - 2) Kasubbag Tata Usaha
- i) *Kelompok Jabatan Fungsional*



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2106



Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut didukung sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia (personil) serta sarana dan prasarana.

Adapun komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2020 terdiri atas 57 orang ASN dan 239 orang PTT, seperti dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1

Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut per 31 Des. 2020

No	Personil	Jumlah (org)	%
1.	ASN	57	19,26
2.	PTT	239	80,74
	Jumlah	296	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2020

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2020 berdasar tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2

Komposisi Personil (ASN) DPRKPLH Tanah Laut berdasar Tingkat Pendidikan per 31 Des. 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	%
1.	SD	5	8,77
2.	SLTP	5	8,77
3.	SLTA	18	31,58
4.	D3	2	3,51
5.	D4/S1	22	38,60
6.	S2	5	8,77
	Total	57	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2020



Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan per 31 Des. 2020 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini

Tabel 1.3

Komposisi Personil (ASN + PTT) Berdasar Golongan per 31 Des. 2020

No	Golongan	Jumlah (org)	%
1.	IV	7	2,36
2.	III	24	8,08
3.	II	16	5,39
4.	I	11	3,70
5.	PTT	239	80,47
	Total	297	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2020

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan per 31 Des. 2020 dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini

Tabel 1.4

Data ASN Menurut Jabatan Struktural dan Staf Fungsional per 31 Des. 2020

No	Formasi Jabatan	Jumlah (org)	%
1.	Eselon II	1	1,75
2.	Eselon III	6	10,53
3.	Eselon IV	16	28,07
4.	Staf	34	59,64
	Total	57	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2020



C. Isu Strategis

Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal pencapaian RPJMD Kab. Tanah Laut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Setiap program yang disusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai terwujudnya sasaran strategis organisasi, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
7. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
9. Meningkatnya Kawasan Perumahan Yang Telah Terpenuhi Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
10. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)
11. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
12. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.



14. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
15. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Berkaitan dengan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, tentu tidak bisa lepas dari permasalahan dan issue strategis yang dihadapi sepanjang tahun 2020, antara lain :

- ✓ Belum sebandingnya antara peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pemantauan lingkungan & pengendalian pencemaran;
- ✓ Masih terbatasnya SDM dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan hidup;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan belum sesuai penangan pengaduan terhadap SOP;
- ✓ Semakin kompleknya permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
- ✓ Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai;
- ✓ Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan untuk posisi teknis PJU lapangan;
- ✓ Masih kurangnya tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga pada kawasan permukiman;
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU;
- ✓ Kurang berdayanya masyarakat untuk memperbaiki rumah dan;
- ✓ Belum optimalnya penanganan prasarana utilitas (PSU) oleh masyarakat / pengembang.



D. Produk dan Layanan

Produk dan Layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut antara lain :

a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

✓ Pengaduan Lingkungan Hidup

Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup

✓ Bank sampah

Memfasilitasi pembentukan dan memberikan pembinaan kepada Masyarakat / Kelompok yang ingin membentuk Bank Sampah di Kabupaten Tanah Laut.

✓ Adipura/Adiwiyata

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya meraih penghargaan Adipura/Adiwiyata baik secara langsung maupun tidak langsung

b) Bidang Tata Kota dan Kebersihan

✓ Pelayanan Persampahan :

- Pelayanan Pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara keTempat Pengolahan Akhir (TPA) se Kabupaten Tanah Laut.
- Pelayanan Penampungan sampah dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara Terpadu skala kota Pelaihari

✓ Jaringan PJU

Memberikan pelayanan berupa pemasangan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemeliharanya se Kabupaten Tanah Laut



✓ **Pertamanan dan RTH**

Pelayanan pembangunan dan Pemeliharaan Taman dan RTH di kota Pelaihari.

✓ **Pelayanan Sanitasi, Air Bersih dan Toilet / Lampu Portable**

- Memberikan Pelayanan berupa penyediaan toilet portable dan air bersih dalam rangka mendukung kegiatan masyarakat yang bersifat darurat dan sementara
- Pelayanan penyediaan penerangan sementara berupa lampu sorot portable dan jaringan penerangan lampu lapangan

c) Bidang Tata Lingkungan

✓ **Lingkungan**

- Memfasilitasi penyusunan Dokumen lingkungan (Amdal, UKL – UPL, dan SPPL), menyusun dokumen lingkungan (IKPLHD, RPPLH, inventarisasi Gas Rumah Kaca, Program Kampung Iklim)

✓ **Rekomendasi Ijin PPLH**

- Memberikan rekomendasi ijin PPLH (Ijin TPS LB3, Ijin IPLC, Ijin Limbah Domestik dan Ijin Land Application (LA)

✓ **Mengeluarkan SPPL**

✓ **Mengeluarkan rekomendasi UKL – UPL**

✓ **Mengeluarkan SKKL, Izin Lingkungan**

d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- ✓ Membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.



- ✓ Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum

e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- ✓ Uji Kualitas Air
- ✓ Uji Kualitas Udara Ambient
- ✓ Uji Kadar Polusi Limbah Cair
- ✓ Uji Emisi / Polusi udara akibat aktivitas industri
- ✓ Memberikan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa

f) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

- ✓ Pelayanan Pengujian Sampel dari Masyarakat, Perusahaan dan atau Institusi
- ✓ Pelayanan Pengujian Sampel pengaduan kasus lingkungan



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
 - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.1
 - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
 - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B
 - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
 - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2
- B. Akuntabilitas Keuangan



1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan amanat itu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tanah Laut dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Visi yang di emban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 sesuai Perda nomor 2 Tahun 2019 adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut :

- **BERKARYA** : *Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu : secara bersama- sama berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat;*
- **INOVASI** : *Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.*
- **TERTATA** : *Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan*



yang tertata dan terkelola dengan baik (Good Governance);

- **RELIGIUS** : *Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat;*
- **AKTUAL** : *Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani; dan;*
- **SINERGI** : *Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi.*

B. MISI RPJMD

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 Misi sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.



Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman
2. Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan
3. Terwujudnya rumah sehat dan layak huni
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien



b. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
7. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
9. Menikatnya Kawasan Perumahan Yang Telah Terpenuhi Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
10. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)
11. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
12. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
14. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
15. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "**BERINTERAKSI**" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Diperoleh penghargaan kebersihan	2 (Adi pura dan Adiwiyata)	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)
						Indeks kualitas air	50,25	50,5	50,75	51	51
						Indeks kualitas udara ambient	87	87,25	87,5	87,75	87,75



						Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	71,06%	72%	73,5 %	75%	80%
						Persentase RTH yang terbangun	0,5%	0,5%	1%	3,5%	5%
			Presentase Terbentuk BS.	(100%) 25 Unit	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)
			Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)	35 KP (100%)	Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas PSU	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)
					Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	presentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%



						Presentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2		Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	(25 Desa/Kel dari 135 Desa Kel) 20%)	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	1. Persentase peningkatan kampung iklim	1 Desa/Kel (4%)	3 Desa/Ke 1 (16%)	6 Desa/ Kel (24 %)	6 Desa/Ke 1 (28%)	6 Desa/Ke 1 (28%)
						2. Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
						3. Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100%	100%	100%	100%	100%



					Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	80%	80 %	80 %	80 %	80%
					Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu 2. Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu 3. Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	81,00%	81,25%	81,50%	81,75%	82,00%
							91,50%	91,75%	92,00%	92,25%	92,50%
							100%	100%	100%	100%	100%
3		Terwujudnya rumah sehat dan layak huni	% perumahan layak huni	100%	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%



					Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana	0	0	0	100% (20)	100% (10)
4		Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien			Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	71,00	75,00	80,00	85,00	90,00
					Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



D. Indikator Kinerja utama

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab / Sumber Data	Penjelasan Rumus
1.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1.	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	Σ Penghargaan adipura dan adiwiyata yang diperoleh pada tahun n
		2.	Indeks Kualitas Air	Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	$PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_{ij}}{L_{ij}^M}\right)^2 + \left(\frac{C_{ij}}{L_{ij}^R}\right)^2}}{2}$
		3.	Indeks Kualitas udara ambient		Indeks Kualitas Udara = 100 – [50/0.9 x (I _{eu} – 0.1)]
		4.	Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	Σ titik jaringan yang terpasang / Σ Luas wilayah permukiman x 100%
		5.	Persentase RTH yang terbangun		Σ RTH yang terbangun / Σ Luas RTH x 100%
2.	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	1	Persentase rumah layak huni	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Σ rumah layak huni / Σ rumah tidak layak huni di Tala x 100%



E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2020 merupakan gambaran Kinerja tahun 2020. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan target tahunan yaitu tahun kedua RPJMD. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama.

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2020
IKU KEPALA DINAS			
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun - n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)
		Indeks kualitas air	50,5
		Indeks kualitas udara ambient	87,25



		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	72%
		Persentase RTH yang terbangun	0,5%
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)
IKU SEKRETARIS			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	75
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%
IKU PERENCANAAN			
1	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen
2	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 dokumen
IKU KEUANGAN			
1	Menyusun laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 laporan
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 Surat



2	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	1 Dokumen
3	Mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan	2 kali pameran (teknologi tepat guna)
4	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah data aset yang tercatat	2.312 aset yang tercatat
IKU KABID P2KLH			
1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8 Pengaduan (100%)
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (Perusahaan / pelaku usaha)
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (Perusahaan / pelaku usaha)
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)
IKU KASI PENEGAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20 pelaku usaha
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	40 perusahaan/pelaku usaha



2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif	1 sanksi administratif
KASI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	20 sekolah
2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata	1 sekolah
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah	5 Bank Sampah
IKU KASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi
3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring
IKU KABID P3LH			
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,25%
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	91,75%



		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%
IKU KASI KERUSAKAN LINGKUNGAN			
1	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	1 dokumen
2	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi
3	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik
IKU KASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah aksi bersih sungai	—
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air	1 Dokumen Uji
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient	1 Dokumen Uji
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd
IKU KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN			
1	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	1 Dokumen Uji
2	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	1 Dokumen Uji
3	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha



IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT			
1	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)
2	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	0
IKU KASI DATA DAN PERENCANAAN PERKIM			
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen
2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 KK
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit
4	Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen RTLH	Jumlah dokumen RTLH	-
5	Melakukan fasilitasi luas lahan / pembebasan lahan untuk rumah khusus nelayan	Jumlah luas lahan yang dibebaskan	-
IKU KASI PEMANFAATAN PENGAWASAN PERKIM			
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK



2	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP
3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	1 Dokumen
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah
IKU KABID TATA KOTA DAN KEBERSIHAN			
1	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%
IKU KASI PERTAMANAN DAN RTH			
1	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	4 Dokumen
2	Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH
3	Melakukan monitoring	Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen
IKU KASI KEBERSIHAN DAN LIMBAH			



1	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	38.281,15
2	Melakukan pengolahan sampah di TPA	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	114.000 Ton
3	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	2 Kali
4	Melaksanakan data pengolahan sampah di masyarakat	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	1 Dokumen
5	Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 Kecamatan
6	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	1 Unit (1 Armada Roda 6)
7	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	45 buah sarpras (100%)
IKU KASI PENERANGAN JALAN UMUM			
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	1 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 lokas rencana pemasangan PJU)
2	Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	10 dokumen
3	Melakukan pemeliharaan PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED



4	Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Jumlah SarPras PJU yang di penuhi sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot
IKU KABID TATA LINGKUNGAN			
1	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	16 % (3 Desa/Kel)
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100% (1 Kajian LH)
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100 % (1 SKKL, 14 UKL-UPL, 80 SPPL)
IKU KASI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN			
1	Melakukan Penerbitan SKKL	Jumlah SKKL	1 SKKL
2	Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL	Jumlah Rekomendasi UKL-UPL	14 Rekomendasi UKL-UPL
3	Melakukan Penerbitan SPPL	Jumlah penerbitan izin SPPL	80 SPPL
IKU KASI INVENTARIS RPPLH DAN KLHS			
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	—
2	Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen
3	Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Jumlah dokumen IKLH	1 Dokumen
4	Melaksanakan uji laboratorium	Jumlah LHU	12 LHU



IKU KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Melaksanakan Verifikasi Teknis PPLH	Jumlah Permohonan Yang Diverifikasi	1 Laporan
2	Melaksanakan Penerbitan Pertimbangan Teknis PPLH	Jumlah Rekomendasi Teknis PPLH	15 Pertimbangan Teknis
3	Melaksanakan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca	Jumlah dokumen inventarisasi GRK yang disusun	1 Dokumen
4	Melaksanakan Penyusunan dokumen Proklamasi	Jumlah Dokumen Proklamasi	1 Dokumen
5	Mendaftarkan desa program kampung iklim	Jumlah Desa Teraftar Proklamasi	3 Desa
IKU KEPALA UPT LAB			
1	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	350 sampel
2	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	11 jenis
3	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	20 jenis
4	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12 orang
5	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Jumlah retribusi jasa uji Lab	Rp.150.000.000
IKU KEPALA TU LAB			
1	Melakukan pelayanan penatausahaan LAB	Jumlah pelayanan penatausahaan LAB yang di layani sesuai SOP	2 jenis



2	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi	19 jenis
3	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis



F. Program dan Kegiatan

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2020, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 10 program dan 30 kegiatan.

Pada tahun anggaran 2020 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp41.646.470.015,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp31.802.248.724,- dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 9.844.221.291,-.

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 85.99%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.4
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Kegiatan	Realisasi Anggaran
I	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.890.157.169,00		5.834.314.726,00
1			303.951.946,00	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	283.253.848,00
2			31.972.400,00	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	29.898.650,00
3			5.554.232.823,00	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	5.521.162.228,00
II	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	686.172.307,00		534.356.565,00
1			247.547.300,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	238.387.000,00
2			438.625.007,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	295.969.565,00



3			0,00	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	0,00
4			0,00	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00
5			0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00
III	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	19.995.600,00		0,00
1			19.995.600,00	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	0,00
IV	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.679.195.350,00		2.442.025.650,00
1			853.000.000,00	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	632.491.200,00
2			1.700.000.000,00	Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.683.359.400,00
3			126.195.350,00	Peningkatan Rumah Sederhana (DAK PENUNJANG)	126.175.050,00
V	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan	330.940.375,00		324.325.900,00



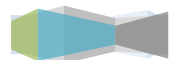
		Perusakan Lingkungan Hidup			
1			130.932.800,00	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	126.818.200,00
2			61.107.750,00	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	59.327.500,00
3			138.899.825,00	Pemantauan Kualitas Lingkungan	138.180.200,00
VI	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	226.074.700,00		211.520.041,00
1			72.429.700,00	Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan	72.379.600,00
2			49.495.000,00	Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	41.345.591,00
3			104.150.000,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	97.794.850,00
VII	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Tata Lingkungan	283.699.550,00		272.881.274,00
1			52.319.200,00	Verifikasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	51.889.100,00



				Hidup untuk Kegiatan dan/atau usaha	
2			87.425.000,00	Inventarisasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	81.187.700,00
3			55.558.250,00	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	51.407.474,00
4			88.397.100,00	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	88.397.000,00
VIII	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Tata Kota dan Kebersihan	20.322.983.973,00		18.308.972.497,00
1			12.041.655.800,00	Penerangan Jalan Umum	11.740.701.077,00
2			1.217.480.000,00	Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	1.113.487.870,00
3			7.063.848.173,00	Kebersihan dan Limbah	5.454.783.550,00
IX	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)	1.233.346.400,00		1.185.120.741,00



1			769.334.400,00	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	734.399.941,00
2			464.012.000,00	Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan	450.720.800,00
X	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	129.683.300,00		120.978.500,00
1			22.499.600,00	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	19.894.000,00
2			84.686.600,00	Penyusunan laporan keuangan	80.124.300,00
3			22.497.100,00	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	20.960.200,00



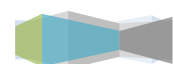
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja kedua RPJMD 2018- 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Realisasi Capaian Sasaran Strategis seluruh pejabat struktural di DPRKPLH

Tabel 3.1

**Realisasi Capaian Sasaran Strategis
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA DINAS					
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	1 Penghargaan (Adiwiyata)	50%
		Indeks kualitas air	50,5	60,67	120,14%
		Indeks kualitas udara ambient	87,25	91,29	104,63%
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	72%	75%	103,17%
		Persentase RTH yang terbangun	0,5%	2,22%	444%
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%
IKU SEKRETARIS					
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	75	75	100%
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%



3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
IKU PERENCANAAN					
1	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 dokumen	3 dokumen	100%
IKU KEUANGAN					
1	Menyusun laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 laporan	19 laporan	100%
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis	18 Jenis	163,64%
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 Surat	3100 Surat	155%
2	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Mengadakan penyebaran informasi pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi pembangunan	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	-	-
4	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah data aset yang tercatat	2.312 aset yang tercatat	2.515 aset yang tercatat	108,78%
IKU KABID P2KLH					



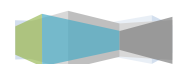
1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8 Pengaduan (100%)	8 Pengaduan (100%)	100%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (Perusahaan / pelaku usaha)	71% (15 pelaku usaha taat)	101,42%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (Perusahaan / pelaku usaha)	20% (12 pelaku usaha taat)	100%
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	100% (5 bs)	100%
IKU KASI PENEGAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20 pelaku usaha	21 pelaku usaha	105,00%
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	40 perusahaan/pelaku usaha	60 perusahaan/pelaku usaha	150%
2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	100%
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif	1 sanksi administratif	2 sanksi administratif	100%
KASI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	20 sekolah	20 sekolah	100%
2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata	1 sekolah	1 sekolah	100%
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah	5 Bank Sampah	5 Bank Sampah	100%



IKU KASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA					
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan	8 Pengaduan	160%
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	100%
3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	100%
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	100%
IKU KABID P3LH					
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,25%	91,40%	112,49 %
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	91,75%	95%	103,54 %
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%
IKU KASI KERUSAKAN LINGKUNGAN					
1	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	100%
3	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik	20 Titik	100%
IKU KASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN					



1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah aksi bersih sungai	—	—	—
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	100%
IKU KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN					
1	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
2	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
3	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100%
IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT					
1	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%
2	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	129% (9 KP)	129%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	0	-	-
IKU KASI DATA DAN PERENCANAAN PERKIM					
1	Melaksanakan penyusunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan,	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



	dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman			
2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 Unit	333 Unit	66,6%
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	4.616 Unit	751%
4	Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen RTLH	Jumlah dokumen RTLH	-	-	-
5	Melakukan fasilitasi luas lahan / pembebasan lahan untuk rumah khusus nelayan	Jumlah luas lahan yang dibebaskan	-	-	-
IKU KASI PEMANFAATAN PENGAWASAN PERKIM					
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	218 KK	43,60%
2	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	9 KP	129%
3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	9 Komplek Perumahan	128,57%
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	12 Rekomendasi izin mendirikan rumah	171,43%



IKU KABID TATA KOTA DAN KEBERSIHAN					
1	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90.09%	90,09%
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%
IKU KASI PERTAMANAN DAN RTH					
1	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH	72 RTH	100%
3	Melakukan monitoring	Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
IKU KASI KEBERSIHAN DAN LIMBAH					
1	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	38.281,15	38.293,00	100,03%
2	Melakukan pengolahan sampah di TPA	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	114.000 Ton	113.128 Ton	99,2%
3	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	2 Kali	2 Kali	100%
4	Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	100%



6	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	1 Unit (1 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	100%
7	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	45 buah sarpras (100%)	45 buah sarpras (100%)	100%
IKU KASI PENERANGAN JALAN UMUM					
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	1 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 lokasi rencana pemasangan PJU)	1 dokumen perencanaan PJU (2 dokumen perencanaan yang menghasilkan rencana pemasangan PJU di 15 Lokasi)	100%
2	Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	10 dokumen	20 dokumen	200%
3	Melakukan pemeliharaan PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	100%
4	Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipenuhi sesuai standar	- 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot	- 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot	100%
IKU KABID TATA LINGKUNGAN					
1	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	16 % (3 Desa/Kel)	16 % (3 Desa/Kel)	100%



		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100% (1 Kajian LH)	100% (1 Kajian LH)	100%
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100 % (1 SKKL, 14 UKL-UPL, 80 SPPL)	281,05 % (4 SKKL, 34 UKL-UPL, 229 SPPL)	281%
IKU KASI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN					
1	Melakukan Penerbitan SKKL	Jumlah SKKL	1 SKKL	4 SKKL	400%
2	Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi UKL-UPL	14 Rekomendasi UKL-UPL	34 Rekomendasi UKL-UPL	243%
3	Melakukan Penerbitan SPPL	Jumlah penerbitan izin SPPL	80 SPPL	229 SPPL	286%
IKU KASI INVENTARIS RPPLH DAN KLHS					
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	-	-	-
2	Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Jumlah dokumen IKLH	1 Dokumen	-	Refocusing
4	Melaksanakan uji laboratorium	Jumlah LHU	12 LHU	10 LHU	83%
IKU KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Melaksanakan Verifikasi Teknis PPLH	Jumlah Permohonan Yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Melaksanakan Penerbitan Pertimbangan Teknis PPLH	Jumlah Rekomendasi Teknis PPLH	15 Pertimbangan Teknis	35 Pertimbangan Teknis	233%
3	Melaksanakan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca	Jumlah dokumen inventarisasi GRK yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Melaksanakan Penyusunan dokumen Proklamasi	Jumlah Dokumen Proklamasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



5	Mendaftarkan desa program kampung iklim	Jumlah Desa Terdaftar Proklamasi	3 Desa	6 Desa	200%
IKU KEPALA UPT LAB					
1	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	350 sampel	416 sampel	118,85%
2	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	11 jenis	11 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	20 jenis	20 jenis	100%
4	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12 orang	12 orang	100%
5	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Jumlah retribusi jasa uji Lab	Rp.150.000.000	Rp155.750.000	103,83%
IKU KEPALA TU LAB					
1	Melakukan pelayanan penatausahaan LAB	Jumlah pelayanan penatausahaan LAB yang di layani sesuai SOP	2 jenis	2 jenis	100%
2	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi	19 jenis	19 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis	5 jenis	100%



1. Sasaran RPJMD

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Tahun 2020		
			2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (skor)	50	85	60,67	71,37%
		Indeks Kualitas Air (skor)	90,68	75	91,29	121,72
		Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	46,43	100	72,41	72,41%
2	Program Tata Lingkungan	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	75.53%	100	75.53%	75.53%
3	Program Tata Kota dan Kebersihan	Luasan RTH publik kota (Ha)	169,6 Ha	110,5	169,6 Ha	153,48%
		Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	-	25	-	-
4	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	87	15	48,70	324,67
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	124	60	43,60	72,67
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,45	10	0,44	4,4
		Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	0	100	0	0



Sedangkan Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tabel berikut :

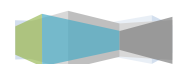
Tabel 3.2

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	1 Penghargaan (Adiwiyata)	50%	Kepala Dinas
		Indeks kualitas air	50,5	60,67	120,14%	
		Indeks udara ambient	87,25	91,29	104,63%	
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	72%	75%	103,17%	
		Persentase RTH yang terbangun	0,5%	2,22%	444%	
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%	Sekretaris
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	BB	BB	100%	
4	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%	
5	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	



6	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8 Pengaduan (100%)	8 Pengaduan (100%)	100%	Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
7	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (Perusahaan / pelaku usaha)	71% (15 pelaku usaha taat)	101,42%	
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (Perusahaan / pelaku usaha)	20% (12 pelaku usaha taat)	100%	
8	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	100% (5 bs)	100%	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
9	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,25%	91,40%	112,49 %	
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	91,75%	95%	103,54 %	
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%	



10	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	129% (9 KP)	129%	
12	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	0	-	-	
13	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%	Kabid. Tata Kota dan Kebersihan
14	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%	
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90.09%	90,09%	
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%	
15	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	16 % (3 Desa/Kel)	16 % (3 Desa/Kel)	100%	Kabid. Tata Lingkungan
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100% (1 Kajian LH)	100% (1 Kajian LH)	100%	
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100 % (1 SKKL, 14 UKL-UPL, 80 SPPL)	281,05 % (4 SKKL, 34 UKL-UPL, 229 SPPL)	281%	



2. Eselon II (Kepala Dinas)

Untuk menggambarkan realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini. Analisa capaian 15 sasaran strategis dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran secara terinci dengan penjelasan sebagai berikut :

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis Kepala Dinas yang diukur melalui 6 (enam) indikator, sasaran strategis nomor 1 dan 2 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

Target dan realisasi Sasaran strategis dan indikator Kinerja Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	Indikator 1 Penghargaan kebersihan pada tahun n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	1 Penghargaan (Adiwiyata)	50%
		Indikator 2 Indeks kualitas air	50,5	60,67	120,14%
		Indikator 3 Indeks udara ambient	87,25	91,29	104,63%
		Indikator 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	72%	75%	103,17%
		Indikator 5 Persentase RTH yang terbangun	0,5%	2,22%	444%
2.	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Indikator 6 Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%



Tabel Perbandingan Kinerja Kepala Dinas 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	1 Penghargaan (Adiwiyata)	50%
		Indeks kualitas air	50	51	50	50,5	60,67	120,14 %
		Indeks kualitas udara ambient	95,81	90,88	90,68	87,25	91,29	104,63 %
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Peremukiman	50%	60%	70%	72%	75%	103,17 %
		Persentase RTH yang terbangun	2,22%	2,22%	2,22%	0,5%	2,22%	444%
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	-	63,6% (318 Unit)	124,2% (621 Unit)	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%



2.1 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja **Sasaran Strategis nomor 1 meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan** sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan dan analisa pencapaian sasaran strategis dengantiap indikator kinerja utama akan di jelaskan di bawah ini

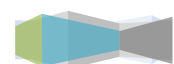
2.1.a Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH ,Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan ,Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

a. Penghargaan Adipura

Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (Good Environment Governance).

Penilaian Adipura di Tanah Laut sejak tahun 2012 terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen



masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan, kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dinas/instansi terkait sangatlah perlu dibina dan dijalin secara terus menerus dan berkesinambungan, agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat untuk menuju lingkungan yang baik agar penghargaan Adipura tercapai . meskipun penghargaan adipura tidak dilaksanakn di tahun 2020 DPRKPLH tetap melakukan upaya untuk pencapaian lingkungan yang bersih, diantaranya :

- Melakukan pembinaan Bank Sampah setiap Kecamatan
- Melakukan pembinaan masyarakat agar lebih sadar lingkungan
- Inovasi pengolahan sampah berupa pengolahan sampah menjadi pupuk padat menjadi pupuk organik cair selain itu melakukan inovasi berupa olah limbah industri menjadi pakan ternak
- Penambahan armada untuk pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara ke Tempat Pengolahan Akhir dari hadiah provinsi sebanyak 1 unit

Tabel Penghargaan Penghargaan Adipura
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2020)

No	SKPD	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Kantor Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2012
2	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2013
3	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2014



4	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	KLHK	2017
5	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	KLHK	2018
6	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	Provinsi	2019
7	KLHK tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19			2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Pada Renstra 2018-2023 sampai dengan 2023 DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut menargetkan menerima penghargaan Adipura di setiap tahunnya namun pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19 sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai .

Dalam upaya memperoleh penghargaan adipura didukung oleh 27 orang petugas pertamanan (PTT), 10 orang Pranata Taman (PNS), 134 petugas kebersihan (PTT), 11 orang Pramu Kebersihan (PNS), dan 30 orang petugas PJU (PTT) dan 2 orang Pemelihara Penerangan Jalan Umum (PNS) yang tersebar debeberapa kecamatan , selain kegiatan yang dilakukan oleh petugas kebersihan DPRKPLH juga melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan peran serta masyarakat, pembuatan bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan yang di dukung oleh 2 Orang SDM

b. Penghargaan Adiwiyata

Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata menyatakan bahwa



sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya memperoleh penghargaan adiwiyata DPRKPLH didukung oleh 4SDM yang terdiri dari Kabid P2LH, Kasi Peningkatan Kapasitas LH, 1 orang staf pelaksana (Pengelola Lingkungan) dan 1 orang PTT



Tabel Penghargaan Penghargaan Adiwiyata
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2020)

No	Penerima Adiwiyata	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	SDN Atu Atu	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2015
2	SMK-PP Tanah Laut	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2017
3	SMAN 1 Jorong	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
4	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
5	SMPN 2 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
6	SMPN 7 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
7	SMPN 2 Bati - Bati	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
8	SMPN 1 Bati - Bati	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
9	SMPN 2 Panyipatan	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
10	SDN Angsau 3	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
11	SMPN 1 Jorong	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
12	SDN Pabahanan	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
13	SDN Angsau 4	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017

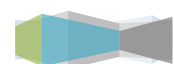


14	SMPN 1 Pelaihari	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
15	SMAN 1 Jorong	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
16	SMKN 1 Pelaihari	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
17	SMP1 Batu Ampar	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
18	SMP 5 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
19	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
20	SMAN 1 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2020

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan melalui SMAN 1 Pelaihari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0800/KUM/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerima penghargaan Adiwiyata setiap tahunnya tahun 2015,2017 sampai dengan 2020 , hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DPRKPLH untuk selalu melakukan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan berkesinambungan terhadap sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Tanah Laut

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n** adalah sebagai berikut :

1. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan



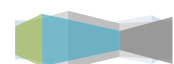
2. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai
3. Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan untuk posisi teknis PJU lapangan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU
5. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan
6. Wilayah area kerja yang luas dan tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak BKPSDM dalam permohonan penambahan tenaga PNS maupun PTT
2. Optimalisasi koordinasi dengan pihak Bappeda dan BPKAD dalam upaya pemenuhan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU
3. Lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan

2.1.b Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH ,Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

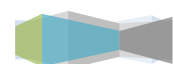


Pada tahun 2020 melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan kegiatannya Pemantauan Kualitas Lingkungan telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai adalah 50,5 sedangkan hasil yang dicapai 60,67. Dengan demikian indeks kualitas Air telah berhasil memenuhi dan melampaui target tahun 2020. Pencapaian indeks 60.67 pada tahun 2020 melebihi target Renstra 2018-2023 dimana sampai dengan tahun 2023 indeks kualitas air ditargetkan sebesar 51

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, beserta seluruh Kasi dibawahnya

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga dan mengelola kualitas air melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas air sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air dan udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.
- c. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 diperoleh dari hasil



pemantauan kualitas air sungai pada 4 lokasi sungai yaitu :

- ✓ Sungai Tabunio
- ✓ Sungai Kintap
- ✓ Sungai Asam-Asam
- ✓ Sungai Maluka

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Index Kualitas Air** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil
2. Antrian jadwal pengujian di laboratorium yang terlalu lama, dalam hal ini untuk parameter yang tidak bias dilakukan pengujian di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut.
3. Akses menuju lokasi pengambilan sampel cukup sulit

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Memperketat perizinan pembuangan air limbah ke badan air.
3. Dukungan pemerintah daerah pada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan serta dapat memenuhi jumlah parameter wajib yang dipersyaratkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

Rencana aksi yang dilakukan:

1. Aksi bersih sungai
2. Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air

2.1.c Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja



Utama 3 Indeks kualitas udara ambient

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks kualitas udara ambient sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (*sumber: IKLH Indonesia, 2014*) .

$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan Rumus :

I_{eu} = rata rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantaun dibagi NO₂ Ref EU).

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udara dengan parameter SO₂ dan NO₂.

Kriteria 4 lokasi pengambilan sample udara ambient

a. Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

b. Industri



Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber

c. Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.

d. Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, mewakili musim kemarau dan penghujan (sekitar April dan Agustus). Pemasangan Alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler dilakukan pada 4 lokasi mewakili ,pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkan selama 14 hari.

Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan pencapaian indeks 91.29 pada tahun 2020 telah melebihi target tahun 2020 senilai 87,25 dan melebihi target Renstra 2018-2023 dimana sampai dengan tahun 2023 indeks kualitas air ditargetkan sebesar 87,75.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambient melalui edaran Bupati.melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati



tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.

- b. Melakukan pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air dan udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.
- a. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, mewakili musim kemarau dan penghujan. Pemasangan Alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :

- ✓ Perkantoran (di depan DPRKPLH)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Syairani)
- ✓ Industri (PT. Indofood)
- ✓ Pemukiman (Komplek Puri Anggoro, Angsau)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Index Kualitas Udara** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil
2. Antrian jadwal pengujian di laboratorium yang terlalu lama, dalam hal ini untuk parameter yang tidak bias dilakukan pengujian di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara, misalnya masih terdapat pembakaran



sampah yang dilakukan masyarakat

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak)
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambient

Rencana aksi :

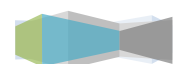
Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambient

2.1.d Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid. Tata Kota dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman tahun 2017 terealisasi sebesar 50%, tahun 2018 , 60% tahun 2019 , terealisasi sebesar 70% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 75%. Target sampai dengan 2023 pada Renstra 2018-2023 penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sebesar 80% sehingga pencapaian tahun 2020 sebesar 75% masih belum memenuhi target jangka menengah

Seiring meningkatnya perkembangan pemukiman, semakin meningkat pula keinginan untuk pemasangan penerangan/ lampu jalan umum, sesuai dengan permintaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Salah satu dampak yang ditimbulkan jika tidak terpasangnya penerangan jalan umum adalah meningkatnya terjadinya kecelakaan di jalan dan tindak kriminal. Untuk itu perlu adanya



penerangan jalan umum untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum ini memiliki sasaran pada aspek :

- Meningkatnya penerangan jalan umum untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut
- Dengan adanya pemasangan penerangan jalan umum maka perlunya pemeliharaan yang telah terpasang oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukima** antara lain :

- 1) Masih ada beberapa permukiman yang belum mendapatkan jaringan listrik dari PLN dan masih merupakan jaringan swadaya masyarakat setempat, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemasangan jaringan PJU
- 2) Antara pemukiman satu dengan lainnya berjauhan sehingga membutuhkan material dan kebutuhan biaya yang banyak untuk menyambungkan jaringan PJU yang ada.
- 3) Masih terbatasnya anggaran sehingga banyak permintaan pemasangan jaringan PJU dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan dan dipenuhi.
- 4) Masih terbatasnya petugas dan sarana pendukung operasional pemeliharaan dan pemasangan jaringan PJU, mengakibatkan sering terlambatnya perbaikan dan pelayanan bagi masyarakat (jumlah sarana prasana dan petugas operasional tidak sebanding dengan jumlah titik lampu yang dipelihara).

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya kerjasama yang baik dengan pihak penyedia jaringan listrik yaitu PLN dalam hal penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat secara merata.
- 2) Perencanaan ulang mengenai pemasangan jaringan PJU, sehingga penyebaran PJU bisa merata dinikmati oleh masyarakat, salah satunya dengan pembagian jaringan dengan meterisasi.



- 3) Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya pemenuhan anggaran untuk pemerataan pemasangan jaringan PJU berdasarkan usulan masyarakat yang masuk.
- 4) Perlunya penambahan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional PJU.

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Penyusunan Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak PLN dalam hal pemasangan, pemeliharaan dan pemerataan jaringan listrik bagi masyarakat.
3. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum

2.1.e Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 5 Persentase RTH yang Terbangun

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid. Tata Kota dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Target RTH yang terbangun sampai dengan 2023 pada Renstra 2018-2023 sebesar 2,3% sehingga pencapaian tahun 2020 sebesar 2,22% (2,22% dari luasan kota 7639,66 Ha sebesar 169,6 Ha) masih belum memenuhi target jangka menengah berdasarkan Renstra namun jika di bandingkan dengan target luasan RTH publik kota pada RPJMD tahun 2023 sebesar 113,75 Ha maka pencapaian kinerja tahun 2020 telah melampaui target RPJMD di tahun 2023. Seiring tumbuhnya perkembangan kota, semakin meningkat pula kebutuhan akan ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga, berekreasi, dan bersosialisasi. Untuk itu perlu dibuat wadah guna memfasilitasi kegiatan tersebut berupa ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka biasa. Sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Di Kabupaten Tanah Laut, taman menjadi sebuah ikon yang sangat penting dalam perkembangan kota, sebagai daya



tarik dan cerminan dari sebuah wilayah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 5 Persentase RTH yang Terbangun** antara lain :

1. Masih kurangnya lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk mencapai 30% luas Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang diperkotaan sulit untuk bisa tercapai.
2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun
3. Masih belum optimalnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar sehingga banyak trotoar yang alih fungsi dari fungsi yang sebenarnya.
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan lingkungan maupun perkotaan mengakibatkan masih ditemukannya tumpukan sampah dan membuang sampah bukan pada tempatnya.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan
6. Masih belum optimalnya jaringan saluran drainase kota yang ada, mengakibatkan banyak terjadi genangan air ketika hujan.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau
2. Optimalisasi pemberdayaan petugas taman yang ada dilapangan untuk menegur atau mengingatkan apabila ditemukan masyarakat yang merusak fasilitas tersebut
3. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan.



4. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.
5. Pemeliharaan dan pembersihan jaringan drainase dan median jalan perkotaan

Rencana Aksi :

1. Perencanaan yang lebih baik terkait saluran drainase perkotaan dan lingkungan
2. Membuat papan informasi tentang tata tertib aturan untuk menjaga dan melestarikan fasilitas umum RTH yang tersebar
3. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH
4. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
5. Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan

2.2 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 2

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis nomor 2 yaitu meningkatnya kualitas perumahan layak huni dengan indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2020 terealisasi sebesar 43,60% (218 Unit) , sampai dengan 2020 telah terealisasi sebanyak 1.157 unit rumah layak huni terbangun , sedangkan target Renstra sampai dengan 2023 terbangun 2.500 unit rumah layak huni sehingga pencapaian tahun 2020 masih belum mencapai target jangka menengah.

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah



setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Tahun 2020 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah kebawah dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan. Kegiatan Bantuan Peningkatan Rumah Sederhana pada Bidang Perumahan



Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2020 ini dilaksanakan sebanyak 218 unit penerima bantuan dengan sumber dana, APBD, APBN Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan peningkatan rumah sederhana ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Rumah Sederhana ini mengacu pada BNBA (By Name By Address)

Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator persentase rumah layak huni tidak mencapai target 100% hanya terealisasi 43,60% (218 Unit) hal ini salah satunya dikarenakan belum di setujuinya usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 1001 unit dan usulan Bedah Rumah Tahun di tahun 2020 dari dana Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan, dikarenakan anggaran pusat dialihkan untuk penanganan Covid 19

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni** antara lain :

1. Masih terdapat kendala pemenuhan syarat administrasi penerima bantuan yang
2. Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal
3. Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah
4. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5. Masterplan penanganan PSU masih belum ada
6. Belum terpenuhinya anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru
2. Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidk layak huni
3. Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Menganggarkan perencanaan masterplan PSU



5. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait
2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi
3. Penelusuran dan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan P'rovinsi untuk mencari potensi anggaran diluar APBD

3. Eselon III (Sekretaris/ Kepala Bidang)

3.a Sekretaris

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Indikator 7 Nilai SAKIP SKPD	BB	BB	100%
2.	Sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Indikator 8 Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%
3.	Sasaran 5 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Indikator 9 Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%



Tabel Perbandingan Kinerja Sekretaris 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	-	62,76	71,9	75	75	100%
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.a.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 3

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Indikator 7 Nilai SAKIP SKPD	BB	BB	100%

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya yaitu 2018 – 2019 telah mengalami peningkatan di 2018 nilai sakip 62,76 dan di tahun 2019 nilai sakip 71,9 . Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatkan kualitas Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan indikator sasaran Nilai SAKIP SKPD capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 3 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan dibawah ini.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 3 dengan Indikator Kinerja Utama** Nilai SAKIP SKPD antara lain :

1. Pengarsipan data-data pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya belum tertib
2. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan penempatan



Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tata cara pengarsipan data
2. Optimalisasi monitoring capaian kinerja dan realisasi kegiatan
3. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan SDM di perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tupoksi masing-masing

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pelaksanaan bimtek/pelatihan tata cara pengarsipan data yang baik dan benar.
2. Mengikutsertakan SDM untuk mengikuti sosialisasi/bimtek/workshop sesuai tupoksi penempatan dan tupoksi masing-masing

Kasubbag Keuangan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 3 ini dilaksanakan melalui Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbag Keuangan, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasubbag keuangan didukung 5 orang SDM yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Kasubbag Keuangan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Menyusun laporan keuangan SKPD	Indikator Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 Laporan	19 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasubbag Keuangan 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Menyusun laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	100%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasubbag Keuangan

Keg	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
Penyusunan laporan keuangan	Rp 84.686.600	Rp4.720.000	Rp14.860.400	Rp26.481.700	Rp34.062.200	94,61

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan yang telah dilaksanakan

Jika dilihat perbandingan kinerja Kasubbag Keuangan tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun Sebelumnya dari tahun 2017-2019 rata-rata telah tercapai 100%, sedangkan Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan tahun 2020 yaitu Kinerja Utama menyusun laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun) dengan indikator kinerja jumlah laporan keuangan yang disusun dengan target 19 laporan (1 laporan keuangan akhir tahun, 12 laporan bulanan kinerja keuangan dan laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran, 4 laporan triwulanan, 2 laporan keuangan semesteran prognosis) telah tercapai 100%. Sehingga dengan demikian perjanjian kinerja Kasubbag Keuangan telah terpenuhi 100%.

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

1. Pada tahun 2020 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan, Kasubbag Keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan 19 (Sembilan belas) laporan keuangan (1 laporan keuangan akhir tahun, 12 laporan bulanan kinerja keuangan dan laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran, 4 laporan triwulanan, 2 laporan keuangan semesteran prognosis) Sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 19 laporan dengan capaian 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp Rp



84.686.600,- dengan realisasi sebesar Rp Rp 80.124.300 atau capaian sebesar 94,61%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena belanja cetak laporan keuangan tahunan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu Kasubbag Keuangan juga melaksanakan pelayanan administrasi keuangan atau dalam rangka pelayanan penatausahaan keuangan dilingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan administrasi keuangan GU (BL), BTL LS, Gaji/Tunjangan, IWP, BPJS, JKK dan JKM

2. Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Keuangan telah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dengan lancar 2020 serta dapat menyelesaikan 19 laporan keuangan tepat waktu atau dengan capaian kinerja 100%

Kasubbag Perencanaan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 3 ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dan kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbag Perencanaan, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasubbag Perencanaan didukung 4 orang SDM yang terdiri dari 1 orang PNS dan 3 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Indikator Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.	Sasaran Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Indikator Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 dokumen	3 dokumen	100%



**Tabel Perbandingan Kinerja Kasubbag Perencanaan 2020
dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%

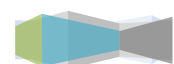
Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasubbag Perencanaan

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Rp 22.499.600	Rp -	Rp7.419.000	Rp 570.000	Rp11.905.000	88,42
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Rp 22.497.100	Rp -	Rp5.560.200	Rp5.500.000	Rp 9.900.000	93,17

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan yang telah dilaksanakan

Jika dilihat perbandingan kinerja Kasubbag Perencanaan tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun Sebelumnya dari tahun 2017-2019 rata-rata telah tercapai 100%, Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP) dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen perencanaan dengan (RKA, RKAP, DPA, DPAP) target 4 dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP) telah tercapai 100%.
2. Kinerja Utama Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP) dengan indikator kinerja Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP target 3 dokumen (LPPD, LKPJ, LAKIP)



telah tercapai 100%. Sehingga dengan demikian perjanjian kinerja Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

1. Pada tahun 2020 telah melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dalam rangka penyusunan 4 dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP) sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 4 dokumen dengan capaian 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 22.499.600 dengan realisasi sebesar Rp 19.894.000 atau capaian sebesar 88,42%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena belanja cetak dokumen disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pada tahun 2020 telah melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dalam rangka penyusunan 3 dokumen yaitu LPPD, LKPJ, LAKIP sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 3 dokumen dengan capaian 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 22.497.100 dengan realisasi sebesar Rp 20.960.200 atau capaian sebesar 93,17%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena belanja cetak dokumen disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Perencanaan telah melaksanakan kegiatan serta dapat menyelesaikan target yang ditentukan atau dengan capaian kinerja 100%

3.a.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Indikator 8 Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2019 rata-rata mencapai 100%. Pada tahun 2020 Sasaran



strategis Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor dengan indikator sasaran Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020, dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 4 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar antara lain :

1. Keterbatasan SDM berstatus PNS
2. Banyaknya Jumlah Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Luasan wilayah penyebaran Barang Milik Daerah menghambat optimalisasi monitoring Aset secara
4. Keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana transportasi kedinasan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
2. Membuat matrik rencana monitoring Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Optimalisasi anggaran dan sarana transportasi yang telah ada

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan anggaran



3. Mengajukan usulan permohonan penambahan kendaraan dinas.

3.a.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 5

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.	Sasaran 5 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Indikator 9 Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2019 rata-rata telah mencapai 100% . Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan indikator sasaran terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dilaksanakan melalui Program/kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
 - Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
 - Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :
 - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 5 dengan Indikator Kinerja Utama terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu antara lain :

- Keterbatasan SDM berstatus PNS



Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 4 ini dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran strategis Skretaris DPRKPLH nomor 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbag umum dan Kepegawaian , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasubbag keuangan didukung 8 orang SDM yang terdiri dari 2 orang PNS dari Bidang Tata Kota yang diperbantukan sebagai Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu DPRKLH dan 6 orang PTT yang di tugaskan untuk petugas keamanan sebanyak 1 orang, petugas kebersihan kantor sebanyak 1 orang, 4 orang yang di tugaskan untuk membantu penatausahaan aset

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 5 ini dilaksanakan melalui Program/kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi



- Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
- Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran strategis Sekretaris DPRKPLH nomor 5 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasubbag umum dan Kepegawaian , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasubbag umum dan Kepegawaian didukung 3 orang SDM yang terdiri dari 1 orang PNS dan 3 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Indikator Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 Jenis	18 Jenis	163,64%
		Indikator Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2000 surat	3100 Surat	155%
2.	Sasaran Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Indikator Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	1 dok	1 dok	100%
3.	Sasaran Mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	Indikator Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan	2 kali pameran	-	-
4.	Sasaran Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Indikator Jumlah data aset yang tercatat	2.312 aset yang tercatat	2515 aset yang tercatat	108,78%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	15 Jenis	15 Jenis	18 Jenis	11 Jenis	18 Jenis	163,64%
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2670 Surat	2351 Surat	2088 Surat	2000 Surat	3100 Surat	155%
2	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%
3	Mengadakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	-	-
4	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah data aset yang tercatat	2022 aset yang tercatat	1999 aset yang tercatat	2312 aset yang tercatat	2.312 aset yang tercatat	2.515 aset yang tercatat	108,78%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp 438.625.007	Rp 27.682.491	Rp 44.467.000	Rp 85.196.997	Rp 138.623.077	67,48
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 190.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00



		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/ Kearsipan	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Rp 303.951.946	Rp 82.968.010	Rp88.828.007	Rp 8.565.000	Rp102.892.831	93,19
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Rp 31.972.400	Rp 8.299.350	Rp15.430.100	Rp 3.478.150	Rp 2.691.050	93,51
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Rp 5.554.232.823	Rp 1.351.614.997	Rp 1.381.426.976	Rp 1.383.680.325	Rp 1.404.439.930	99,40
2	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 44.550.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Rp 199.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
3	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp 25.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
4	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah aset yang tercatat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp 247.547.300	Rp 79.519.600	Rp38.161.400	Rp11.190.000	Rp109.516.000	96,30

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang telah dilaksanakan

Jika dilihat perbandingan kinerja Kasubbag Perencanaan tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun Sebelumnya dari tahun 2017-2019 rata-rata telah tercapai



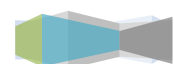
100%, Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara dengan target 11 jenis telah terealisasi 18 jenis yaitu excavator, dumptruk, loader, truk crane, station wagon, minibus, truk attachmen, pick up, mobil tanki, mobil tinja kendaraan bermotor khusus, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, AC, PC Komputer, Laptop, printer, genset dengan capaian lebih dari 100% dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 438.625.007 dengan realisasi sebesar Rp 295.969.565 atau capaian sebesar 67,48%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran .
 - Sedangkan kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor pagu kegiatannya telah di nol kan karena adanya refocusing pagu kegiatan yang disebabkan wabah covid-19
 - b. Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan dengan target 2000 telah terealisasi 3100 surat dengan capaian lebih dari 100% dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :
 - Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 303.951.946 dengan realisasi sebesar Rp 283.253.848 atau capaian sebesar 93,19%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran
 - kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 31.972.400 dengan realisasi sebesar Rp 29.898.650 atau capaian sebesar 93,51%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran
 - kegiatan Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.554.232.823 dengan realisasi sebesar Rp 5.521.162.228 atau capaian sebesar 99,40%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan



dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran

2. Kinerja Utama Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun) dengan indikator kinerja Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib dengan target 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen berisi data terkait kenaikan gaji berkala 23 orang,kenaikan pangkat 7 orang, pembuatan karis/karsu 2 orang, surat keterangan cuti 11 orang, surat keteranganpensiun 6 orang sehingga capaian kinerja 100%,kegiatan ini salah satunya didukung Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pagu kegiatannya telah di nol kan karena adanya refokusing pagu kegiatan yang disebabkan wabah covid-19, namun meskipun pagu 2 kegiatan tersebut telah di nol kan tetapi target pelayanan kepegawaian secara keseluruhan telah tercapai 100%
3. Kinerja Utama Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan indikator Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan dengan target 2 kali pameran tidak bisa direalisasikan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 tidak melaksanakan kegiatan Pamerah Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan Pameran Anggrek di karenakan adanya wabah covid-19 dan Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah pendukung pagu anggarannya telah di nolkan karena adanya refokusing namun meskipun pagu kegiatan tersebut telah di nol kan untuk Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan membuat spanduk-spanduk informasi kegiatan dan penginformasian kegiatan di website DPRKPLH sehingga maksud dan tujuan penyampaian informasi kepada masyarakat tetap terpenuhi.
4. Kinerja Utama Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap dengan indikator Jumlah aset yang tercatat dengan target 2.312 aset yang tercatat dan dengan adanya penambahan 203 buah asset pada tahun 2020 maka telah terealisasi 2515 aset yang tercatat di Kartu



Inventaris Barang DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2020 sehingga capaian lebih dari 100% dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 247.547.300 dengan realisasi sebesar Rp 238.387.000 atau capaian sebesar 96,30%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran .

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Umum dan Kepegawaian telah melaksanakan kegiatan serta dapat menyelesaikan target yang ditentukan atau dengan capaian kinerja 100%

3.b Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

**Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 6 Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Indikator 10 Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8 Pengaduan (100%)	8 Pengaduan (100%)	100%
2.	Sasaran 7 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Indikator 11 Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (Pelaku Usaha)	71% (15 Pelaku Usaha)	101,42%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (Pelaku Usaha UKL-UPL)	20% (12 Pelaku Usaha UKL-UPL)	100%
3.	Sasaran 8 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Indikator 12 Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	100% (5 bs)	100%



**Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH 2020
dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	6 Pengaduan (100%)	4 Pengaduan (100%)	5 Pengaduan (100%)	8 Pengaduan (100%)	8 Pengaduan (100%)	100%
2	Meningkatkan ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	62% (13 Pelaku Usaha)	67% (10 Pelaku Usaha)	92% (12 Pelaku Usaha)	70% (Pelaku Usaha)	71% (15 Pelaku Usaha)	101,42%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	13% (6 Pelaku Usaha UKL-UPL)	10% (6 Pelaku Usaha UKL-UPL)	12,5% (10 Pelaku Usaha UKL-UPL)	20% (Pelaku Usaha UKL-UPL)	20% (12 Pelaku Usaha UKL-UPL)	100%
3	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	40% (2 bs)	220% (11 bs)	200% (10 bs)	100 % (5 bs)	100% (5 bs)	100%



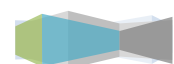
3.b.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 6

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 6 Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Indikator 10 Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8 Pengaduan (100%)	8 Pengaduan (100%)	100%

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Kabid P2LH tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2019 rata-rata Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti mencapai 100% . Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatkan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator sasaran Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kabid P2LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Pengaduan Lingkungan Hidup Pengaduan Lingkungan merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak kondisi lingkungan yang di terima masyarakat. Dampak lingkungan adalah ketidak Harmonisan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga memberikan ketidak nyamanan kehidupan baik terhadap sistem alam maupun kepada kenyamanan hidup manusia.

Di Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas lingkungan merupakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat dibidang lingkungan. Lingkup kerjanya adalah Keterlibatan Pemerintah, swasta, dan peran masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan lingkungan untuk mengatur jalannya kegiatan usaha. Pihak swasta melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan masyarakat diharapkan mendapat manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan berupa peluang kerja dll. Namun dalam perjalanan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan lingkungan maka akan terjadi dampak yang memberi respon lingkungan. Dampak lingkungan yang ada di masyarakat akan muncul pengaduan masyarakat sebagai respon gangguan lingkungan yang terjadi.



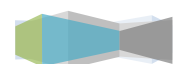
Pengaduan masyarakat wajib di fasilitasi dengan pengelolaan pengaduan dengan tujuan didapatkan solusi penanganan lingkungan atau penegakan hukum bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2020 terdapat 8 kasus lingkungan yang muncul dan difasilitasi untuk ditangani. Kasus terbanyak berkenaan dengan dampak bau akibat kegiatan peternakan ayam sebanyak 2 kasus namun sudah terselesaikan dengan musyawarah warga dan pengusaha. Kemudian kasus lain yang muncul adalah dampak industri (2 kasus) berupa dampak kebisingan, asap cerobong, debu serta kebauan. Kasus industri biasanya diselesaikan dengan perbaikan terhadap instalasi pengelolaan lingkungan. Kasus tambang (2 kasus) berupa kegiatan reklamasi yang tidak dilaksanakan. Dan Kasus perekebunan yang diadukan LSM berkenaan dengan pemanfaatan sepadan sungai. Penangan kasus dilakukan langkah pembinaan terhadap kegiatan usaha dalam optimalisasi pengelolaan lingkungan serta diberi teguran atau peringatan untuk tetap meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan. Dan melaksanakan sosialisasi lingkungan kepada masyarakat.

Aduan yang di sampaikan masyarakat berkenaan dengan dampak lingkungan, seperti gangguan pencemaran udara, air, dan cemaran limbah yang biasanya di timbulkan oleh kegiatan usaha. Secara SOP pengaduan yang masuk wajib di kelola ditangani dengan memberikan mediasi penyelesaian permasalahan yang muncul di masyarakat. Jumlah pengaduan yang muncul berbanding terbalik dengan peningkatan pengawasan lingkungan terhadap semua kegiatan usaha, semakin taat kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan semakin kecil potensi dampak lingkungan yang muncul

Sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang berbunyi :

“ Tahapan Pengelolaan Pengaduan terdiri atas :

- a. Penerimaan;
- b. Penelaahan;
- c. Verifikasi;
- d. Perumusan laporan hasil; dan
- e. Tindak lanjut hasil pengaduan.



a. Penerimaan Pengaduan

Langkah-langkah dalam penerimaan pengaduan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Registrasi/penomoran/kodefikasi

Setiap aduan yang masuk ke Pos Pengaduan Lingkungan Hidup akan dicatat dalam buku register pengaduan dan dibuatkan berita acara penerimaan pengaduan. pemberitahuan pengaduan diregistrasi.

2. Tanda terima

Sebagai bukti tanda terima bahwa pengaduan sudah masuk dalam registrasi pengaduan pada pos pengaduan lingkungan hidup maka dibuatkan surat pemberitahuan pengaduan diregistrasi.

b. Penelaahan

Pengaduan yang diregistrasi akan di telaah untuk selanjutnya diklasifikasikan menjadi :

1. pengaduan lingkungan hidup

pengaduan yang diklasifikasikan sebagai pengaduan lingkungan tetapi bukan merupakan kewenangan DPRKPLH maka pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan

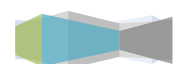
2. Pengaduan non lingkungan hidup.

Dalam hal pengaduan yang diklasifikasikan sebagai pengaduan non lingkungan hidup maka DPRKPLH akan meneruskan pengaduan yang diterima kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan.

c. Verifikasi

1. Pelaksana verifikasi

Verifikasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) kabupaten Tanah Laut, apabila tidak ada PPLHD di Kabupaten Tanah Laut maka verifikasi dilaksanakan oleh PPLHD di Provinsi Kalimantan Selatan atau oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH dapat berkoordinasi dengan PPLHD Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau PPLHD Kabupaten Tanah Laut. PPLHD provinsi Kalimantan Selatan dapat berkoordinasi dengan PPLHD



Kabupaten Tanah Laut.

2. Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi dapat berupa data, fakta dan temuan yang :

- a. Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan izin
- b. Melakukan pelanggaran (rekomendasi)
 - Sanksi Administratif;
 - Penyelesaian Sengketa (Perdata); atau
 - Dilakukan penyidikan (pidana)

d. Perumusan Laporan Hasil

Hasil kegiatan verifikasi dituangkan dalam Berita Acara verifikasi pengaduan yang di tandatangani oleh semua pelaksana verifikasi berisi data, fakta dan temuan lapangan serta rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak teradu. Selain itu di buat laporan hasil kegiatan verifikasi lapangan untuk disampaikan ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

e. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan

Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak teradu akan di monitoring sejauh mana progress perkembangan upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Hasil monitoring tindak lanjut ini dituangkan dalam Berita Acara Monitoring dan ditandatangani oleh tim monitoring dan pihak teradu.

Pengelolaan pengaduan di bidang lingkungan hidup pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Pengaduan yang masuk berjumlah 8 (Delapan) pengaduan teregistrasi dan 3 (tiga) pengaduan tahun sebelumnya yang masih dilakukan monitoring tindak lanjut.
2. Pengaduan yang diregistrasi, yaitu :
 - Pengaduan pencemaran Sungai Satui bersumber dari aliran air lahan tambang Pelahu Usaha Kecamatan Kintap berdasarkan surat Kepala DLH Provinsi Kalsel
 - Pengaduan warga Desa Nusa Indah terhadap aktivitas penggilingan padi milik Pelaku Usaha Kecamatan Bati-Bati.



- Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintapura Kecamatan Kintap
 - Pengaduan dari Bapak Salamun terhadap aktivitas usaha peotongan ayam dan itik milik Pelaku Usaha Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari.
 - Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintap Kecamatan Kintap.
 - Pengaduan dari Bapak Sutrisno (Ketua RT. 05 Desa Sungai Jelai) terhadap aktivitas usaha peternakan ayam petelur milik Usaha Pelaku di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang.
 - Pengaduan dari Bapak H. Taberi terhadap Pelaku Usaha Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari
 - Pengaduan dari Bapak Sumaryono terhadap aktivitas usaha peternakan ayam potong milik Pelaku Usaha Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari.
3. Pengaduan tahun sebelumnya yang masih dilakukan penanganan yaitu ;
- Tindak lanjut monitoring pengaduan warga Komplek Multi Madya terhadap Pelaku Usaha Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
 - Tindak lanjut penanganan pengaduan petani tambak Desa Muara Kintap terhadap Pelaku Usaha Kecamatan Kintap
 - Tindak lanjut monitoring penanganan pengaduan Bapak Suriansyah terhadap aktivitas pengeringan/fermentasi ikan milik Pelaku Usaha di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung.
4. Status pengelolaan pengaduan yang ditangani tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- Pengaduan pencemaran Sungai Satui bersumber dari aliran air lahan tambang Pelaku Usaha Kecamatan Kintap berdasarkan surat Kepala DLH Provinsi Kalsel (Status masih dalam pemantauan)
 - Pengaduan warga Desa Nusa Indah terhadap aktivitas penggilingan padi milik Pelaku Usaha Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati. (Status masih dalam pemantauan)



- Pengaduan dari PERMADA terhadap PT. Citra Putra Kebun Asri (PT. CPKA) Pelaku Usaha Desa Kintapura Kecamatan Kintap (status masih dalam pemantauan)
- Pengaduan dari Bapak Salamun terhadap aktivitas usaha peotongan ayam dan itik milik Pelaku Usaha Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari. (status masih dalam pemantauan)
- Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintap Kecamatan Kintap. (status masih dalam pemantauan)
- pengaduan dari Bapak Sutrisno (Ketua RT. 05 Desa Sungai Jelai) terhadap aktivitas usaha peternakan ayam petelur milik Pelaku Usaha di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang. (Status selesai)
- Pengaduan dari Bapak H. Taberi terhadap Pelaku Usaha Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari (status masih dalam pemantauan)
- Pengaduan dari Bapak Sumaryono terhadap aktivitas usaha peternakan ayam potong milik Pelaku Usaha Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari. (status selesai)
- Pengaduan warga Komplek Multi Madya terhadap Pelaku Usaha Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati (status masih dalam pemantauan)
- Pengaduan petani tambak Desa Muara Kintap terhadap Pelaku Usaha Kecamatan Kintap (status selesai)
- Pengaduan Bapak Suriansyah terhadap aktivitas pengeringan/fermentasi ikan milik Pelaku Usaha di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. (status masih dalam pemantauan)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 6 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti antara lain :

1. Belum optimal koordinasi antar instansi-instansi maupun unit-unit yang terlibat dalam tim penanganan pengaduan lingkungan hidup kabupaten
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan masyarakat terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup
3. Keterbatasan SDM



Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi yang lebih optimal lagi antar instansi-instansi maupun unit-unit yang terlibat dalam tim penanganan pengaduan lingkungan hidup kabupaten, sehingga upaya penemuan dan penyelesaian kasus-kasus pengaduan lingkungan hidup bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
2. optimalisasi monitoring pelaksanaan Standart Operational Prosedur (SOP) mengenai Pos Pengaduan dan penanganan pengaduan di bidang lingkungan hidup untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup kepada masyarakat agar meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pelaksanaan bimtek/pelatihan tata cara pengarsipan data yang baik dan benar.



Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 6 ini dilaksanakan melalui Program Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P2KLH DPRKPLH nomor 6 Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa didukung 1 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Indikator Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan	8 Pengaduan	160%
2.	Sasaran Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Indikator Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	100%
3.	Sasaran Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Indikator Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	100%
4.	Sasaran Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Indikator Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	8 Pengaduan	160%
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	100%
3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	100%
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	100%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Rp 87.104.600	Rp -	Rp 2.800.000	Rp 16.102.258	Rp 22.443.333	47,47
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi							



3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan							
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan

Jika dilihat perbandingan kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun Sebelumnya dari tahun 2017-2019 rata-rata telah tercapai 100%, Perjanjian Kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup dengan indikator Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi dengan target 5 pengaduan terealisasi 8 pengaduan dengan capaian lebih dari 100% , dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengaduan pencemaran Sungai Satui bersumber dari aliran air lahan tambang Pelaku Usaha Kecamatan Kintap berdasarkan surat Kepala DLH Provinsi Kalsel
 - Pengaduan warga Desa Nusa Indah terhadap aktivitas penggilingan padi milik Pelaku Usaha Kecamatan Bati-Bati.
 - Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintapura Kecamatan Kintap
 - Pengaduan dari Bapak Salamun terhadap aktivitas usaha peotongan ayam dan itik milik Pelaku Usaha Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari.
 - Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintap Kecamatan Kintap.
 - Pengaduan dari Bapak Sutrisno (Ketua RT. 05 Desa Sungai Jelai) terhadap aktivitas usaha peternakan ayam petelur milik Usaha Pelaku di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang.
 - Pengaduan dari Bapak H. Taberi terhadap Pelaku Usaha Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari



- Pengaduan dari Bapak Sumaryono terhadap aktivitas usaha peternakan ayam potong milik Pelaku Usaha Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari.

2. Kinerja Utama Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup dengan indikator Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi dengan target 5 Dokumen Verifikasi terealisasi 5 Dokumen Verifikasi dengan capaian 100 % , dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Dokumen Verifikasi atas Pengaduan warga Desa Nusa Indah terhadap aktivitas penggilingan padi milik Pelaku Usaha Kecamatan Bati-Bati.
- 1 Dokumen Verifikasi atas Pengaduan dari Bapak Salamun terhadap aktivitas usaha peotongan ayam dan itik milik Pelaku Usaha Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari.
- 1 Dokumen Verifikasi atas Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintap Kecamatan Kintap.
- 1 Dokumen Verifikasi atas Pengaduan dari Bapak Sutrisno (Ketua RT. 05 Desa Sungai Jelai) terhadap aktivitas usaha peternakan ayam petelur milik Usaha Pelaku di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang.
- 1 Dokumen Verifikasi atas Pengaduan dari Bapak H. Taberi terhadap Pelaku Usaha Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari

3. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindaklanjut pengaduan bidang lingkungan hidup dengan indikator Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan dengan target 5 Dokumen Rekomendasi terealisasi 5 Dokumen Rekomendasi dengan capaian 100 % , dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Dokumen Rekomendasi atas Pengaduan warga Desa Nusa Indah terhadap aktivitas penggilingan padi milik Pelaku Usaha Kecamatan Bati-Bati.
- 1 Dokumen Rekomendasi atas Pengaduan dari Bapak Salamun terhadap aktivitas usaha peotongan ayam dan itik milik Pelaku Usaha Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari.
- 1 Dokumen Rekomendasi atas Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintap Kecamatan Kintap.

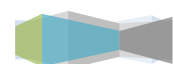


- 1 Dokumen Rekomendasi atas Pengaduan dari Bapak Sutrisno (Ketua RT. 05 Desa Sungai Jelai) terhadap aktivitas usaha peternakan ayam petelur milik Usaha Pelaku di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang.
- 1 Dokumen Rekomendasi atas Pengaduan dari Bapak H. Taberi terhadap Pelaku Usaha Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari

4. Kinerja Utama Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan dengan indikator Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring dengan target 5 Kegiatan Monitoring terealisasi 5 Kegiatan Monitoring dengan capaian 100 % , dengan rincian sebagai berikut :

- Pengaduan pencemaran Sungai Satui bersumber dari aliran air lahan tambang Pelaku Usaha Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap berdasarkan surat Kepala DLH Provinsi Kalsel
- Pengaduan dari PERMADA terhadap Pelaku Usaha Desa Kintap Kecamatan Kintap.
- Pengaduan dari Bapak Sumaryono terhadap aktivitas usaha peternakan ayam potong milik Pelaku Usaha Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari
- Tindak lanjut monitoring pengaduan warga Komplek Multi Madya terhadap Pelaku Usaha Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
- Tindak lanjut monitoring penanganan pengaduan Bapak Suriansyah terhadap aktivitas pengeringan/fermentasi ikan milik Pelaku Usaha di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung

5. Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui Program Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.495.000 dengan realisasi sebesar Rp 41.345.591 atau capaian sebesar 83,53%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran



3.b.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 7

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Sasaran 7 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Indikator 11 Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (Pelaku Usaha)	71% (15 Pelaku Usaha)	101,42%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (Pelaku Usaha UKL-UPL)	20% (12 Pelaku Usaha UKL-UPL)	100%

Pengawasan lingkungan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kegiatan usaha dan/ atau kegiatan mentaati ketentuan lingkungan yang mengiringi kewajiban pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai kosekuensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan lingkungan yang menyangkut perubahan Geografi, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial, ekonomi dan Budaya. Dampak Akibat dari suatu kegiatan yang berlangsung mempengaruhi perubahan ruang atau penggunaan lahan sehingga terjadi perubahan fungsi lingkungan berkenaan dengan pemanfaat ruang. Demikian juga kegiatan usaha pada suatu tempat berpengaruh terhadap perubahan struktur Bentang tanah, Biologi berupa flora dan fauna dan perubahan Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan bagaimana Kegiatan usaha yang diberikan izin usaha oleh Pemerintah diawasi untuk selalu taat terhadap ketentuan lingkungan . Didalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha berpedoman kepada Dokumen Lingkungan yang memuat pedoman pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan.. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan.

Pada tahun 2020 terdapat 128 perusahaan yang aktif yang telah dikeluarkan izin lingkungan oleh pemerintah. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan adalah disetujuinya Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup kegiatan usaha. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara



(PPU) dan Pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk taat memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pedoman dokumen lingkungan yang mendasari perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pada saat pelaksanaan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan usaha bertujuan agar pelaku usaha taat terhadap ketentuan lingkungan. Adapun permasalahan lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan pada umumnya masih ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal.

Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. **Kesesuaian dokumen** dengan kegiatan yang berlangsung menyangkut kapasitas produksi dan legalitas perusahaan.
2. Dimilikinya **perizinan pengelolaan lingkungan** melingkup izin pengelolaan limbah cair, izin pengelolaan Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (TPS LB3)
3. **Fasilitas pengelolaan lingkungan** yang wajib dimiliki dan secara teknis sesuai ketentuan, seperti dimilikinya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) , Cerobong pengendalian pencemaran udara , dimilikinya Bangunan TPS LB3, dll
4. **Baku mutu lingkungan yang ditaati. BML** merupakan batas toleransi yang dapat diterima oleh lingkungan.
5. **Kewajiban Pelaporan** yang disampaikan sebagai sebagai monitoring evaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan.

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2020 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan perizinan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin IPAL dan Izin TPS LB3. Ketidaktaatan karena tidak dimilikinya izin PPLH yang mengiringi ketentuan teknis fasilitas pengelolaan diawasi . Hingga tahun 2020 terdapat 81 perusahaan yang diawasi dengan 27 perusahaan yang taat lingkungan (15 Amdal dan 12 UKL/UPL). Terhadap perusahaan yang tidak taat akan terus dilakukan pembinaan lingkungan.

Pada tahun 2020 sasaran strategis Kabid P2LH Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator :

- Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dengan target 70% pelaku



usaha yang mentaati terealisasi 71% (15 Pelaku Usaha) persentase capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu dengan persentase capaian 101,42%.

Uraian	2017			2018			2019			2020		
	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%
Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20	21	105	15	15	100	15	13	87	20	21	105
Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	20	13	62	15	10	67	15	12	92	20	15	71

Pada tabel diatas di tahun 2020 dilakukan pengawasan terdapat 21 pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal , diantara 21 pelaku usaha tersebut sebanyak 15 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 71% dari pelaku usaha memiliki dokumen amdal yang dilakukan pengawasan.

Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2017-2019, rata-rata persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal meningkat namun pada tahun 2020 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal mengalami penurunan

- Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL dengan target 20% pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL terealisasi 20% (12 Pelaku Usaha) persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan persentase capaian 100%.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 7 dengan Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. jadwal pengawasan yang tersusun belum mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (belum ada skala prioritas)



2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh : Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.
3. Kurangnya SDM Pengawas Lingkungan Hidup
4. Tidak adanya transportasi khusus yang menunjang kegiatan pengawasan (khususnya yang mampu untuk medan berat seperti pertambangan dan perkebunan)

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang telah ada
2. Optimalisasi penggunaan mobil operasional kantor
3. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas)
2. Meminta/mengusulkan penambahan SDM Pengawas Lingkungan Hidup
3. Meminta/mengusulkan penyediaan transportasi khusus untuk pengawasan
4. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.
5. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau



kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

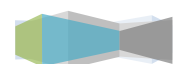
6. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi.
7. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang pertambangan dan pelabuhan khusus batubara, di bidang industri dan jasa, serta di bidang perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan dengan materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya

Uraian	2017			2018			2019			2020		
	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%
Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	30	45	150	35	62	177	40	80	200	40	60	150
Persentase pelaku usaha yang mentaati UKL-UPL	30	6	13	35	6	10	40	10	13	40	12	20

Pada tabel diatas di tahun 2020 dilakukan pengawasan terdapat 60 pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL , diantara 60 pelaku usaha tersebut sebanyak 12 pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL atau sebesar 20% dari pelaku usaha memiliki dokumen UKL-UPL yang dilakukan pengawasan.

Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2017-2019, persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL mengalami penurunan di tahun 2018 namun pada sejak tahun 2019- 2020 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL mengalami kenaikan

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kabid P2LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan



penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 7 ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P2KLH DPRKPLH nomor 7 Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa didukung 1 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Penegakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	Indikator Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20 pelaku usaha	21 pelaku usaha	105%
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	40 perusahaan/pelaku usaha	60 perusahaan/pelaku usaha	150%
2.	Sasaran Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Indikator Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	100%
3.	Sasaran Melakukan penerapan sanksi administratif	Indikator Jumlah sanksi administratif	1 sanksi administratif	2 sanksi administratif	200%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Penegakan Lingkungan Hidup 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	21 pelaku usaha	15 pelaku usaha	13 pelaku usaha	20 pelaku usaha	21 pelaku usaha	105,00%
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	45 perusahaan/pelaku usaha	62 perusahaan/pelaku usaha	80 perusahaan/pelaku usaha	40 perusahaan/pelaku usaha	60 perusahaan/pelaku usaha	150%
2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	14 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	100%
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif	-	-	-	1 sanksi administratif	2 sanksi administratif	200%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Penegakan Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan	Rp 72.429.700	Rp 23.460.500	Rp 9.290.000	Rp 9.710.000	Rp 29.919.100	99,93
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi							



2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper							
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Penegakan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Penegakan Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH dengan indikator :
 - a. Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi dengan target 20 pelaku usaha terealisasi 21 pelaku usaha dengan capaian lebih dari 105%
 - b. Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi dengan target 40 pelaku usaha terealisasi 60 pelaku usaha dengan capaian lebih dari 150%

Pada tahun 2020 ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut khususnya Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah berhasil melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaku usaha di bidang pertambangan, industri, dan perkebunan sebanyak :

 - a) Di bidang pertambangan dan pelabuhan khusus batubara sebanyak 17 perusahaan
 - b) Di bidang industri dan jasa sebanyak 53 perusahaan; dan
 - c) Di bidang perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan sebanyak 11 perusahaan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain :

1. jadwal pengawasan yang tersusun belum mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (belum ada skala prioritas)
2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh



: Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

3. Kurangnya SDM Pengawas Lingkungan Hidup
4. Tidak adanya transportasi khusus yang menunjang kegiatan pengawasan (khususnya yang mampu untuk medan berat seperti pertambangan dan perkebunan)

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang telah ada
2. Optimalisasi penggunaan mobil operasional kantor

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas)
 2. Meminta/mengusulkan penambahan SDM Pengawas Lingkungan Hidup
 3. Meminta/mengusulkan penyediaan transportasi khusus untuk pengawasan
2. Kinerja Utama Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan dengan indikator Jumlah perusahaan yang mengikuti proper dengan target 16 perusahaan yang mengikuti proper terealisasi 16 perusahaan yang mengikuti proper dengan capaian lebih dari 100%:

Kasi Penegakan Lingkungan Hidup melakukan pendampingan tim penilai proper dari DLH provinsi maupun KLHK terhadap pelaku usaha yang mengikuti program proper yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kesekretariatan Proper berada di DLH Provinsi untuk properda dan di KLHK untuk propernas. Peran Kabupaten adalah anggota tim pada saat dilakukan verifikasi proper yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi. Sedangkan penilaian dilakukan oleh DLH provinsi untuk Properda dan KLHK untuk Propernas.



Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain

1. Apabila dibandingkan dengan jumlah Perusahaan / pelaku usaha maka Perusahaan yang mengikuti proper masih terbilang sedikit.
2. Tidak ada SDM khusus untuk melakukan pembinaan proper kepada Perusahaan / pelaku usaha

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah Perusahaan yang diawasi untuk mengikuti program proper setiap tahunnya
2. Memaksimalkan SDM yang telah ada

Rencana Aksi :

1. Memotivasi Perusahaan yang diawasi untuk mengikuti program proper.
 2. Melakukan pembinaan proper terhadap perusahaan sekaligus pada saat pengawasan
 3. Kinerja Utama Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan dengan
4. Kinerja Utama Melakukan penerapan sanksi administratif dengan indikator Jumlah sanksi administratif dengan target 1 sanksi administratif terealisasi 2 sanksi administratif dengan capaian lebih dari 100%, Terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang dijatuhkan sanksi administrasi berupa *teguran tertulis*. 1 pelaku usaha sudah memenuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati Tanah Laut dan mendapat Surat Apresiasi. Sedangkan 1 pelaku usaha lainnya masih dalam proses perbaikan. Penerapan sanksi administratif terhadap Perusahaan / pelaku usaha apabila pada saat pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sanksi Administratif yang diterapkan dalam bentuk SK Bupati.

Sanksi Administratif terdiri dari :

1. Teguran Tertulis
2. Paksaan Pemerintah



3. Pembekuan Izin Lingkungan
4. Pencabutan Izin Lingkungan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih banyak Perusahaan yang tidak memiliki SDM di bidang lingkungan hidup sehingga tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam bidang lingkungan hidup (terutama perusahaan baru dan perusahaan skala menengah)
2. Kurangnya SDM yang khusus membantu dalam persiapan penerapan sanksi administratif

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman secara intensif tentang ketentuan-ketentuan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup kepada Perusahaan baru dan Perusahaan skala menengah
2. Optimalisasi SDM yang ada

Rencana Aksi :

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup kepada Perusahaan baru dan Perusahaan skala menengah
 2. Meminta/mengusulkan SDM yang khusus membantu dalam persiapan penerapan sanksi administratif
6. Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp 72.429.700 dengan realisasi sebesar Rp 72.379.600 atau capaian sebesar 99,93%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran



3.b.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 8

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.	Sasaran 8 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Indikator 12 Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	100% (5 bs)	100%

Pada tahun 2020 sasaran strategis Kabid P2LH Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan indikator Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah dengan target 100 % (5 bank Sampah) terealisasi 100% (5 bank Sampah) dengan persentase pencapaian sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembentukan Bank Sampah Tunas Muda Panyipatan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 85/DPRKPLH/IX/2020 tanggal 24 September 2020
- b. Pembentukan Bank Sampah Bajuin Ceria Desa Bajuin Kec. Bajuin berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 71/DPRKPLH/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020
- c. Pembentukan Bank Sampah Asri Mulya Desa Asri Mulya Kec. Jorong berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 29/DPRKPLH/I/2020 tanggal 2 Maret 2020
- d. Pembentukan Bank Sampah Stasiun Bank Angsau Oke UPTD Puskesmas Angsau Kec. Pelaihari berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 29/DPRKPLH/I/2020 tanggal 22 Januari 2020
- e. Pembentukan Bank Sampah Sejahtera Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 28/DPRKPLH/I/2020 tanggal 17 Januari 2020

Sampah adalah permasalahan bersama yang menjadi tanggungjawab bersama dalam mengatasinya. Didalam kewajiban lingkungan terdapat tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Sebagai wadah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan diperlukan wadah kelembagaan masyarakat berupa Bank Sampah. Bank Sampah merupakan wadah bersama agar masyarakat dapat berpartisipasi terlibat langsung



dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Semakin banyak bank sampah yang aktif memberikan indikator keterlibatan masyarakat dalam mengolah sampah. Semakin banyak sampah yang terkelola semakin kecil dampak sampah yang ditimbulkan. Selain manfaat peningkatan kebersihan secara lingkungan, pemanfaatan sampah tidak saja menanamkan kepedulian tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi dari olah sampah menjadi manfaat (nilai sampah daur ulang dan pemanfaatan kompos).

Kendala dalam pengembangan Bank Sampah adalah

1. kurangnya petugas dalam mengedukasi secara intensif (petugas khusus pendampingan) terhadap masyarakat.
2. Terbentuknya Bank Sampah diperlukan pendampingan lanjutan dalam pengelolaan kelembagaan maupun teknis pemanfaatan sampah tersebut.
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap pengelolaan Bank Sampah juga tidak terlepas dari terpuruknya permintaan industri daur ulang sampah akibat dampak pandemi covid 19.
4. Lemahnya permintaan pasar atau nilai tukar sampah 3R (Reeise ,Reduse, Reeyek) menyebabkan tidak terbelinya bahan baku sampah sehingga menjadi menumpuk dan tak bernilai ekonomi.

Kondisi ini menyebabkan kelesuan kegiatan pengumpulan sampah dan kurangnya minat pengembangan sampah lewat kegiatan Bank Sampah di Tanah Laut. Untuk pengembangan Bank Sampah perlu diambil Langkah langkah perbaikan rantai distribusi sampah dan peningkatan SDM pembina Bank Sampah.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kabid P2LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 8 ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam



Pengendalian Lingkungan Hidup selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P2KLH DPRKPLH nomor 7 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa didukung 5 orang SDM yaitu 1 orang PNS dan 4 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Indikator Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	20 sekolah	20 sekolah	100%
2.	Sasaran Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Indikator Jumlah sekolah adiwiyata	1 sekolah	1 sekolah	100%
3.	Sasaran Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Indikator Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah	5 Bank Sampah	5 Bank Sampah	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 2020 dengan Capaian

Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	21 sekolah	15 sekolah	26 Sekolah	20 sekolah	20 sekolah	100%
2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata	13 sekolah	2 sekolah	15 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	100%
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah	2 Bank Sampah	11 Bank Sampah	10 Bank Sampah	5 Bank Sampah	5 Bank Sampah	100%



Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Rp 104.150.000	Rp -	Rp 30.905.000	Rp11.842.000	Rp55.047.850	93,90
2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata							
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Penegakan Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan dengan indikator Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dengan target 20 sekolah terealisasi 20 sekolah dengan capaian kinerja 100%, dengan rincian peserta sosialisasi sebagai berikut :
 - a. SDN Nusa Indah
 - b. SMPN 1 Bati-Bati
 - c. SMPN 2 Bati-Bati
 - d. SMPN 4 Bati-Bati
 - e. SDN Angsau 4
 - f. MTSN 2 Pelaihari
 - g. SMK 1 Pelaihari
 - h. SMA 1 Pelaihari

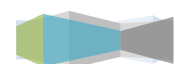


- i. SDN Atu-Atu
- j. SMPN 1 Pelaihari
- k. SNAKMA Pelaihari
- l. SDN 2 Bumi Jaya
- m. SMPN 1 Kintap
- n. SMPN 2 Kintap
- o. SMA 1 Jorong
- p. SMA 1 Jorong
- q. SDN 2 Jorong
- r. SDN 2 Ranggung
- s. SMPN 3 Batu Ampar
- t. SDN 4 Gunung Makmur

2. Kinerja Utama Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan dengan indikator Jumlah sekolah adiwiyata dengan target 1 sekolah terealisasi 1 sekolah dengan capaian kinerja 100%

Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan melalui SMAN 1 Pelaihari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0800/KUM/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerima penghargaan Adiwiyata setiap tahunnya tahun 2015, 2017 sampai dengan 2020, hal ini tidak terlepas dari upaya



pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DPRKPLH untuk selalu melakukan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan berkesinambungan terhadap sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Tanah Laut

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan
2. Adanya wabah covid-19 yang membatasi ruang gerak pembinaan sekolah adiwiyata

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi SDM yang ada

Rencana Aksi :

- Mengajukan permohonan penambahan SDM untuk petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan

3. Kinerja Utama Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah dengan indikator Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah dengan target 5 Bank Sampah terealisasi 5 Bank Sampah dengan capaian kinerja 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembentukan Bank Sampah Tunas Muda Panyipatan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 85/DPRKPLH/IX/2020 tanggal 24 September 2020
- b. Pembentukan Bank Sampah Bajuin Ceria Desa Bajuin Kec. Bajuin berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 71/DPRKPLH/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020
- c. Pembentukan Bank Sampah Asri Mulya Desa Asri Mulya Kec. Jorong berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 29/DPRKPLH/I/2020 tanggal 2 Maret 2020
- d. Pembentukan Bank Sampah Stasiun Bank Angsau Oke UPTD Puskesmas Angsau

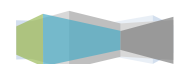


- Kec. Pelaihari berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 29/DPRKPLH/I/2020 tanggal 22 Januari 2020
- e. Pembentukan Bank Sampah Sejahtera Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 28/DPRKPLH/I/2020 tanggal 17 Januari 2020

Sampah adalah permasalahan bersama yang menjadi tanggungjawab bersama dalam mengatasinya. Didalam kewajiban lingkungan terdapat tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Sebagai wadah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan diperlukan wadah kelembagaan masyarakat berupa Bank Sampah. Bank Sampah merupakan wadah bersama agar masyarakat dapat berpartisipasi terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Semakin banyak bank sampah yang aktif memberikan indikator keterlibatan masyarakat dalam mengolah sampah. Semakin banyak sampah yang terkelola semakin kecil dampak sampah yang ditimbulkan. Selain manfaat peningkatan kebersihan secara lingkungan, pemanfaatan sampah tidak saja menanamkan kepedulian tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi dari olah sampah menjadi manfaat (nilai sampah daur ulang dan pemanfaatan kompos).

Kendala dalam pengembangan Bank Sampah adalah

1. kurangnya petugas dalam mengedukasi secara intensif (petugas khusus pendampingan) terhadap masyarakat.
2. Terbentuknya Bank Sampah diperlukan pendampingan lanjutan dalam pengelolaan kelembagaan maupun teknis pemanfaatan sampah tersebut.
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap pengelolaan Bank Sampah juga tidak terlepas dari terpuruknya permintaan industri daur ulang sampah akibat dampak pandemi covid 19.
4. Lemahnya permintaan pasar atau nilai tukar sampah 3R (Reeise ,Reduse, Reeyek) menyebabkan tidak terbelinya bahan baku sampah sehingga menjadi menumpuk dan tak bernilai ekonomi.
5. Kondisi ini menyebabkan kelesuan kegiatan pengumpulan sampah dan kurangnya minat pengembangan sampah lewat kegiatan Bank Sampah di Tanah Laut. Untuk pengembangan Bank Sampah perlu diambil Langkah langkah perbaikan rantai



distribusi sampah dan peningkatan SDM pembina Bank Sampah.

Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp 104.150.000 dengan realisasi sebesar Rp 97.794.850 atau capaian sebesar 93,90%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran

3.c. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid P3LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 9	Indikator 13 Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,25%	86,25%	106,15%
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indikator 14 Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	91,75%	95%	103,54%
		Indikator 15 Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%



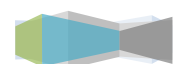
**Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 2020 dengan
Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	80,84%	80,71%	84,49%	81,25%	91,40%	112,49 %
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	95%	96,45%	95,84%	91,75%	95%	103,54 %
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.c.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 9

Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan indikator :

1. Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu dengan target 81,25% terealisasi 91,40% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 112,49 %. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu dilaksanakan oleh Kasi Pemantauan Lingkungan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.



No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indikator 13 Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,25%	86,25%	106,15 %

Pada tahun 2020 dilaksanakan pengujian kualitas air dan udara ambient sebanyak 284 parameter. Dari hasil pengujian laboratorium terdapat 245 parameter yang memenuhi baku mutu. Sehingga persentase parameter air dan udara ambient adalah $(245/284) \times 100 \% = 86,25 \%$

Kasi Pemantauan Lingkungan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 9 dengan indikator Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P3LH DPRKPLH nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Pemantauan Lingkungan , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pemantauan Lingkungan didukung 1 orang PNS



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pemantauan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan aksi bersih sungai	Indikator Jumlah aksi bersih sungai	–	–	–
2.	Sasaran Melaksanakan pengujian kualitas air	Indikator Jumlah uji kualitas air	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
3.	Sasaran Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Indikator Jumlah uji kualitas udara ambient	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
4.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	100%
Rata-Rata Capaian					75%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pemantauan Lingkungan 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah aksi bersih sungai	1 sungai	2 sungai	2 sungai	–	–	–
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air	1 dokumen uji	2 dokumen uji	2 dokumen uji	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient	1 dokumen uji	1 dokumen uji	2 dokumen uji	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	100%



Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Pemantauan Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah sungai yang dibersihkan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp 138.899.825	Rp -	Rp 1.600.200	Rp 8.331.000	Rp 128.249.000	99,48
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air							
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient							
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pemantauan Lingkungan yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi PemantauanLingkungan tahun 2020 yaitu :

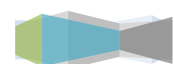
1. Kinerja Utama Melaksanakan pengujian kualitas air dengan indikator Jumlah uji kualitas air dengan target 1 Dokumen Uji terealisasi 1 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%
 1. Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah DO, BOD, Fe, TSS, Total Posfat dan Total Coliform
 2. Dari hasil analisa kualitas parameter air pada air laut berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui parameter TSS dan orthofosfat yang tidak memenuhi baku mutu
 3. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.68 – 2.41 dimana terdapat 3 (tiga) dengan status memenuhi dan 9 (enam) titik pantau dengan status cemar ringan.



4. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas I pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.82 – 1.43 dimana terdapat 2 (dua) dengan status memenuhi dan 10 (sepuluh) titik pantau dengan status cemar ringan.
 5. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.51 – 1.16 dimana terdapat 10 (sepuluh) dengan status memenuhi dan 2 (dua) titik pantau dengan status cemar ringan.
 6. Dari hasil perhitungan Sistem Kualifikasi IKA – INA (SISKANA) untuk 10 (sepuluh) parameter yang terdiri parameter BOD, COD, Fecal Coliform, DO Total Fosfat, TSS, TDS, NH₃, NO₃ dan pH dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai SISKANA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebesar 88.79 dengan kelas kategori baik
 7. Dari hasil analisa daya tampung beban pencemar pada DAS Asam – asam, DAS Kintap, DAS Maluka dan DAS Tabanio diketahui bahwa parameter yang melebihi daya tampung beban pencemar adalah BOD dan Fe (Besi) Terlarut
2. Kinerja Utama Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient dengan indikator Jumlah uji kualitas udara ambient dengan target 1 Dokumen Uji terealisasi 1 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan perhitungan kualitas udara ambien dan kebisingan di 7 Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas udara ambien di Kabupaten Tanah Laut masih memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan.
2. Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar berkategori baik, hanya satu titik berkategori sedang dan satu titik lainnya berkategori tidak sehat.



3. Tingkat kebisingan pada kedelapan titik pengambilan sampel terdapat 4 (empat) titik yang melebihi baku mutu tingkat kebisingan yaitu Perumahan Bajuin Raya, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Simpang 3 Angsau dan simpang 4 Asam-asam;

3. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan dengan indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi dengan target 11 Kecamatan 26 Skpd terealisasi 11 Kecamatan 26 Skpd dengan capaian kinerja 100%, sosialisasi berupa surat Edaran Bupati Tanah Laut terkait kualitas lingkungan yang di kirimkan ke SKPD dan 11 Kecamatan di wilayah Tanah Laut :

1. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 660/1098-P3LH/XII/DPRKPLH tanggal Desember 2020 perihal upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Tanah Laut
2. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 660/471-P3LH/VI/DPRKPLH tanggal Juni 2020 perihal Menjaga dan Mengelola Kualitas Air

Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Pemantauan Lingkungan dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungandengan pagu anggaran sebesar Rp 138.899.825 dengan realisasi sebesar Rp 138.180.200 atau capaian sebesar 99,84%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efesiensi anggaran

4. Indikator Kinerja Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu dengan target 91,75% terealisasi 95% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 103,54%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mut Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu u dilaksanakan oleh Kasi Pencemaran Lingkungan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini



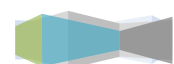
No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indikator 14 Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	91,75%	95%	103,54%

Pada tahun 2020 dilaksanakan pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas industri dan pengujian kadar polusi limbah cair sebanyak 39 parameter. Dari hasil pengujian laboratorium terdapat 37 parameter yang sesuai dengan baku mutu. Sehingga persentase parameter limbah cair dan emisi/polusi udara akibat aktivitas industri adalah $(37/39) \times 100\% = 95\%$

Kasi Pencemaran Lingkungan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 9 dengan indikator Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P3LH DPRKPLH nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Pencemaran Lingkungan , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pencemaran Lingkungan didukung 1 orang PNS

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pencemaran Lingkungan



No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Indikator Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
2.	Sasaran Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Indikator Jumlah uji kadar polusi limbah cair	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
3.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Indikator Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pencemaran Lingkungan 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
2	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	1 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
3	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Pencemaran Lingkungan

Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	Pengendalian Pencemaran Lingkungan		Rp -	Rp5.699.200	Rp9.000.000	Rp112.119.000	96,86



Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Jumlah uji kadar polusi limbah cair							
Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pencemaran Lingkungan yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pencemaran Lingkungan tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri dengan indikator Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri dengan target 1 Dokumen Uji terealisasi 1 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%

METODE PENGAMBILAN SAMPEL

Pengambilan sampel dan pengujian sampel emisi dari mesin tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan gas detektor. Teknik pengambilan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu menghidupkan alat gas analyzer, menunggu hingga kondisi alat siap untuk digunakan, memasang probe uji dari alat kedalam lubang (*hole*) sampling, alat melakukan perisapan pengujian dan perekaman hasil pengujian, mencetak data hasil pengujian. Data hasil pengujian dari alat gas analyzer selanjutnya di lakukan perhitungan untuk mengetahui kadar gas masing-masing yaitu gas dalam udara, partikulat, laju alir dan Opasitas dari sampel.

METODE ANALISIS DATA

Metode analisa data terhadap hasil pengujian sampel emisi mesin tidak bergerak adalah dengan melakukan perhitungan beban emisi tahunan. Perhitungan beban emisi dari hasil pengukuran emisi sebagai berikut:

$$E = C \times Q \times 0,0036 \times (\text{Op Hours})$$

$$Q = V \times A$$

Dimana:



E	= Laju emisi pencemar (kg/hari) atau (kg/tahun)
C	= Konsentrasi terkoreksi (mg/Nm ³)
Q	= Laju alir emisi (gas buang) volumetric (m ³ /detik)
0,0036	= Faktor Konversi dari mg/detik ke kg/jam
Op Hours	= Jam operasi (jam)
V	= Laju alir (m/detik)
A	= Luas penampang cerobong (m ²)

LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL

Pengujian Emisi mesin tidak bergerak di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dilakukan pada pelaku usaha/ industri sebagai berikut:

1. PT Citra Putra Kebun Asri di Kecamatan Jorong
2. PT Kintap Jaya Wattindo di Kecamatan Kintap
3. PT Surya Sakti Darma Kencana di Kecamatan Kintap
4. PT Mandiri Citra Bersama di Kecamatan Kintap
5. PT Polakahuripan Inti Sawit di Kecamatan Kintap

Hasil pengujian dan analisis data terhadap kualitas emisi aktivitas industri yang dilakukan di Kecamatan Kintap dan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Parameter emisi utama yang diuji adalah nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian emisi pada sumber emisi tidak bergerak berupa boiler telah dilakukan pada aktivitas industri PT Citra Putra Kebun Asri.
 - a) Hasil pengujian emisi aktivitas industri PT Citra Putra Kebun Asri untuk kadar emisi NO₂ sebesar 9,8 mg/m³ dan untuk kadar emisi SO₂ sebesar 7,8 mg/m³, telah memenuhi baku mutu emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2008 Lampiran I.15 baku mutu emisi untuk ketel uap yang menggunakan bahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang.
 - b) Beban emisi aktivitas industri PT Citra Putra Kebun Asri untuk beban emisi NO₂ sebesar 5.859 kg/tahun dan untuk beban emisi SO₂ sebesar 7.361 kg/tahun.



2. Pengujian emisi pada sumber emisi tidak bergerak berupa genset telah dilakukan pada aktivitas industri PT Arutmin Kintap dan PT Mandiri Citra Bersama.
 - a) Hasil pengujian emisi aktivitas industri PT Arutmin Kintap dan PT Mandiri Citra Bersama telah memenuhi baku mutu emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2008 Lampiran I.22 baku mutu emisi untuk industri jenis kegiatan lain dan baku mutu emisi sesuai Permen LHK Nomor P.15/MENLHK/SETIEN/KUM.1/4/2019 Lampiran IX A untuk pengoperasian mesin dengan pembakaran dalam atau genset dengan kapasitas ≤ 570 kW.
 - b) Kadar emisi NO_2 yang dihasilkan PT Arutmin Kintap sebesar 122 mg/m^3 dan PT Mandiri Citra Bersama sebesar $3,6 \text{ mg/m}^3$. Sedangkan beban emisi O_2 yang dihasilkan PT Arutmin Kintap 272 kg/tahun dan PT Mandiri Citra Bersama sebesar 6 kg/tahun .
 - c) Kadar emisi SO_2 yang dihasilkan PT Arutmin Kintap sebesar $7,8 \text{ mg/m}^3$ dan PT Mandiri Citra Bersama sebesar $7,8 \text{ mg/m}^3$. Sedangkan beban emisi SO_2 yang dihasilkan PT Arutmin Kintap 17 kg/tahun dan PT Mandiri Citra Bersama sebesar 14 kg/tahun .

Saran himbauan yang dapat diberikan pada pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pada pelaku aktivitas industri sebagai berikut:
 - a) Meniadakan sumber-sumber pencemar, kalau memungkinkan dalam operasionalnya digunakan metode-metode atau sistem yang tidak menimbulkan pencemaran, misalnya menghilangkan pencemaran akibat penggunaan bahan bakar fosil dengan cara mengganti bahan bakar yang ramah lingkungan.
 - b) Mengganti sistem operasi atau bahan baku dengan yang potensi polutannya lebih rendah, misalnya dengan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan sistem bakar yang lebih baik.
 - c) Menggunakan alat pengolah atau pengendali pencemaran, maka pelepasan emisi pencemar (polutan) minimal dapat memenuhi regulasi atau baku mutu.
 - d) Menanam berbagai jenis tanaman terutama yang menyerap emisi karbondioksida seperti pohon trembesi.
 - e) Memperhatikan tentang area atau lokasi pengambilan sampel terutama untuk tingkat keselamatan kerja pada area/lokasi pengambilan contoh uji emisi cerobong meliputi tangga, hole sampling dan lantai kerja.



2. Rencana Aksi

- a) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan pengujian kadar emisi secara periodik/berkala untuk mengetahui hasil pengujian emisi tersebut dan membandingkannya terhadap baku mutu perundang-undangan.
- b) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menggandeng laboratorium yang kredibel dalam pengujian kadar emisi dengan mencakup parameter-parameter yang disyaratkan perundang-undangan tidak kurang dari tahun sebelumnya dan dapat ditambah sesuai situasi kondisi.

2. Kinerja Utama Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair dengan indicator Jumlah uji kadar polusi limbah cair dengan target 1 Dokumen Uji terealisasi 1 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%, dengan rincian hasil sebagai berikut :

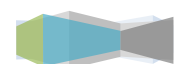
1. Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran inlet pada unit pengeloaan air limbah pada Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia Site Asam - asam, karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran inlet unit pengelolaan menunjukan dominasi karateristik air limbah adalah sebagai berikut :

Sifat air sangat asam dan melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan logam yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

2. Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran inlet pada unit pengeloaan air limbah pada Kegiatan Terminal Khusus Batubara PT. Mandiri Citra Bersama, karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada



lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran inlet unit pengelolaan menunjukkan dominasi karakteristik air limbah adalah sebagai berikut

Sifat pH air normal dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan logam yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

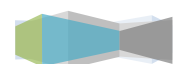
3. Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran inlet pada unit pengelolaan air limbah pada kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran inlet unit pengelolaan menunjukkan karakteristik air limbah adalah sebagai berikut :

Sifat air berada pada range pH normal dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Cl₂ (Free Chlorida) rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Zn (Seng) rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan PO₄ (Fosfat) rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)



4. Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran outlet pada unit pengelolaan air limbah pada Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia Site Asam - asam, karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran inlet unit pengelolaan menunjukkan dominasi karakteristik air limbah adalah sebagai berikut :

Sifat air basa dan melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan logam yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

5. Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran outlet pada unit pengelolaan air limbah pada Kegiatan Terminal Khusus Batubara PT. Mandiri Citra Bersama, karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran inlet unit pengelolaan menunjukkan dominasi karakteristik air limbah adalah sebagai berikut :

Sifat pH air normal dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan logam yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)



6. Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran outlet pada unit pengelolaan air limbah pada kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran outlet unit pengelolaan menunjukkan dominasi karakteristik air limbah adalah sebagai berikut

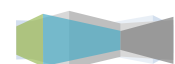
Sifat air berada pada range pH normal dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Cl_2 (Free Chlorida) rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan Zn (Seng) rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

Memiliki kandungan PO_4 (Fosfat) rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)

7. Dari hasil analisa efisiensi untuk unit pengelolaan air limbah pada Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia diketahui bahwa sistem pengelolaan mengalami suatu kondisi yang menyebabkan peningkatan nilai pH menjadi lebih tinggi yang menyebabkan air bersifat basa dan melebihi baku mutu namun dilain sisi pengelolaan telah efisien menurunkan kadar logam dan menjaga peningkatan kadar TSS yang tidak terlalu besar dan masih baku mutu yang telah ditentukan
8. Dari hasil analisa efisiensi pengelolaan unit pengelolaan air limbah pada Terminal Khusus Batubara PT. Mandiri Citra Bersama diketahui bahwa sistem pengelolaan sudah efisien untuk menjaga pH air dan menurunkan kadar logam walaupun terjadi peningkatan TSS namun hal peningkatan tersebut tidak terlalu besar dan masih baku mutu yang telah ditentukan
9. Dari hasil analisa efisiensi pengelolaan unit pengelolaan air limbah pada kegiatan pertambangan batubara, terminal khusus batubara dan Pembangkit Listrik Tenaga



Uap (PLTU) diketahui bahwa sistem pengelolaan sudah efisien untuk menjaga pH air dan menurunkan kadar Cl_2 , PO_4 walaupun terjadi peningkatan Zn (seng) namun hal peningkatan tersebut tidak terlalu besar dan masih baku mutu yang telah ditentukan

10. Dari hasil perhitungan beban sumber pencemar air tertentu diketahui bahwa walaupun parameter air dari unit pengelolaan sudah memenuhi baku mutu namun setiap unit pengelolaan air limbah tetap memberikan kontribusi aliran air yang mengandung mineral – mineral yang cenderung dapat menyebabkan pencemaran pada perairan
11. Dari hasil perhitungan beban sumber pencemar air tertentu pada Settling Pond Astim – 01 PT. Arutmin Indonesia memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TSS sebesar 37738.30 kg/tahun, kandungan Fe (Besi) sebesar 319.32 kg/tahun, kandungan Mn (Mangan) sebesar 464.47 kg/tahun dan Cd (Kadimum) sebesar 87.09 kg/tahun
12. Dari hasil perhitungan beban sumber pencemar air tertentu pada Settling Pond Pit – 11 memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TSS sebesar 17682.86 kg/tahun, kandungan Fe (Besi) 159.15 kg/tahun, kandungan Mn (Mangan) sebesar 548.17 kg/tahun dan Cd (Kadimum) sebesar 26.52 kg/tahun.
13. Dari hasil perhitungan beban sumber pencemar air tertentu pada Settling Pond Mandiri memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TSS sebesar 865.46 kg/tahun, kandungan Fe (Besi) sebesar 76.45 kg/tahun, kandungan Mn (Mangan) sebesar 64.91 kg/tahun dan Cd (Kadimum) sebesar 5.77 kg/tahun.
14. Dari hasil perhitungan beban sumber pencemar air tertentu pada *Blowdown Cooling Tower* 1 & 2 memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan Cl_2 (Free Chlorida) sebesar 224.08 kg/tahu, Zn (Seng) sebesar 2913 kg/tahun dan kandungan PO_4 (Fosfat) sebesar 1120.40 kg/tahun.

Rencana Aksi

1. Menambahkan parameter – parameter tambahan yang harus dikelola oleh pelaku usaha terkait parameter IKA yang memiliki berkorelasi dengan dampak kegiatan pelaku usaha
2. Melakukan inventarisasi aliran dari sumber pencemar hingga ke perairan



3. Membuat batasan besaran sumber pencemar dari pelaku usaha berdasarkan daya tampung beban pencemar sungai
4. Melakukan kajian lebih lanjut terkait dampak pada sungai akibat beban sumber pencemar air tertentu dari pelaku usaha

Bagi Pelaku Usaha agar :

1. Melakukan metode pengelolaan berdasarkan karakteristik air limbah
2. Menjaga kualitas hasil pengelolaan air limbah untuk selalu memenuhi baku mutu
3. Mengoptimalkan pengelolaan untuk menurunkan beban pencemar sumber air tertentu dari setiap unit pengelolaan
4. Melakukan pengelolaan lanjutan terkait dampak pada sungai akibat beban sumber pencemar air tertentu dari pelaku usaha
5. Membuat unit pengelolaan dengan paling sedikit memiliki tiga fungsi utama yaitu kolam pengendapan, kolam chemical dan kolam kontrol
6. Membuat unit pengelolaan pada lokasi yang tidak memiliki material *Non Acid Formed*
7. Membuat dimensi unit pengelolaan dengan menyesuaikan luas catchment area dan beban pengelolaan
8. Melakukan pengerukan kolam settling pond secara berkala untuk membersihkan lapisan lumpur dan koagulan yang tersedimentasi
9. Menerapkan metode *Jar Test* untuk menentukan dosis bahan kimia yang digunakan

3. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan dengan indicator Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi dengan target 25 Pelaku Usaha terealisasi 25 Pelaku Usaha dengan capaian kinerja 100% dengan mensosialisasikan Himbauan Bupati Tanah Laut Nomor 660/180-P3Lh/DPRKPLH/III/2021 tanggal Maret 2020 perihal antisipasi dalam menghadapi musim kemarau

Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada **Kasi Pencemaran Lingkungan** dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar



Rp130.932.800 dengan realisasi sebesar Rp 126.818.200 atau capaian sebesar 96,86%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran

4. Indikator Kinerja Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis dengan target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis dilaksanakan oleh Kasi Kerusakan Lingkungan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Sasaran 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indikator 15 Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%

Kasi Kerusakan Lingkungan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P3LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 9 dengan indikator Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P3LH DPRKPLH nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Kerusakan Lingkungan , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Kerusakan didukung 1 orang PNS

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Kerusakan Lingkungan



No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Indikator Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	100%
3.	Sasaran Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Indikator Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik	20 Titik	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Kerusakan Lingkungan 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah kecamatan / skpd yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	100%
3	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik	20 Titik	20 Titik	20 Titik	20 Titik	100%





Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Kerusakan Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Rp 61.107.750	Rp -	Rp4.167.500	Rp46.490.000	Rp8.670.000	97,09
2	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi							
3	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji							



Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Kerusakan Lingkungan yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Kerusakan Lingkungan 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa dengan indikator Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan status kerusakan tanah merupakan wilayah lahan basah.
 2. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut adalah Rusak Ringan (*R.I*).
 3. Faktor pembatas utama pada lahan basah memiliki faktor penghambat redoks untuk tanah berpirit (*Rp*) sedangkan pada lahan kering berupa derajat pelurusan air (*p*).
 4. Rekomendasi untuk mencegah kerusakan tanah antara lain mempertahankan luasan areal pertanian yang telah ada sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut dengan tetap mempertahankan sumberdaya lahan basah dan penerapan konservasi tanah dan air dalam budidaya tanaman pertanian pada lahan kering.
2. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan dengan indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi dengan target 26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi terealisasi 26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi dengan capaian kinerja 100%, sosialisasi berupa surat edaran Bupati Tanah Laut tentang pencegahan kerusakan lingkungan
 3. Kinerja Utama Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan dengan indikator Jumlah Sampel Yang di Uji dengan target 20 Titik terealisasi 20 Titik dengan capaian kinerja 100%

Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi **Kasi Kerusakan Lingkungan** dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan



Hidup dengan kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp 61.107.750 dengan realisasi sebesar Rp 59.327.500 atau capaian sebesar 97,09%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran

3.d. Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 10 Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Indikator 16 Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%
2.	Sasaran 11 Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Indikator 17 Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	129% (9 KP)	129,00%
3.	Sasaran 12 Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Indikator 18 Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	0	-	-



**Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	-	63,6% (318 Unit)	124,2% (621 Unit)	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%
2	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	42,85% (3 KP)	200% (14 KP)	100% (7 KP)	129% (9 KP)	129%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-	-	-	0	-	-

3.d.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 10

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 10 Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Indikator 16 Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%

Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatkan rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan indikator sasaran Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR))capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% (500 Unit) namun hanya terealisasi sebesar 43,60% (218 Unit)

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang



layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Target SK (Unit)	Realisasi (Unit)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Dana	Dana
1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Kel. Sarang Halang	15	15	2020	DAK	262.500.000
		Kel. Angsau	50	49			857.500.000
		Desa Panjaratan	53	53			927.500.000
		Kel. Pabahanan	19	19			332.500.000



		TOTAL	137	136			
2	BANTUAN SOSIAL BEDAH RUMAH	Kel. Pelaihari	23	18	2020	APBD KABUPATEN	270.000.000
		Desa Panggung	1	1			15.000.000
		Desa Kunyit	6	5			75.000.000
		Desa Kintap	21	17			255.000.000
		Desa Asam-Asam	24	19			285.000.000
		Desa Swarangan	15	14			210.000.000
		Desa Batu Tungku	3	3			45.000.000
		Desa Ranggung	7	5			75.000.000
		TOTAL	100	82			
		TOTAL KESELURUHAN	237	218			

3.d.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 11

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Sasaran 11 Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Indikator 17 Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	129% (9 KP)	129,00%

Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatkan kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator sasaran Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 129% (9 Komplek Perumahan/Permukiman)



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Volume (m2)	Tahun Pelaksanaan
1	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengaspalan Jalan Lingkungan Depan Masjid Al Fatah	980	2020
2		Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Berkat Tembus Pusara	640	
3		Pembangunan Drainase Gang Ikhsan RT.3 RW.1 Desa Atu-atu	120	
4		Pengaspalan Jalan Lingkungan Jalan Syarif Husin RT.16	405	
5		Peningkatan Jalan Lingkungan Permata Jingga 3 Kelurahan Karang Taruna	972	
6		Pekerasan Jalan Lingkungan Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Angsau	1336	
7		Peningkatan Jalan Lingkungan Al-Fath Kelurahan Karang Taruna	903	
8		Peningkatan Jalan Lingkungan Bumi Pelaihari Permai RT.12 Kelurahan Karang Taruna	917	
9		Pengaspalan Jalan Lingkungan Gang H.Achmad Arfan dan Anshor RT.5	700	

3.d.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 12

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.	Sasaran 12 Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Indikator 18 Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	0	-	-

Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dengan indikator sasaran Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tidak dilaksanakan hal ini dikarenakan kegiatan ini masih dalam proses verifikasi oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan perihal Usulan Bantuan Rumah Khusus (Rusus) bagi Korban Bencana Abrasi di Desa Muara Kintap

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10,11,12 Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Data dan



Perencanaan Perkim dan Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kasi Data dan Perencanaan Perkim

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 10,11,12 dilaksanakan melalui Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman idup dengan kegiatan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPLH nomor 10,11,12 didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Data dan Perencanaan Perkim, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Data dan Perencanaan Perkim didukung 1 orang PNS dan 1 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Data dan Perencanaan Perkim

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Indikator Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 Unit	333 Unit	66,6%
3.	Sasaran Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Indikator Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	3.753 Unit	751%
4.	Sasaran Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen RTLH	Indikator Jumlah dokumen RTLH	—	—	—
5.	Sasaran Melakukan fasilitasi luas lahan / pembebasan lahan untuk rumah khusus nelayan	Indikator Jumlah luas lahan yang dibebaskan	—	—	—



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Data dan Perencanaan Perkim 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	-	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	318 Unit	621 Unit	218 Unit	500 Unit	333 Unit	66,6%
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni	-	1.921 Unit	4.754 Unit	500 Unit	4.616 Unit	751%
4	Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen RTLH	Jumlah dokumen RTLH	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
5	Melakukan fasilitasi luas lahan / pembebasan lahan untuk rumah khusus nelayan	Jumlah luas lahan yang dibebaskan	-	-	2 Ha	-	-	-

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Data dan Perencanaan Perkim

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 938.000.000	Rp -	Rp 128.787.200	Rp 3.677.800	Rp 500.026.200	67,43



2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/ sosialisasi							
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni							
4	Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen RTLH	Jumlah dokumen RTLH							
5	Melakukan fasilitasi luas lahan / pembebasan lahan untuk rumah khusus nelayan	Jumlah luas lahan yang dibebaskan							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Data dan Perencanaan Perkim yang telah dilaksanakan

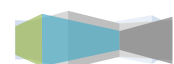
Perjanjian Kinerja Kasi Data dan Perencanaan tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100% Untuk tahun 2020 dokumen yang diterbitkan yaitu RP3KP yang mencakup keseluruhan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni dengan indikator Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi dengan target 500 KK terealisasi 333 KK dengan capaian kinerja 66,6%

)



NO	KECAMATAN	KEL / DESA	PESERTA SOSIALISAI (KK)
1	PELAIHARI	AMBUNGAN	12
		BUMI JAYA	10
		ATU-ATU	3
		SARANG HALANG	1
		PELAIHARI	7
		ANGSAU	1
		KARANG TARUNA	1
		UJUNG BATU	8
TOTAL			43
2	BAJUIN	KETAPANG	2
		BAJUIN	1
		KUNYIT	9
		PEMALONGAN	1
		TIRTA JAYA	3
TOTAL			16
3	BATU AMPAR	GUNUNG MAS	5
		GUNUNG MELATI	8
TOTAL			13
4	KURAU	KURAU	33
		SARIKANDI	8
TOTAL			41
5	BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG ATAS	8
		HANDIL BABIRIK	11
		HANDIL MALUKA	2
TOTAL			21
6	BATI-BATI	BENUA RAYA	11
		KAIT-KAIT	2
TOTAL			13
7	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	1
		MARTADAH BARU	10
TOTAL			11
8	PANYIPATAN	KANDANGAN LAMA	8
		KURINGKIT	4
TOTAL			12
9	JORONG	SWARANGAN	6
		ALUR	8
TOTAL			14
10	KINTAP	PASIR PUTIH	6
TOTAL			6
11	TAKISUNG	TAKISUNG	1
		RANGGANG	1
		TELAGA LANGSAT	8
TOTAL			10
TOTAL KESELURUHAN			200



NO	KECAMATAN	KEL / DESA	PESERTA SOSIALISAI (KK)
1	PELAIHARI	ATU-ATU	15
		ANGSAU	19
		PELAIHARI	15
		KARANG TARUNA	18
		TUNGKARAN	18
		PANGGUNG	18
		AMBUNGAN	15
		UJUNG BATU	15
TOTAL			133

3. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Jumlah data rumah tidak layak huni dengan target 500 unit terealisasi 4.616 Unit dengan capaian kinerja 751%%

PENDATAAN RTLH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		JUMLAH RUMAH	
				KESELURUHAN	RTLH
1	BAJUIN	1	Bajuin		78
		2	Galam		26
		3	Ketapang		18
		4	Kunyt		12
		5	Pemalongan		42
		6	Sungai bakar		108
		7	Tanjung		33
		8	Tebing Siring		12
		9	Tirta jaya		28
			Total		357
2	BATI-BATI	1	Benua Raya		41
		2	Banyu Irang		53
		3	Bati-bati		48
		4	Bentok Darat		18
		5	Bentok Kampung		16
		6	Kait-Kait		94
		7	Kait-Kait Baru		36
		8	Liang Anggang		12
		9	Nusa Indah		17
		10	Padang		65
		11	Pandahan		28
		12	Sambangan		42
		13	Ujung		40
		14	Ujung Baru		12
			Total		522
3	BATU AMPAR	1	Batu Ampar		80
		2	Ambawang		4



		3	Bluru	5
		4	Damar Lima	8
		5	Damit	7
		6	Damit Hulu	9
		7	Durian Bungkok	37
		8	Gunung Mas	15
		9	Gunung Melati	24
		10	Jilatan	36
		11	Jilatan Alur	40
		12	Pantai Linuh	12
		13	Tajau Mulya	26
		14	Tajau Pecah	0
			Total	303
4	BUMI MAKMUR	1	Bumi Harapan	9
		2	Handil Babirik	
		3	Handil Birayang Atas	5
		4	Handil Birang Bawah	10
		5	Handil Gayam	24
		6	Handil Labuan (Amas)	43
		7	Handil Maluka	13
		8	Handil Suruk	13
		9	Kurau Utara	51
		10	Pantai Harapan	40
		11	Sungai Rasau	51
			Total	259
5	JORONG	1	Jorong	4
		2	Alur	46
		3	Asam-Asam	50
		4	Asam Jaya	16
		5	Asri Mulya	17
		6	Batalang	31
		7	Karang Rejo	5
		8	Muara Asam-Asam	13
		9	Sabuhur	32
		10	Simpang Empat (sungaibaru)	4
		11	Swarangan	15
			Total	233
6	KINTAP	1	Kintap	30
		2	Bukit Mulya	6
		3	Kebun Raya	5
		4	Kintap Kecil	13
		5	Kintap Pura	20
		6	Mekar Sari	23
		7	Muara Kintap	5
		8	Pandan Sari	9
		9	Pasir Putih	13
		10	Riam Adungan	13
		11	Salaman	29
		12	Sebamban Baru	18
		13	Sungai Cuka	
		14	Sumber Jaya	10
			Total	194



7	KURAU	1	Kurau	54
		2	Bawah Layung	41
		3	Handil Negara	20
		4	Kali Besar	30
		5	Maluka Baulin	41
		6	Padang Luas	32
		7	Raden	33
		8	Sarikandi	38
		9	Sungai Bakau	40
		10	Tambak Karya	31
		11	Tambak Sarinah	31
			Total	391
8	PANYIPATAN	1	Panyipatan	147
		2	Batakan	286
		3	Batu Mulya	52
		4	Batu Tungku	75
		5	Bumi Asih	32
		6	Kandangan Baru	109
		7	Kandangan Lama	101
		8	Kuringkit	56
		9	Suka Ramah	86
		10	Tanjung Dewa	48
			Total	992
9	PELAIHARI	1	Pelaihari	53
		2	Karang Taruna	48
		3	Angsau	32
		4	Pabahanan	18
		5	Sarang Halang	21
		6	Ambungan	67
		7	Atu-Atu	31
		8	Bumi Jaya	20
		9	Guntung Besar	15
		10	Kampung Baru	25
		11	Panggung	33
		12	Panggung Baru	15
		13	Panjaratan	15
		14	Pemuda	16
		15	Sungai Riam	25
		16	Sumber Mulia	66
		17	Tampang	20
		18	Telaga	15
		19	Tungkaran	69
		20	Ujung Batu	25
			Total	629
10	TAKISUNG	1	Takisung	36
		2	Benua Lawas	44
		3	Benua Tengah	62
		4	Batilai	17
		5	Gunung Makmur	35
		6	Kuala Tambangan	30
		7	Pagatan Besar	74
		8	Ranggang	25
		9	Ranggang Dalam	22



		10	Sumber Makmur	24
		11	Tabanio	27
		12	Telaga Langsung	23
			Total	419
11	TAMBANG ULANG	1	Tambang Ulang	41
		2	Bingkulu	32
		3	Gunung Raja	15
		4	Kayu Abang	36
		5	Martadah	13
		6	Martadah Baru	22
		7	Pulau Sari	19
		8	Sungai Jelai	56
		9	Sungai Pinang	83
			Total	317
	TOTAL	135	TOTALA KESELURUHAN	4616

4. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen RTLH dengan indikator Jumlah dokumen RTLH tidak dilaksanakan di tahun 2020 karena sudah dicakupkan ke Review Dokumen RP3KP
5. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi luas lahan / pembebasan lahan untuk rumah khusus nelayan dengan indikator Jumlah luas lahan yang dibebaskan tidak dilaksanakan di tahun 2020 karena telah di realisasikan di tahun sebelumnya.



Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 10,11,12 dilaksanakan melalui Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan kegiatan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPLH nomor 10,11,12 didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim didukung 1 orang PNS dan 3 orang PTT , dan 8 tenaga fasilitator lapangan dari dana APBD dan 4 orang dari dana DAK

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pemanfaatan Perkim

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Indikator Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	218 KK	43,60%
2.	Sasaran Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Indikator Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	9 KP	129%
3.	Sasaran Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Indikator Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	9 Komplek Perumahan	128,57%
4.	Sasaran Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Indikator Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Sasaran Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Indikator Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	171,43%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pemanfaatan Perkim 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	-	318 KK	621 KK	500 KK	218 KK	43,60%
2	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	3 KP	14 KP	7 KP	9 KP	129%
3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	3 Komplek Perumahan	11 Komplek Perumahan	7 Komplek Perumahan	9 Komplek Perumahan	128,57%
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan dilaksanakan	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RT/RW	10 Rekomendasi izin mendirikan rumah	5 Rekomendasi izin mendirikan rumah	9 Rekomendasi izin mendirikan rumah	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	12 Rekomendasi izin mendirikan rumah	171,43%



Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Pemanfaatan Perkim

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp4.899.999.589	Rp-	Rp171.023.400	Rp85.840.300	Rp1.426.495.700	34,35
2	Melaksanakan kinerja kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman berprasarana dasar melalui penyediaan / pembuatan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	Peningkatan Rumah Sederhana (DAK PENUNJANG)	Rp126.195.350	Rp-	Rp16.044.200	Rp54.375.250	Rp55.755.600	99,98
3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp4.899.999.589	Rp-	Rp171.023.400	Rp85.840.300	Rp1.426.495.700	3435%
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Jumlah rumah yang telah di validasi dan verifikasi							
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW							



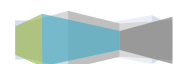
Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pemanfaatan Perkim yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pemanfaatan Perkim 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah dengan indikator Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah dengan target 500 KK terealisasi 218 KK dengan capaian kinerja 43,60%, tidak tercapainya jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah dikarenakan tidak disetujui nya usulan Bedah Rumah Tahun 2020 dana dari Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan, dikarenakan anggaran pusat dialihkan untuk Covid 19

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Target SK (Unit)	Realisasi (Unit)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Dana	Dana
1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Kel. Sarang Halang	15	15	2020	DAK	262.500.000
		Kel. Angsau	50	49			857.500.000
		Desa Panjaratan	53	53			927.500.000
		Kel. Pabahanan	19	19			332.500.000
		TOTAL	137	136			
2	BANTUAN SOSIAL BEDAH RUMAH	Kel. Pelaihari	23	18	2020	APBD KABUPATEN	270.000.000
		Desa Panggung	1	1			15.000.000
		Desa Kunyit	6	5			75.000.000
		Desa Kintap	21	17			255.000.000
		Desa Asam-Asam	24	19			285.000.000
		Desa Swarangan	15	14			210.000.000
		Desa Batu Tungku	3	3			45.000.000
		Desa Ranggal	7	5			75.000.000
		TOTAL	100	82			
		TOTAL KESELURUHAN	237	218			

2. Kinerja Utama Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU dengan indikator Jumlah sarana PSU yang dibangun dengan target 7 KP terealisasi 9 KP dengan capaian kinerja 129%, sebagaimana tabel berikut :



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Volume (m2)	Tahun Pelaksanaan
1	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengaspalan Jalan Lingkungan Depan Masjid Al Fatah	980	2020
2		Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Berkat Tembus Pusara	640	
3		Pembangunan Drainase Gang Ikhsan RT.3 RW.1 Desa Atu-atu	120	
4		Pengaspalan Jalan Lingkungan Jalan Syarif Husin RT.16	405	
5		Peningkatan Jalan Lingkungan Permata Jingga 3 Kelurahan Karang Taruna	972	
6		Pekerasan Jalan Lingkungan Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Angsau	1336	
7		Peningkatan Jalan Lingkungan Al-Fath Kelurahan Karang Taruna	903	
8		Peningkatan Jalan Lingkungan Bumi Pelaihari Permai RT.12 Kelurahan Karang Taruna	917	
9		Pengaspalan Jalan Lingkungan Gang H.Achmad Arfan dan Anshor RT.5	700	

3. Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun dengan indikator Jumlah sarana PSU yang dipelihara dengan target 7 KP terealisasi 9 KP dengan capaian kinerja 128,57%

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Volume (m2)	Tahun Pelaksanaan
1	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengaspalan Jalan Lingkungan Depan Masjid Al Fatah	980	2020
2		Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Berkat Tembus Pusara	640	
3		Pembangunan Drainase Gang Ikhsan RT.3 RW.1 Desa Atu-atu	120	
4		Pengaspalan Jalan Lingkungan Jalan Syarif Husin RT.16	405	
5		Peningkatan Jalan Lingkungan Permata Jingga 3 Kelurahan Karang Taruna	972	



6		Pekerasan Jalan Lingkungan Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Angsau	1336
7		Peningkatan Jalan Lingkungan Al-Fath Kelurahan Karang Taruna	903
8		Peningkatan Jalan Lingkungan Bumi Pelaihari Permai RT.12 Kelurahan Karang Taruna	917
9		Pengaspalan Jalan Lingkungan Gang H.Achmad Arfan dan Anshor RT.5	700

4. Kinerja Utama Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan dengan indikator Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%

Rekapitulasi verifikasi dan validasi Rumah (APBD)

NO	KECAMATAN	KEL / DESA	PENERIMA BANTUAN (UNIT)
1	PELAIHARI	AMBUNGAN	12
		BUMI JAYA	10
		ATU-ATU	3
		SARANG HALANG	1
		PELAIHARI	7
		ANGSAU	1
		KARANG TARUNA	1
		UJUNG BATU	8
TOTAL			43
2	BAJUIN	KETAPANG	2
		BAJUIN	1
		KUNYIT	9
		PEMALONGAN	1
		TIRTA JAYA	3
TOTAL			16
3	BATU AMPAR	GUNUNG MAS	5
		GUNUNG MELATI	8
TOTAL			13
4	KURAU	KURAU	33
		SARIKANDI	8
TOTAL			41
5	BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG ATAS	8
		HANDIL BABIRIK	11
		HANDIL MALUKA	2
TOTAL			21
6	BATI-BATI	BENUA RAYA	11
		KAIT-KAIT	2
TOTAL			13
7	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	1
		MARTADAH BARU	10
TOTAL			11
8	PANYIPATAN	KANDANGAN LAMA	8
		KURINGKIT	4



TOTAL			12
9	JORONG	SWARANGAN	6
		ALUR	8
TOTAL			14
10	KINTAP	PASIR PUTIH	6
TOTAL			6
11	TAKISUNG	TAKISUNG	1
		RANGGANG	1
		TELAGA LANGSAT	8
TOTAL			10
TOTAL KESELURUHAN			200

Rekapitulasi verifikasi dan validasi Rumah (DAK)

NO	KECAMATAN	KEL / DESA	PENERIMA BANTUAN (UNIT)
1	PELAIHARI	ATU-ATU	15
		ANGSAU	19
		PELAIHARI	15
		KARANG TARUNA	18
		TUNGKARAN	18
		PANGGUNG	18
		AMBUNGAN	15
		UJUNG BATU	15
TOTAL			133

5. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW dengan indikator Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW dengan target 7 Rekomendasi izin mendirikan rumah terealisasi 12 Rekomendasi izin mendirikan rumah dengan capaian kinerja 171,43%

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI PERUMAHAN	LUAS AREA M2	LUAS FASUM M2
1	ARIQA MEGA TAMA	PT. ARIQA MEGA UTAMA	JL. RAYA LINTAS DESA BANYU IRANG, BATI-BATI	1,7888	
2	SINAR ALAM JORONG PERMAI	PT. SINAR ALAM ANGKASA MANDIRI	A.YANI, JORONG	2,28	
3	PESONA MULTAZAM REGENCE	PT. MULTAZAM BERKAH SEJATI	JL. MATAH KEL. KARANG TARUNA	5.685	2.369
4	GRAHA KARYA BAKUNCI	PT. DHAFKA GRAHAKARYA	JL. RAYA TAKISUNG, KEL. KARANG TARUNA	5.157	2.093
5	SARANG HALANG RESIDENCE	PT. JALANI BERSAMA	JL. AMBAWANG KEL. SARANG HALANG	6.214	2854 (46%)
6	MILLENIAL RECIDENCE PELAIHARI	PT. CIPTA KARYA MILLENIA	JL. BAKTI KARANG TARUNA KEL. KARANG TARUNA KEC. PELAIHARI	9.882	3660 (25%)
7	GLOBAL ANGSAU PERMAI	PT. GLOBAL WIDYA SINERGY	JL.KIHAJAR DEWANTARA, ANGSAU	9,649	2,893



8	WIDYA KARANG TARUNA		JL. PENERANGAN KEL. KARANG TARUNA	4.379	1.416
9	BERLIN INDAH 3	PT. AURA BELIN KALIMANTAN	JL. ALFATAH RT 27 RW 03 KEL. PELAIHARI KEC. PELAIHARI	4.211,3	
10	SINAR ALAM ASAM-ASAM PERMAI	PT. SINAR ALAM ANGKASA MANDIRI	JL. A. YANI KM.124 DS. SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU KEC. JORONG	39,896	12.159,9
11	SHAKELA PERMATA ASRI	PT. SHAKEELA PERMATA	JL. AMBAWANG KEL. SARANG HALANG	33,688	
12	MANGGA PERMAI RESIDENCE 2	PT. BERKAH TANJUNG MANDIRI	JL. MANGGA BESAR RT 09 RW 05	43,655	13,939



3.e. Kabid Tata Kota Dan Kebersihan

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Kota Dan Kebersihan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Tata Kota dan Kebersihan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 13 Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Indikator 19 Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%
2.	Sasaran 14	Indikator 20 Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%
	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Indikator 21 Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90,09%	90,09%
		Indikator 22 Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Tata Kota dan Kebersihan 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	60%	70%	80%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	50% (20 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	50% (21 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	50% (24 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	100%	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	60%	70%	80%	100%	90.09%	90,09%
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	-	90.40	100%	100%	100%	100%

3.e.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 13

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 13	Indikator 19	100%	100%	100%
	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat			

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 13 dengan Indikator Kinerja Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat dilaksanakan Kasi Penerangan Jalan Umum dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :



Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) indicator utama Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100%

Seiring meningkatnya perkembangan pemukiman, semakin meningkat pula keinginan untuk pemasangan penerangan/ lampu jalan umum, sesuai dengan permintaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Salah satu dampak yang ditimbulkan jika tidak terpasangnya penerangan jalan umum adalah meningkatnya terjadinya kecelakaan di jalan dan tindak kriminal. Untuk itu perlu adanya penerangan jalan umum untuk kepentingan masyarakat.

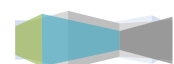
Kegiatan pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum ini memiliki sasaran pada aspek :

- Meningkatkan penerangan jalan umum untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut
- Dengan adanya pemasangan penerangan jalan umum maka perlunya pemeliharaan yang telah terpasang oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih ada beberapa permukiman yang belum mendapatkan jaringan listrik dari PLN dan masih merupakan jaringan swadaya masyarakat setempat, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemasangan jaringan PJU
- 2) Antara pemukiman satu dengan lainnya berjauhan sehingga membutuhkan material dan kebutuhan biaya yang banyak untuk menyambungkan jaringan PJU yang ada.
- 3) Masih terbatasnya anggaran sehingga banyak permintaan pemasangan jaringan PJU dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan dan dipenuhi.
- 4) Masih terbatasnya petugas dan sarana pendukung operasional pemeliharaan dan pemasangan jaringan PJU, mengakibatkan sering terlambatnya perbaikan dan pelayanan bagi masyarakat (jumlah sarana prasana dan petugas operasional tidak sebanding dengan jumlah titik lampu yang dipelihara).
- 5) Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian khusus kelistrikan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala



yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya kerjasama yang baik dengan pihak penyedia jaringan listrik yaitu PLN dalam hal penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat secara merata.
- 2) Perencanaan ulang mengenai pemasangan jaringan PJU, sehingga penyebaran PJU bisa merata dinikmati oleh masyarakat, salah satunya dengan pembagian jaringan dengan meterisasi.
- 3) Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya pemenuhan anggaran untuk pemerataan pemasangan jaringan PJU berdasarkan usulan masyarakat yang masuk.
- 4) Perlunya penambahan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional PJU.

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Penyusunan Database/kajian dalam pemasangan Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak PLN dalam hal pemasangan, pemeliharaan dan pemerataan jaringan listrik bagi masyarakat.
3. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
4. Mengajukan usulan penambahan petugas pemeliharaan perkecamatan dan kota pelaihari, serta penambahan armada operasional

Kasi Penerangan Jalan Umum

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Kota DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 13 Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) dilaksanakan melalui Program Tata Kota dan Kebersihan dengan kegiatan Penerangan Jalan Umum selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH nomor 13 Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Penerangan Jalan Umum dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Penerangan Jalan Umum didukung 32 orang SDM yaitu 2 orang PNS dan 30 orang PTT



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Penerangan Jalan Umum

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Indikator Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	1 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 11 lokasi rencana pemasangan PJU)	1 dokumen perencanaan PJU (2 dokumen perencanaan yang menghasilkan rencana pemasangan PJU di 11 Lokasi)	100%
2.	Sasaran Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Indikator Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	10 dokumen	20 dokumen	200%
3.	Sasaran Melakukan pemeliharaan PJU	Indikator Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	100%
4.	Sasaran Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Indikator Jumlah SarPras PJU yang di penuhi sesuai standar	- 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot	- 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot	100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Penerangan Jalan Umum 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	-	-	8 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 8 lokasi rencana pemasangan PJU)	1 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 lokasi rencana pemasangan PJU)	1 dokumen perencanaan PJU (2 dokumen perencanaan yang menghasilkan rencana pemasangan PJU di 15 Lokasi)	100%
2	Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	1 dokumen	-	16 dokumen	10 dokumen	20 dokumen	200%
3	Melakukan pemeliharaan PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 57 KWH - 1110 Armatur - 7 Sorot	- 74 KWH - 1719 Armatur - 11 Sorot	- 168 KWH - 4700 Armatur - 11 Sorot	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	100%
4	Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Jumlah SarPras PJU yang di penuhi sesuai standar	- 57 KWH - 1110 Armatur - 7 Sorot	- 17 KWH - 609 Armatur - 4 Sorot	- 94 KWH - 2981 Armatur	- 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot	- 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot	100%



Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Penerangan Jalan Umum yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Penerangan Jalan Umum 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum dengan target 1 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 11 lokasi rencana pemasangan PJU) terealisasi 1 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 11 lokasi rencana pemasangan PJU) dengan capaian kinerja 100%, yaitu dokumen perencanaan dan pemasangan jaringan PJU lengkap Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Desa Bajuin Kecamatan Bajuin, Desa Sabuhur Kecamatan Jorong, Desa Kandungan Lama Kecamatan Panyipatan, Desa Tabonio Kecamatan Takisung, Desa Pagatan Besar, Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Pelaihari, Sungai Pinang dan Martadah Baru
2. Kinerja Utama Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu dengan indikator jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi dengan target 10 dokumen terealisasi 20 dokumen dengan capaian kinerja 200%,
3. Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan PJU dengan indikator Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan dengan target 247 KWH , 5485 Armatur. 2046 Caping, 18 Sorot, 62 LED caping dengan capaian kinerja 100%,

KEC	2017				2018				2019				2020				
	KWH	Armatur	Caping	Sorot	KWH	Armatur	Caping	Sorot	KWH	Armatur	Caping	Sorot	KWH	Armatur	Caping	Sorot	LED
Pelaihari	9	174			4	172		3	15	448			12	8	461	3	62
Bajuin									12	328			5	16	90		
Takisung	9	180			3	58		1	13	371			11	69	386	1	
Kintap	9	180							19	468			2		83	1	
Panyipatan	9	192		7									10	75	340		
Kurau	5	100											6		212		
Tambahan Ulang	4	44				11							8	99	162		
Batu Ampar	6	120			10	281			10	390			12	198	215	1	
Bumi Makmur	6	120							8	446			1		16		
Bati-Bati						87			12	380			8	297		1	
Jorong									5	150			4	23	81		
TOT/TAHUN	57	1110	0	7	17	609	0	4	94	2981	0	0	79	785	2046	7	62



4. Kinerja Utama Melaksanakan Melakukan pemenuhan SaPras PJU dengan indikator Jumlah SarPras PJU yang di penuhi sesuai standar dengan target 79 KWH,785 armatur, 2046 caping terealisasi 79 KWH,785 armatur, 2046 caping dengan capaian kinerja 100%,

KEC	2020				
	KWH	Armatur	Caping	Sorot	led
Pelaihari	12	8	461	3	62
Bajuin	5	16	90		
Takisung	11	69	386	1	
Kintap	2		83	1	
Panyipatan	10	75	340		
Kurau	6		212		
Tambang Ulang	8	99	162		
Batu Ampar	12	198	215	1	
Bumi Makmur	1		16		
Bati-Bati	8	297		1	
Jorong	4	23	81		
TOT/TAHUN	79	785	2046	7	62



2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 14

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Sasaran 14	Indikator 20 Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%
	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Indikator 21 Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90,09%	90,09%
		Indikator 22 Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatkan Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator :

1. Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% terealisasi sebesar 55% ,untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Kebersihan dan Limbah dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.
2. Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% terealisasi sebesar 90,09% ,untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Kebersihan dan Limbah dengan pencapaian



sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kasi Kebersihan dan Limbah

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Kota DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar dan Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas dilaksanakan melalui Program Tata Kota dan Kebersihan dengan kegiatan Kebersihan dan Limbah selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Kebersihan dan Limbah dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Kebersihan dan Limbah didukung 159 orang SDM yaitu 11 orang PNS dan 148 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Kebersihan dan Limbah

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	38.281,15	38.293,00	100,03%
2.	Sasaran Melakukan pengolahan sampah di TPA	Indikator Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	114.000 Ton	113.128 Ton	99,2%
3.	Sasaran Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Indikator Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	2 Kali	2 Kali	100%
4.	Sasaran Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat	Indikator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Sasaran Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 kecamatan	1 kecamatan	100%
6.	Sasaran Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	1 Unit (1 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	100%
7.	Sasaran	Indikator			100%



	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	45 buah sarpras (100%)	45 buah sarpras (100%)	
--	---	---	------------------------	------------------------	--



**Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Kebersihan dan Limbah 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun
Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	35.114,00	37.231,83	36.726,76	38.281,15	38.293,00	100,03 %
2	Melakukan pengolahan sampah di TPA	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	76.302 Ton	148.994 Ton	200.267 Ton	114.000 Ton	113.128 Ton	99,2%
3	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	5 Kali	5 Kali	5 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
4	Melaksanakan data pengolahan sampah di masyarakat	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	100%
6	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	12 Unit (12 Armada Roda 3)	4 Unit (2 Armada Roda 3 dan 2 Armada Roda 6)	4 Unit (4 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	100%
7	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	40 buah sarpras (100%)	41 buah sarpras (100%)	44 buah sarpras (100%)	45 buah sarpras (100%)	45 buah sarpras (100%)	100%



Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Kebersihan dan Limbah yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Kebersihan dan Limbah 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 38.281,15 ton terealisasi 38.293,00 dengan capaian kinerja 100,03%,
2. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah di TPA dengan Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA dengan target 38.281,15 Ton terealisasi 38.293,00 dengan capaian kinerja 99,2%,
3. Kinerja Utama Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan indikator Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha dengan target 2 kali terealisasi 2 kali dengan capaian kinerja 100%,
4. Kinerja Utama Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat dengan indicator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah target Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah terealisasi Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah dengan capaian kinerja 100%,
5. Kinerja Utama Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota dengan indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan dengan target 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan dengan capaian kinerja 100%,
6. Kinerja Utama Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 1 Unit (1 Armada Roda 6 terealisasi 1 Unit (1 Armada Roda 6) dengan capaian kinerja 100%,
7. Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 45 buah sarpras

terealisasi	45	buah	sarpras
-------------	----	------	---------

dengan capaian kinerja 100%

Permasalahan

1. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun maka akan terjadi peningkatan jumlah sampah yang dilayani dan dikelola



2. Keterbatasan anggaran sehingga belum sepenuhnya dapat melayani masyarakat di kabupaten tanah laut, secara maksimal
3. Keterbatasan jumlah armada kebersihan (truk angkut sampah, container sampah) dan petugas kebersihan untuk melayani dan mengelola jumlah sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya untuk melayani kebersihan di kota pelaihari dan seluruh kecamatan
4. Keterbatasan TPS (tempat penyimpanan sementara) dan luasan lahan TPA (tempat pengolahan akhir)
5. Belum adanya kenaikan retribusi dari pelayanan kebersihan dan limbah untuk masyarakat yang terlayani, maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal

Upaya yang dilakukan

1. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait permohonan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kebersihan
2. Optimalisasi armada kebersihan dan petugas kebersihan yang ada

Rencana Aksi

1. Mengajukan permohonan penambahan sarana prasarana kebersihan
2. Mengajukan permohonan penambahan petugas kebersihan
3. Menyusun rencana kajian pengelolaan persampahan sekabupaten tanah laut
4. Mengkaji luasan lahan TPA dan pembebasan lahan TPST setiap perkecamatan



3. Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat capaian kinerjanya telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% terealisasi sebesar 100%, untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Pertamanan dan RTH dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.



Kasi Pertamanan dan RTH

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Kota DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat dilaksanakan melalui Program Tata Kota dan Kebersihan dengan kegiatan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Pertamanan dan RTH dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pertamanan dan RTH didukung 37 orang SDM yaitu 10 orang PNS dan 27 orang PTT



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pertamanan dan RTH

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Indikator Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.	Sasaran Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Indikator Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH	72 RTH	100%
3.	Sasaran Melakukan monitoring	Indikator Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pertamanan dan RTH 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	-	3 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH	72 RTH	72 RTH	72 RTH	72 RTH	100%
3	Melakukan monitoring	Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pertamanan dan RTH yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pertamanan dan RTH Kebersihan dan Limbah 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan indikator Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100% ,yaitu
 - a. Dokumen Studi Kelayakan Pintu Gerbang Gunung Kayangan
 - b. Studi Kelayakan Jalur Pejalan Kaki pada Ruas jalan KH Mansyur Pelaihari
 - c. Dokumen Pendataan dan Inventarisasi Taman/RTH Kota Pelaihari
 - d. Dokumen Perencanaan Desain Pintu Gerbang Beserta Aksesori Jalan Menuju Al Manar Pelaihari
2. Kinerja Utama Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman dengan indikator Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara dengan target 72 RTH terealisasi 72 RTH dengan capaian kinerja 100%

Ruang Terbuka Hijau yang Dipelihara

No	Nama RTH	Lokasi
(a)	(b)	(c)
1	RTH Kijang Mas Permai	Jl. Kolonel Soepirman
2	Taman Kota Tanah Laut Membangun	Jl. A. Syairani
3	Pulau Jalan (Tugu PKK)	Jl. A. Yani KM 59
4	Taman Kota Belakang PU	Jl. H. Boejasin
5	RTH Kota Orchid	Jl. H. Boejasin
6	Mina Tirta	Jl. H. Boejasin
7	RTH Masjid Al-Manar	Jl. Al-Manar
8	Taman Kijang Kencana	Jl. A. Yani
9	Tugu Adipura dan Selamat Datang	Jl. A. Yani
10	RTH Wihara	Jl. Wihara
11	Median Jalan Majakeling	Jl. Majakeling
12	Kolam Renang Tirta Kenanga	Jl. Sum-Sum
13	Stadion Prestasi Kencana	Jl. A. Syairani



14	RTH Lapangan Hasan Basri	Jl. Gembira
15	Taman Al Manar 2	Jl. Al Manar
16	AlkahKuburanHabaib	Jl. Dharma
17	Lapangan Basket Tuntung Pandang Berseri	Jl. A. Yani
18	LapanganBramban	Gang Said
19	Lapangan Tenis Pemuda	Jl. Sapta Marga
20	Pasar Lawas	Jl. Veteran
21	Balairung Tuntung Pandang	Jl. A. Yani dan Jl. Pancasila
22	Kebun PKK	Jl. Datulnsad
23	Pemakaman Umum Muslimin	Jl A. Yani KM 59
24	Pemakaman "Bumi Tuntung Pandang"	Jl. A. Yani
25	Hutan Jati (di Belakang kantor Bupati)	Jl. A. Syairani
26	Hutan Kota (depanrumahdinassekda)	Jl. Hutan Kota
27	Gunung Kayangan	Jl. A. Yani
28	Hutan Kota TPA bakunci	Jl. Raya Takisung
29	Taman Kantor Bupati	Jl. A. Syairani
30	Taman Depan Stadion PerstasiKencana	Jl. A. Syairani
31	Lapangan Bola	Jl. P. Antasari
32	Kuburan Muslimin Sarang Halang	Jl. Sarang Halang
33	PemakamanMusliminMatah	Jl. Matah II
34	Kawasan Khusus Militer	Jl. A. Yani
35	SDN 5 Angsau	Jl. A. Yani
36	Kawasan Sekolah SMPN 3 Pelaihari	Jl. Simpang Desa Pemuda
37	SMK N 2 Pelaihari	Jl. Simpang Desa Pemuda
38	SPP Pelaihari	Jl. A. Yani
39	Pengadilan Negeri Pelaihari	Jl. H. Boejasin
40	RSUD H. Boejasin	Jl. H. Boejasin
41	SDN 6 Angsau	Jl. Purnawirawan
42	SDN Sarang Halang	Jl. Sarang Halang
43	SDN Pelaihari 5	Jl. Bramban Jaya
44	SMP Negeri 5 Pelaihari	Jl. Matah II
45	Puskesmas Pelaihari	Jl. Raya Pelaihari - Tangkisung
46	MAN Pelaihari	Jl. Matah II
47	Masjid Daarullstiqomah	Jl. P. Antasari



48	SDN Bumi Jaya I	Jl. Padjajaran dan Jl. P. Antasari
49	SMPN 1 Pelaihari	Jl. Gembira
50	SDN 2 Pelaihari	Jl. Pembangunan
51	SDN 1 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
52	SDN 4 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
53	SDN 3 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
54	SDN 7 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
55	SDN 6 Pelaihari	Jl. Pembangunan
56	Bajuin Plaza	Jl. Kemakmuran
57	Gereja Paroki Santa Theresia	Jl. Parit Baru
58	SDN 1 Angsau	Jl. Parit Baru
59	SDN 3 Angsau	Jl. Jend Ahmad Yani
60	Taman BAPPEDA Kab. Tanah Laut	Jl. A Syairani
61	Taman BKPSDM Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
62	Taman DINKES Kab. Tanah Laut	Jl. H. Boejasin
63	Taman BPBD Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
64	Taman DISHUB Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
65	Taman DPRD Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
66	Taman DISNAK & KESWAN Kab. Tanah Laut	Jl. Datulnsyad
67	Taman DISTANPANHOLKEB Kab. Tanah Laut	Jl. Datulnsyad
68	Taman DPRKPLH Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syukri
69	Taman DISNAKERIND Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
70	Taman KESBANGPOL Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
71	Taman DISPUSIP Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
72	Taman DISKOPDAG	Jl. A. Syairani



3. Kinerja Utama Melakukan monitoring dengan indikator Jumlah data hasil monitoring dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%

Hasil Monitoring RTH

No.	Lokasi	Hasil Monitoring	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi	
				Kendala	Solusi
Bulan Januari					
2	Jl. Boejasin	- 2 Pot bunga di atas median rusak	- 2 pot bunga yang rusak di amankan ke gudang	- tidak ada	- -
		- Pot bunga di atas median ditumbuhi rumput sehingga mengganggu bunga dalam pot	- Penbersihan dan pencabutan rumput yang tumbuh dalam pot bunga	- tidak ada	- -
3	Taman Pasar Lama dan	- Bunga Malati Jakarta pertumbuhannya tidak rapi dan teratur	- Perapihan susunan/pengaturan tanam Bunga Melati Jakarta	- tidak ada	- -
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan Rumput	- tidak ada	- -
		- Banyak sampah yang ada di area taman	- Pembersihan sampah dan daun kering di area taman	- kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya	- Perbaikan papan himbauan dan penyediaan TPS di area taman
	Taman Majakeling	- Cabang pohon tebebuya di taman Majakeling banyak menjorok kejalan	- Pemangkasan cabang pohon tabebuya yang sudah keluar dari garis area taman	- tidak ada	- -
		- Cat Bangunan assoris taman yang mulai luntur dan mengelupas	- pengecatan kembali bangunan asesoris taman	- tidak tersedianya bahan cat yang di perlukan	- Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan atau penganggaran pembelian stok cat untuk seksi pertamanan dan RTH
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
		- pertumbuhan bunga yang tidak rapih	- Perapihan /pemangkasan bunga	- tidak ada	- -
4	Taman Belakang DPUPR	- Banyak Sampah dan daun kering di area taman	- Pembersihan sampah dan daun kering di area taman	- akses menuju lokasi yang terhalang trotoar yang tinggi dari Jembatan Mina tirta	- Pembuatan Jalan /tangga menuju taman



		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
Bulan Februari					
5	Space samping jembatan Mina Tirta	- Area Kosong yang bisa di manfaatkan untuk lokasi penanaman bunga tepi jalan	- Penanaman Bunga Bugenvil sepanjang area	- stok bunga yang kurang di workshop pembibitan bunga	- penam bahan anggar an pembel ian bibit bunga
6	RTH Kijang Mas Permai Pelaihari	- ranting Pohon-Pohon di dalam taman pertumbuhannya tidak teratur	- Pemangkasan dan perapihan pohon di area RTH Kijang Mas Permai pelaihari	- sulit menjangkau dahan-dahan yang terlalu tinggi	- pengan ggaran untuk pembel ian stick pting dahan yang lebih panjang g
		- Adanya Ranting pohon akasia yang rusak/mati yang dapat membahayakan pengunjung	- Pemangkasan Ranting pohon yang rusak/mati dan Pembersihan lokasi(pengangkutan hasil penebangan ke TPA Bakunci)	- mobil skylift sulit menuju lokasi pohon yang berada di tengah RTH	- Pembu atan landas an portabl e untuk akses mobil skylift
7	Taman Video Tron	- pertumbuhan bunga yang tidak rapih	- Perapihan /pemangkasan bunga	- tidak ada	- -
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
8	Taman Kijang Kencana	- pertumbuhan bunga yang tidak rapih	- Perapihan /pemangkasan bunga	- tidak ada	- -
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
		- Lampu tulisan Nama Taman Mati/rusak	- Perbaikan Lampu Nama Taman, berkoordinasi dengan Petugas PJU	- tidak ada Bahan suku cadang lapu selang pada tulisan	- Pengan ggara n pembel ian lampu selang
		- Lampu taman yang mati/rusak	- Perbaikan Lampu Taman, berkoordinasi dengan Petugas PJU	- keterlambatan perbaikan lampu taman	- koordin asi lebih dengan petuga s PJU
		- Petugas Pemelihara taman yang mengalami kendala pekerjaan	- Rapat koordinasi dan evaluasi kerja untuk petugas pemeliharaan taman dan RTH	- kurangnya realisasi rapat koordiasi pekerjaan	- Evalua si penyus unan rencan a pelaks anaan rapat koordin asi kerja
Bulan Maret					
9	RTH Kijang Mas Permai Pelaihari	- Adanya permasalahan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan	- Rapat koordinasi dan evaluasi kerja untuk petugas pemeliharaan taman dan RTH dan	- bentrok jadwal pengangkutan oleh petugas angkut sampah	- Penam bahan Armad a pengan



			berkoordinasi dengan petugas kebersihan		gkut sampah khusus sampah dari taman dan RTH
		- kendala penyiraman tanaman oleh petugas penyiraman menggunakan mobil penyiraman di dalam area RTH	- Rapat koordinasi penentuan perubahan lokasi jalan masuk mobil tangki penyiraman	- tidak ada	- -
		- Kendala penanganan sampah setiap hari minggu setelah pasar minggu di RTH Kijang Mas Permai	- Rapat koordinasi dengan perwakilan pedagang di area RTH Kijang Mas Permai, membuat papan himbauan dan permohonan bantuan kepada pihak yang terkait	- kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya	- Penambahan papan himbauan, permintaan bantuan kepada SKPD terkait penertiban, dan pengelangan pasar di RTH Kijang Mas Permai
10	Pintu Gerbang Batas Kabupaten (Ds. Pandahan)	- pertumbuhan bunga yang tidak rapih	- Perapihan /pemangkasan bunga	- tidak ada	- -
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
		- Cat bangunan yang luntur dan mengelupas	- Pengecatan Kembali bangunan pintu gerbang batas kabupaten	- tidak tersedianya bahan cat yang di perlukan	- Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan atau penganggaran pembelian stok cat untuk seksi pertamanan dan RTH
11	Tugu Adipura Baru	- 3 Lampu sorot tugu mati	- Penggantian/Perbaikan instalasi listrik lampu sorot, berkoordinasi dengan petugas PJU	- tidak ada	- -



		- Lampu hias tugu sebagian mati	- Penggantian/Perbaikan instalasi listrik lampu hias tugu, berkoordinasi dengan petugas PJU	- tidak ada Bahan suku cadang lampu selang pada tugu	- Penggantian pembelian lampu selang
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
		- tumbuh bibit anak pohon tabebuya di pulau jalan simp. 3 parit	- pemindahan bibit anak tabebuya ke workshop pembibitan bunga di kantor	- banyak bibit yang tidak bertahan setelah pemindahan	- pelatihan khusus untuk petugas pembibitan
	Jembatan Kembar Jl. Parit	- bunga yang terlalu tua hingga jarang berbunga dan tumbuh tidak rapi	peremajaan/penggantian bunga dengan bunga yang baru	- stok bunga yang kurang di workshop pembibitan bunga	- penambahan anggaran pembelian bibit bunga
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
12	Taman Tugu Tala Membangun	- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
		- sampah di area taman	- Pembersihan sampah dan minitoring sampah yang sering ada	- kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya	- Sosialisasi kepada Masyarakat untuk menjaga kebersihan taman
		- air mancur kolam yang tidak berfungsi	- Perbaikan mesin air mancur	- mesin air mancur yang cepat rusak	- monitoring dalam pemakaian mesin air mancur oleh petugas yang berpengalaman
		- bunga dalam pot terlalu tua dan tidak cocok di tanam di area tugu	- peremajaan/penggantian bunga dengan bunga yang baru	- stok bunga yang kurang di workshop pembibitan bunga	- penambahan anggaran pembelian bibit bunga
Bulan April					
13	Jl. Pancasila	- Tanaman/bunga di atas Median banyak yang menghalangi/mengganggu batas pandang pengendara bermotor	- Pemangkasan dan perapihan tanaman/bunga yang tingginya lebih dari 1m	- Pengamanan lokasi kerja	- penambahan rambu pengaman



					lalulintas
		- Tanaman/bunga di atas Median (depan Kuburan Muslimin) sebagian besar kering dan ada yang mati	- Pembersihan (mencabut) Bunga yang mati ,Penanaman bunga baru di lokasi tersebut dan penambahan intensitas penyiraman	- tidak ada	- -
		- Median pada Lokasi Utun rusak	- Perbaikan kanstin median	- Alat dan bahan untuk pekerjaan perbaikan median tidak tersedia	- Penganggaran Pekerjaan Pemeliharaan median dan trotoar dalam kota
14	Tanan Makam Pahlawan	- beberapa Asesoris taman yang rusak dan membahayakan	- pelepasan asesoris taman yang membayakan	- tdk ada	- -
		- Cat bangunan yang luntur dan mengelupas	- pengecatan Kembali bangunan pintu gerbang	- tidak tersedianya bahan cat yang di perlukan	- Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan atau penganggaran pembelian stok cat untuk seksi pertamanan dan RTH
		- bunga beauty taiwan sebagian besar rusak/mati	- Pencabutan bunga beauty taiwan dan di lakukan pembibitan dari hasil tersebut	- tidak ada	- -
		- pohon dan bunga yang pertumbuhan rantingnya tidak teratur	- Perapihan /pemangkasan bunga	- tidak ada	- -
15	Rest Area Gng. Kayangan	- sampah di area taman	- Pembersihan sampah dan minitoring sampah yang berbahaya	- kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya	- Perbaikan papan himbauan dan penyediaan TPS di area taman
		- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
		- Cat bangunan yang luntur dan mengelupas	- pengecatan Kembali bangunan pintu gerbang	- tidak tersedianya bahan cat yang di perlukan	- Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan atau penganggaran



					ggaran pembelian stok cat untuk seksi pertamanan dan RTH
		- bunga yang terlalu tua hingga jarang berbunga dan tumbuh tidak rapi	peremajaan/penggantian bunga dengan bunga yang baru	- stok bunga yang kurang di workshop pembibitan bunga	- penam bahan anggaran pembelian bibit bunga
16	Rest Area Gng. Kayangan	- kendala tempat penampungan sampah yang kecil	- berkoordinasi dengan seksi persampahan dan limbah terkait untuk penambahan/perbesar luas tabungan di rest area	- tidak ada	- -
		- Besi penyangga tulisan "Pelaihari" sebagian kecil rusak/patah	- Pengelasan kembali	- tidak ada	-
		- Cat bangunan yang luntur dan mengelupas	- pengecatan Kembali bangunan pintu gerbang	- tidak tersedianya bahan cat yang di perlukan	- Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan atau penganggaran pembelian stok cat untuk seksi pertamanan dan RTH
16	Tugu Kijang Gng. Kayangan	- Rumput terlalu tinggi	- Pemotongan dan pencabutan Rumput	- tidak ada	- -
		- fokus cahaya lampu sorot tugu tergeser	- Perbaikan Lampu sorot tugu, berkoordinasi dengan Petugas PJU	- tidak ada	- -
		- ACP tugu malai kubas	- pengecatan kembali	- tidak tersedianya bahan cat khusus ACP	- Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan atau penganggaran pembelian stok cat untuk seksi pertamanan



					dan RTH
Bulan Mei					
17	Jl. Ayani Pelaihari	- survei jumlah pot bunga di atas trotoar yang Bunganya sudah terlalu besar dang mengganggu	- Pemindahan pot bungan ke RTH Kijang Mas Permai	- Armada pengangkut tidak memadai untuk mengangkut pot dalam 1 hari	- koordinasi dengan Seksi Kebersihan Limbah untuk bantuan armada truck
18	Taman depan Komp. Perumahan Kejaksaan	- pohon dan bunga yang pertumbuhan rantingnya tidak teratur	- Perapihan /pemangkasan bunga	- tidak ada	- -
19	Taman Kijang Kencana	- monitoring kondisi alat alat dan mesin taman	- Perbaikan mesin potong rumput	- tidak ada	- -
			- Pembelian mesin potong rumput	- tidak ada	- -
			- pembelian stik dahan	- tidak ada	- -
Bulan Juni					
20	RTH Kijang Mas Permai	- monitoring kondisi alat alat dan mesin taman	- Pembelian mesin potong rumput	- tidak ada	- -
			- pembelian stik dahan	- tidak ada	- -
			- Penambahan Sapu	- tidak ada	- -
21	workshop pembibitan (kantor DPRKPLH)	- masih banyak bunga bougenvil belum tertanam di taman - taman kota	- Survei lokasi untuk penanaman bunga bougenvil di pulau jalan dalam kota	- tidak ada	- -
		- stock pupuk berkurang	- Pembelian pupuk	- Stok pupuk masih belum bisa memenuhi kebutuhan semua taman	- koordinasi lebih dengan SKPD terkait penambahan anggaran untuk pemeliharaan taman dan RTH



		- stock Poliback ukuran sedang habis	- Pembelian Poliback	- tidak ada	- -
22	Pulau Jalan Tugu PKK	- Penentuan titik tanam bunga bougenvil	- Penanaman bunga bougenvil	- tidak ada	- -
23	Median dalam Kota Pelaihari	- 5 titik Uturn median rusak parah	- Pengukuran Kerusakan dan perhitungan anggaran perbaikan	- Alat dan bahan untuk pekerjaan perbaikan median tidak tersedia	- Penganggaran Pekerjaan Pemeliharaan median dan trotoar dalam kota
		- kanstin median dan trotoar banyak yang ditumbuhi lumut	- Pembersihan Median dan trotoar	- Belum tersusunya jadwal pembersihan median jalan	- Penganggaran Pekerjaan Pemeliharaan median dan trotoar dalam kota
		- 17 Kanstin median lepas	- Pengukuran Kerusakan dan perhitungan anggaran perbaikan	- Alat dan bahan untuk pekerjaan perbaikan median tidak tersedia	- Penganggaran Pekerjaan Pemeliharaan median dan trotoar dalam kota
		- Cat median dan kanstin trotoar sudah kuras	- Pengukuran kanstin dan perhitungan anggaran	- Alat dan bahan untuk pekerjaan perbaikan median tidak tersedia	- Penganggaran Pekerjaan Pemeliharaan median dan trotoar dalam kota
		- 10 titik trotoar rusak parah	- Pengukuran Kerusakan dan perhitungan anggaran perbaikan	- Alat dan bahan untuk pekerjaan perbaikan trotoar tidak tersedia	- Penganggaran Pekerjaan Pemeliharaan median dan trotoar dalam kota
24	Taman Depan GOR	- Sticker kursi kuras dan lepas	- Pelepasan sticker dan menentukan pengganti penutup dinding kursi	- tidak ada	- -
		- papan bantalan kursi sudah Lapuk	- pelepasan papan dan pembersihan sisa baut dan menentukan pengganti bantalan kursi	- tidak ada	- -
		- rumput liar tumbuh tinggi	- pemotongan dan pencabutan rumput	- tidak ada	- -



		- pertumbuhan bunga yang tidak teratur	- pemangkasan dan pengaturan kembali tumbuh kembang bunga	- tidak ada	- -
25	RTh Kijang Mas Permai	- cat dinding pendopo kotor	- Pengukuran dinding kotor, dilapis dengan sticker dinding	- tidak tersedianya sticker dinding	- Penganggaran pembelian dan pemasangan sticker dinding pada penyusunan anggaran perubahan
		- lantai pendopo kotor	- Pembersihan lantai pendopo	- tidak ada	- -
		- rumput liar tumbuh tinggi	- Pemotongan dan pencabua rumput oleh petugas potong rumput	- tidak ada	- -
Bulan Juli					
26	Taman Al Manar	- Cat Bangunan yang kubas dan luntur	- Perhitungan anggaran pengecatan	- tidak ada	- -
		- Bunga pisang-pisangan mati	- Pembersihan Bunga pisang-pisangan dan penanaman bunga melati jakarta	- tidak ada	- -
		- tidak ada tempat sampah di area taman	- koordinasi dengan seksi Kebersihan dan limbah mengenai bantuan tempat sampah	- tidak ada	- -
	Samping SPBU H. Budi	- Lantai Keramik lepas (2 pcs)	- Pemasangan kembali keramik	- tidak ada	- -
		- sampah tusuk pentol berserakan di area taman	- Himbauan kepada pedagang pentol sekitar taman agar membersihkan tusuk pentol bekas	- tidak ada	- -
		- rumput liar tumbuh tinggi	- Pemotongan rumput oleh petugas potong rumput	- tidak ada	- -
27	RTh Kijang Mas Permai	- Survei banyak minat pengunjung dalam penggunaan Alat fitness Out door	- Perencanaan penambahan alat fitness out door	- tidak ada	- -
		- ring basket Rusak	- perbaikan ring basket	- ring basket tidak bisa di perbaiki	- Penganggaran Pekerjaan pemeliharaan alat fitness Out door
		- tidak ada tempat istirahat/duduk untuk pengunjung area fitness out door	- penambahan tempat istirahat berupa bangku besi di area fitness out door	- tidak adanya bahan dan tenaga ahli di petugas taman untuk membuat bangku besi	- Penganggaran pembuatan sarana dan prasara taman dan RTH



					(Pembuatan/ Pembelian Kursi besi)
28	RTh Kijang Mas Permai	- Penentuan lokasi penambahan alat fitness out door	- Pengukuran lokasi	- tidak ada	- -
		- rumput liar tumbuh tinggi	- Pemotongan rumput oleh petugas potong rumput	- tidak ada	- -
		- Dahan pohon di area fitness outdoor ada yang mati dan membahayakan	- Pemangkasan dan pembersihan sisa pemangkasan pohon	- tidak ada	- -
29	Pintu Gerbang perkantoran Gagas, Sarang Halang dan median simp. 3 Sarang Halang	- Cat Bangunan yang kubas dan luntur	- Pengukuran dan perhitungan pengecatan kembali	- tidak tersedianya bahan cat yang di perlukan	- Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan atau penggantian pembelian stok cat untuk seksi pertamanan dan RTH
		- Bunga dalam pot mati	- pembersihan bunga mati dan penanaman bunga pengganti	- stok bunga yang kurang di workshop pembibitan bunga	- penanaman bahan anggaran pembelian bibit bunga
30	RTh Kijang Mas Permai	- Survei banyak minat pengunjung terhadap area bermain Anak	- Kajian arena bermain anak yang akan di tambahkan	- tidak ada	- -
		- Pondasi ayunan lepas	- perbaikan pondasi ayunan	- tidak ada	- -
		- tempat duduk untuk orang tua tidak ada	- penambahan tempatistirahat berupa bangku besi di area bermain anak	- tidak adanya bahan dan tenaga ahli di petugas taman untuk membuat bangku besi	- Penganggaran pembuatan sarana dan prasarana taman dan RTH (Pembuatan/ Pembelian Kursi besi)
Bulan Agustus					



31	RTh Kijang Mas Permai	- fokus penerangan dari lampu sorot yang berubah	- Perbaiki Posisi lampu sorot	- tidak ada	- -
		- 1 Lampu taman mati	- Perbaiki instalasi lampu taman	- tidak ada	- -
32	RTh Kijang Mas Permai	- spanduk Papan Hibauwan rusak	- Penggantian Spanduk papan Hibauwan	- tidak ada	- -
33	RTh Kijang Mas Permai	- Area taman masih banyak yang gelap	- perencanaan penambahan titik lampu taman	- tidak ada	- -
			- koordinasi dengan seksi PJU dalam perhitungan Anggaran		
34	Sepanjang Komplek Perkantoran gas Permai	- pohon di depan perkantoran perlu perapihan	- Perapihan dahan dan ranting pohon tepi jalan	- tidak ada	- -
		- pohon mati taman air mancur Kantor Bupati	- Penebangan pohon mahoni di taman air mancur Kantor Bupati	- Armada pengangkut hasil penebangan dalam pemeliharaan	- batang pohon yang ukuran besar diangkut dengan mobil pick up taman, ranting dan daun diangkut dengan tosa
Bulan September					
35	Taman depan DISPORA	- rumput liar tumbuh tinggi	- Pemotongan dan pecabutan rumput	- tidak ada	- -
		- Sampah daun kering di sela-sela tanaman	- pembersihan daun kering	- tidak ada	- -
		- pelepah daun pohon palm yang kering menumpuk	- pembersihan pelepah palm kering	- tidak ada	- -
36	Workshop dan gudang alat Pokja tebang pohon	- stok pisau mesin cainsaw sisa 1 Pcs	- Pendataan suku cadang dari mesin potong dan penganggaran pembelian suku cadang baru	- tidak ada	- -
		- Busi Mesin potong sisa 1 kotak		- tidak ada	- -
		- kikir besi segi tiga sisa 1 kotak		- tidak ada	- -
37	Jl. Matah (Simp.4 MIN)	- 12 pohon di sepanjang sisi jalan harus di potong untuk mendukung pembangunan drainase pedestrian oleh DPUPR	- tanggal 15-17 pelaksanaan penebangan pohon sepanjang lokasi drainase pedestrian	- Kurangnya Armada pengangkut hasil penebangan	- koordinasi dengan Seksi Kebersihan Limbah untuk bantuan armada truck
38	Makam Habaib dan Makam Muslimin	- pertumbuhan bunga yang tidak teratur	- Perapihan dahan dan ranting bunga	- tidak ada	- -
		- rumput liar tumbuh tinggi	- Pemotongan rumput oleh petugas potong rumput	- tidak ada	- -



		- dahan pohon di depan makam muslimin patah	- pemangkasan dahan pohon dan perapihan oleh petugas tebang pohon	- Pengamanan lokasi kerja	- penamban rambu pengaman lalulintas dan koordinasi dengan LAJR
39	Taman Depan Plaza Bajuin dan depan Asrama Polisi	- rumput liar tumbuh tinggi	- Pemotongan rumput oleh petugas potong rumput	- tidak ada	- -
		- Masih banyak area taman yang kosong	- Penambahan jenis bunga di taman depan plaza bajuin	- tidak ada	- -
Bulan Oktober					
40	Sepanjang Jalan A Syuksi dan jl. KH Mansyur	- Penentuan posisi pembangunan pedestrian	- Pengukuran dan perhitungan anggaran pembangunan pedestrian	- penentuan harga HPSK per meter belum diketahui	- berkoordinasi dengan Dinas PUPR mengenai harga satuan
41	Simp. 3 Bentok dan Pintu gerbang batas kabupaten (Ds pandahan)	- rumput liar tumbuh tinggi	- Pemotongan dan pencabutan rumput	- tidak ada	- -
		- Cat Bangunan yang kuras dan luntur	- Perhitungan anggaran pengecatan	- tidak ada	- -
		- ACP tulisan hilang	- Pembersihan dan pengamanan sisa ACP	- tidak ada	- -
		- pertumbuhan bunga yang tidak teratur	- Perapihan susunan tanam bunga	- tidak ada	- -
42	Workshop dan gudang bibit bunga	- stok bibit bunga berkurang	- Pendataan dan Penganggaran untuk pembelian bibit bunga	- tidak ada	- -
		- beberapa jenis bibit bunga yang ditanam mati karena perbahan musim	- Pemberian pelatihan dan pengetahuan cara menanam dan memelihara tanaman kepada petugas penanam bibit	- belum ada instansi terkait pelatihan teknis budidaya bunga, tanaman hias	- koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
43	Depan Terminal Pelaihari	- Pohon di sepanjang jalan depan terminal terlalu tinggi	- Pemangkasan pohon depan terminal	- skylift macet	- perbaikan dan perawatan skylift
Bulan November					
44	Seputaran Mesjid Al-Manar	- Tidak ada ciri khas untuk lokasi mesjid	- perencanaan penganggaran pintu gerbang /pintu masuk Lokasi Mesjid	- tidak ada	- -
45	RTh Kijang Mas Permai	- dahan dan ranting di sepanjang jalan depan RTH perlu di rapikan	- pemangkasan dahan pohon dan perapihan oleh petugas tebang pohon	- tidak ada	- -



		- 5 Pohon Akasia Mati	- Penebangan pohon akasia	- tidak ada	- -
46	Taman Kijang Kencana	- Kunci pintu toilet taman sering rusak	- Perbaikan dan penggantian kunci pintu toilet	- tidak tersedianya suku cadang kunci pintu toilet	- untuk sement ara kunci pintu toilet di gunaka n yang ada dengan tambah an grendel
		- toilet sering berbau dan kotor	- penambahan papan himbawan pemeliharaan sarana dan prasarana taman	- tidak ada	- -
		- air tandon toilet sering habis	- monitoring pemakaian air di toilet taman Kijang kencana	- tidak ada	- -
Bulan Desember					
46	Taman Depan Balairung	- pertumbuhan bunga yang tidak teratur	- Pemangkasan bunga dan perapihan susunan tanam bunga	- tidak ada	- -
		- Kursi taman rusak	- pelepasan kursi dan pengaman kursi ke gudang	- tidak ada	- -
		- Cat Bangunan yang kubah dan luntur	- pengukuran dan penganggaran pengecatan	- tidak ada	- -
47	Taman Videotron	- setengah Layar LCD videotron mati	- berkoordinasi dengan petugas PJU yang mengerti cara pemeliharaan Videotron	- belum adanya petugas yang benar benar menguasai teknik pemeliharaan videotron	- Penam bahan Petuga s atau melaku kan pelatih an teknik untuk pemeli haraan videotr on
		- instalasi listrik videotron terbuka	- Perbaikan instalasi listrik dibantu Petugas PJU	- tidak ada	- -
48	Sepanjang Jalan Samping RTH Kijang Mas Permai	- dahan dan ranting di sepanjang jalan depan RTH perlu di rapikan	- pemangkasan dahan pohon dan perapihan oleh petugas tebang pohon	- tidak ada	- -

Permasalahan :

Adanya masa pandemi covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya waktu pelaksanaan pekerjaan untuk mematuhi protokol kesehatan

Upaya mengatasi permasalahan

Penyusunan kembali Rencana kerja, metode pelaksanaan



Rencana Aksi

Menyusun rencana kajian perencanaan untuk penambahan luasan lahan RTH di wilayah perkotaan pelaihari untuk mencapai presentase 30% luasan RTH



3.f. Kabid Tata Lingkungan

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Tata Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 15	Indikator 23 Persentase peningkatan kampung iklim	16 % (3 Desa/Kel)	16 % (3 Desa/Kel)	100%
	Meningkatnya wilayah bebas	Indikator 24 Persentase kajian Lingkungan hidup	100% (1 Kajian LH)	100% (1 Kajian LH)	100%



	pencemaran lingkungan	yang bisa dimanfaatkan			
		Indikator 25 Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100 % (1 SKKL, 14 UKL-UPL, 80 SPPL)	281,05 % (4 SKKL, 34 UKL-UPL, 229 SPPL)	281%

Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Tata Lingkungan 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

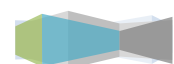
Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	-	4% (1 Desa/Kel)	12% (3 Desa/Kel)	16 % (3 Desa/Kel)	16 % (3 Desa/Kel)	100%
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100% (1 Kajian LH)	100% (1 Kajian LH)	100% (2 Kajian LH)	100% (1 Kajian LH)	100% (1 Kajian LH)	100%
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	281,05 % (4 SKKL, 22 UKL-UPL, 115 SPPL)	281,05 % (4 SKKL, 27 UKL-UPL, 69 SPPL)	281,05 % (1 SKKL, 25 UKL-UPL, 158 SPPL)	100 % (1 SKKL, 14 UKL-UPL, 80 SPPL)	281,05 % (4 SKKL, 34 UKL-UPL, 229 SPPL)	281%

3.f.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 15

Pada tahun 2020 sasaran strategis Meningkatkan wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan indikator

1. Persentase peningkatan kampung iklim capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Pemeliharaan

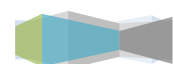


Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Program Kampung Iklim merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup mulai ikut serta secara aktif Program Kampung Iklim pada tahun 2019 sampai dengan saat ini yang menghasilkan 4 (empat) Desa yang meraih Penghargaan ProKlim Utama yaitu 1 (satu) Desa pada tahun 2019 yaitu Desa Bumi Jaya Kecamatan Bajuin dan 3 (tiga) Desa pada tahun 2020 yaitu Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap, Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong, dan Desa Tirta Jaya Kecamatan Pelaihari. Keberhasilan ini karena semakin giatnya sosialisasi Program Kampung Iklim kepada masyarakat dan adanya keterlibatan dari pihak-pihak swasta selaku Mitra Pendamping Program Kampung Iklim serta adanya dukungan penuh dari pimpinan tertinggi yaitu Bupati Tanah Laut untuk mensukseskan Misi Bupati terpilih yaitu “Desa Di Bina Kota Di Tata”. Sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 Program Kampung Iklim belum di ikuti secara aktif hal ini karena masih kurangnya sosialisasi yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan selaku Pembina Program Kampung Iklim bagi Kabupaten/Kota. Analisa program atau kegiatan yang menunjang Program Kampung Iklim adalah semakin banyaknya program atau kegiatan dari SKPD teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing yang dapat dikolaborasikan dengan Program Kampung Iklim pada Desa binaan sehingga dapat meningkatkan penilaian dari Desa tersebut.

Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Lingkungan DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan indikator Persentase peningkatan kampung iklim dilaksanakan melalui Program Tata Lingkungan dengan kegiatan Verifikasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan dan/ atau usaha dan kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Lingkungan dan Kebersihan DPRKPLH nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas



pencemaran lingkungan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup didukung 1 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan Verifikasi Teknis PPLH	Indikator Jumlah Permohonan Yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Sasaran Melaksanakan Penerbitan Pertimbangan Teknis PPLH	Indikator Jumlah Rekomendasi Teknis PPLH	15 Pertimbangan Teknis	35 Pertimbangan Teknis	233%
3.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca	Indikator Jumlah dokumen inventarisasi GRK yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Sasaran Melaksanakan Penyusunan dokumen Proklamasi	Indikator Jumlah Dokumen Proklamasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Sasaran Mendaftarkan desa program kampung iklim	Indikator Jumlah Desa Terdaftar Proklamasi	3 Desa	6 Desa	200%



Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksana kan Verifikasi Teknis PPLH	Jumlah Permohonan Yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Melaksana kan Penerbitan Pertimbangan Teknis PPLH	Jumlah Rekomendasi Teknis PPLH	22 Pertimbangan Teknis	29 Pertimbangan Teknis	39 Pertimbangan Teknis	15 Pertimbangan Teknis	35 Pertimbangan Teknis	233%
3	Melaksana kan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca	Jumlah dokumen inventarisasi GRK yang disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Melaksana kan Penyusunan dokumen Proklamasi	Jumlah Dokumen Proklamasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Mendaftar kan desa program kampung iklim	Jumlah Desa Terdaftar Proklamasi	-	1 Desa	3 Desa	3 Desa	6 Desa	200%

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan Verifikasi Teknis PPLH dengan indikator Jumlah Permohonan Yang Diverifikasi dengan target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%.
2. Kinerja Utama Melaksanakan Penerbitan Pertimbangan Teknis PPLH dengan indikator Jumlah Rekomendasi Teknis PPLH dengan target 15 Pertimbangan Teknis terealisasi 35 Pertimbangan Teknis dengan capaian kinerja 233%.

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan semakin giatnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdampak semakin banyaknya pertimbangan teknis PPLH yang di terbitkan

3. Adanya pemenuhan kewajiban bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang termuat dalam peraturan Pemerintah RI No 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan pada Pasal 53 Ayat (1).

4. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca dengan indikator Jumlah dokumen inventarisasi GRK yang disusun dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Petunjuk teknis penyusunan inventarisasi GRK mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.73/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2017 tentang pedoman penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Maka berdasarkan hal tersebut segera dilakukan penyusunan anggaran inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di tahun 2017 dalam pelaksanaannya di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 walaupun pada tahun 2020 refocusing anggaran tetapi inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) tetap dilaksanakan

Berdasarkan inventarisasi sumber emisi, data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan beban emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Tanah Laut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber emisi gas rumah kaca yang ada di Kabupaten Tanah Laut berasal dari sektor energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian/peternakan, dan pengelolaan limbah padat khususnya di TPA.
 2. Gas rumah kaca yang terbentuk dari keempat sektor tersebut berupa CO₂, CH₄, dan NO₂ yang secara rinci besarnya telah diuraikan di atas.
 3. Secara keseluruhan, keempat sektor tersebut di atas, beban emisi gas rumah kaca terbesar dihasilkan dari sektor energi yang terdiri dari 3 subsektor.
 4. Ketiga subsektor tersebut adalah berasal dari aktivitas pembakaran bahan bakar, emisi fugitive, dan transportasi.
5. Kinerja Utama Melaksanakan Penyusunan dokumen Proklamasi dengan indikator Jumlah Dokumen Proklamasi dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%.
 6. Kinerja Utama Mendaftarkan desa program kampung iklim dengan indikator Jumlah Desa Terdaftar Proklamasi dengan target 3 Desa terealisasi 6 Desa dengan capaian kinerja 200%.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program kampung iklim berdasarkan peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang program kampung iklim tanggal 03 November 2016 dan peraturan Dirjen pengendalian perubahan iklim KEMENLHK RI NO P1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 maka berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2017 dan 2018 masih melakukan sosialisasi program Kampung iklim ke desa dan kelurahan di Kabupaten Tanah Laut dan penyusunan anggaran kegiatan pada tahun 2018

sedangkan pada tahun 2019 program Kampung iklim yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dan berlanjut sampai dengan tahun 2023.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan Sosialisasi kepada Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sekaligus melakukan pendekatan kepada pejabat pemerintahan Desa dan kelurahan serta tokoh masyarakat dan juga penjangkaran Desa dan kelurahan yang akan didaftarkan pada program Kampung Iklim.



Seiring berjalannya waktu dan kegiatan Program Kampung Iklim tahun 2020, persiapan dan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan yang akan didaftarkan pada Program Kampung Iklim Tahun 2021 terus berjalan. Kegiatan persiapan dan pembinaan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dalam rangka memenuhi kewajiban Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari untuk membina 10 Desa binaan dalam Program Kampung Iklim untuk menuju Desa ProKlim Lestari selain itu juga untuk menjaring lebih banyak lagi desa yang berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

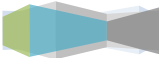




Sosialisasi Program Kampung Iklim Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari



Sosialisasi Proklamasi Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari

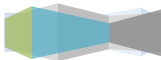




Sosialisasi Proklamasi Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati



Sosialisasi ProKlim Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar





Sosialisasi Proklim di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar



Sosialisasi ProKlim Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari





Sosialisasi ProKlim Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung



Sosialisasi ProKlim Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin

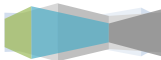




Sosialisasi ProKlim Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong



Sosialisasi Proklim di Desa Bumi Jaya



2. Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini

Kajian Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tercapai 100 % dalam arti Dokumen ini sangat dimanfaatkan atau digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut serta merupakan dasar dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Hal ini karena Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen wajib dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kabupaten/kota sehingga sangat di upayakan untuk dipenuhi. Analisa program atau kegiatan yang dapat menunjang Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini adalah adanya program atau kegiatan pada SKPD teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing yang dapat memenuhi kebutuhan data dari Dokumen Kajian Lingkungan Hidup.

Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Lingkungan DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan indikator Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan dilaksanakan melalui Program Tata Lingkungan dengan kegiatan Inventarisasi data dan Informasi Lingkungan Hidup selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS didukung 1 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan Penyusunan Dokumen KajianPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikator Jumlah Dokumen RPPLH	-	-	-

2.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Indikator Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Indikator Jumlah dokumen IKLH	1 Dokumen	-	Refocusing
4.	Sasaran Melaksanakan uji laboratorium	Indikator Jumlah LHU	12 LHU	10 LHU	83%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	-	-	1 Dokumen	—	-	-
2	Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Jumlah dokumen IKLH	-	-	-	1 Dokumen	-	Refocusing
4	Melaksanakan uji laboratorium	Jumlah LHU	-	-	-	12 LHU	10 LHU	83,3%

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS tahun 2020 yaitu :

- Kinerja Utama Melaksanakan Penyusunan Dokumen KajianPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Jumlah Dokumen RPPLH tidak dilaksanakan pada tahun ini karena dokumen ini telah di targetkan dan tidak dilaksanakan di tahun sebelumnya dan pelaksanaannya hanya sekali dalam 5 tahun
 - Petunjuk teknis penyusunan RPPLH berdasarkan Surat Edaran dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, tanggal 16 November 2016. Berdasarkan hal tersebut penganggaran baru disusun pada tahun 2017 untuk dilaksanakan pada tahun 2018. Selain itu seperti yang termuat dalam UU RI nomor 32 tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 9 ayat 4 bahwa RPPLH kabupaten kota mengacu pada RPPLH Provinsi sedangkan RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan diPerdakan pada Tahun 2017.

- Penyusunan dokumen RPPLH baru dilaksanakan tahun 2018 yaitu dimulai dari tahap Inventarisasi Lingkungan Hidup dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 untuk tahap penetapan ekoregion dan penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Laut

2. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD dengan indikator Jumlah dokumen IKPLHD dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Dokumen IKPLHD dilaksanakan secara rutin setiap tahun karena merupakan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH dengan indikator Jumlah dokumen IKLH dengan target 1 Dokumen terealisasi 0 Dokumen sehingga tidak memenuhi capaian kinerja yang di targetkan

Penyusunan dokumen IKLH direncanakan dikerjakan pada tahun 2020 tetapi terkendala refocusing sehingga pengadaan Dokumen tersebut ditiadakan. Untuk itu maka penyusunannya akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021. IKLH mulai dikerjakan setelah dokumen RPPLH selesai disusun karena angka IKLH yang dihitung setiap tahun merupakan evaluasi dari keberhasilan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang didalam dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Laut.

4. Kinerja Utama Melaksanakan uji laboratorium dengan indikator Jumlah LHU dengan 12 Ihu sekolah terealisasi 10 LHU dengan capaian kinerja 83,3%.

- Pengujian kualitas air hujan baru dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai solusi dari tidak adanya data kualitas air hujan yang dibutuhkan untuk pemenuhan data pada penyusunan dokumen IKPLHD.
- Target 100% LHU tidak tercapai karena ada 2 bulan tidak dilakukan pengujian sampel yang disebabkan awal munculnya pandemic covid 19 sehingga laboratorium tidak melayani pengujian sampel, serta disebabkan tidak adanya hari hujan efektif pada bulan yang bersangkutan. Sehingga Target 12 LHU tidak tercapai, dan capaian kinerja hanya 83,3%



3. Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 281%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Kajian Dampak Lingkungan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini

Rekomendasi Lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan Pertimbangan Teknis PPLH merupakan dasar dalam memperoleh izin berusaha bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan. Ini merupakan kepanjangan tangan dari pelayanan perizinan dari dinas teknis yang membidangi sedangkan perizinannya berada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terlaksananya 100% hal ini dikarenakan :

- a. Adanya pemenuhan kewajiban dari peraturan dan perundang-undangan terkait perijinan berusaha dan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- b. Semakin sadarnya pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- c. Semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Tanah Laut sehingga banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.
- d. Semakin tertibnya proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut.
- e. Semakin giatnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Analisa program atau kegiatan yang dapat menunjang dari capaian ini adalah semakin banyaknya program atau kegiatan yang dapat meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan pentertiban terhadap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut serta adanya program atau kegiatan untuk meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.

Kasi Kajian Dampak Lingkungan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Lingkungan DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan indikator Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH dilaksanakan melalui Program Tata Lingkungan dengan kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Kajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Kajian Dampak Lingkungan didukung 1 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Kajian Dampak Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan Penerbitan SKKL	Indikator Jumlah SKKL	1 SKKL	4 SKKL	400%
2.	Sasaran Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL	Indikator Jumlah Rekomendasi UKL- UPL	14 Rekomendasi UKL-UPL	34 Rekomendasi UKL-UPL	243%
3.	Sasaran Melakukan Penerbitan SPPL	Indikator Jumlah penerbitan izin SPPL	80 SPPL	229 SPPL	286%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Kajian Dampak Lingkungan 2020 dengan Capaian Tahun-
Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan Penerbitan SKKL	Jumlah SKKL	4 SKKL	4 SKKL	1 SKKL	1 SKKL	4 SKKL	400%
2	Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL	Jumlah Rekomendasi UKL-UPL	22 Rekomen dasi UKL-UPL	27 Rekomen dasi UKL-UPL	25 Rekome ndasi UKL- UPL	14 Rekom endasi UKL- UPL	34 Rekomend asi UKL-UPL	243%
3	Melakukan Penerbitan SPPL	Jumlah penerbitan izin SPPL	115 SPPL	69 SPPL	158 SPPL	80 SPPL	229 SPPL	286%

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Kajian Dampak Lingkungan yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Kajian Dampak Lingkungan tahun 2020 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan Penerbitan SKKL dengan indikator Jumlah SKKL dengan target 1 SKKL terealisasi 1 SKKL dengan capaian kinerja 400%.
2. Kinerja Utama Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL dengan indikator Jumlah Rekomendasi UKL-UPL dengan target 14 Rekomendasi UKL-UPL terealisasi 34 Rekomendasi UKL-UPL dengan capaian kinerja 243%.



3. Kinerja Utama Melakukan Penerbitan SPPL Melakukan Penerbitan SPPL dengan indikator Jumlah penerbitan izin SPPL dengan target 80 SPPL terealisasi 229 SPPLdengan capaian kinerja 286%.

Telah terjadi peningkatan kinerja untuk kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yaitu meningkatnya jumlah penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Rekomendasi UKL-UPL, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Peningkatan ini disebabkan oleh :

- Adanya pemenuhan kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yaitu UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 36 ayat (1) “bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL” dan Pasal 34 ayat (1) “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib memiliki UKL-UPL” serta Pasal 35 “Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”.
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen lingkungan hidup yaitu melalui dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
- Semakin tertibnya proses penerbitan perijinan berusaha di Kabupaten Tanah Laut contohnya salah satu persyaratan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut untuk kelengkapan persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan harus melampirkan SKKL/UKL-UPL/SPPL
- Semakin terbukanya peluang investasi di Kabupaten Tanah Laut seperti adanya Kawasan Industri Jorong, dll.

Izin SPPL 2020

No	Nama/ Badan Usaha	Jenis usaha	Alamat	Nomor Registrasi	Tanggal
1	Puskes Panyipatan	Pelayanan Kesehatan	Panyipatan	1/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	10 Januari 2020
2	Semi	Pangkalan LPG 3 Kg	Panyipatan	2/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	13 Januari 2020
3	Rizka	Pangkalan LPG 3 Kg	Bumi Makmur	3/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	13 Januari 2020
4	Marliana	Pangkalan LPG 3 Kg	Karang Taruna Pelaihari	4/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	13 Januari 2020
5	Norlaila	Pangkalan LPG 3 Kg	Panggung Pelaihari	5/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	14 Januari 2020
6	Ida Laila	Pangkalan LPG 3 Kg	Bajuin	6/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	14 Januari 2020
7	H. Kusaini	Pangkalan LPG 3 Kg	Kintap	7/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	16 Januari 2020

8	Jumiati Zahra/ PT. Faudzil Adzim Jaya	MBR	Pelaihari	8/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	21 Januari 2020
9	Hj. Rita Warlina	Pangkalan LPG 3 Kg	Kintap	9/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	21 Januari 2020
10	H. Zamhusien	Pangkalan LPG 3 Kg	Tambang Ulang	10/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	21 Januari 2020
11	Mega Juarsa/PT. Mutiara Cahaya Barokah	Agen LPG 3 Kg	Tambang Ulang	11/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	21 Januari 2020
12	Hadi Supanto/Edy Hidyat/PT.Karya Energi Borneo	Gudang Pencacah kayu	Jorong	12/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	21 Januari 2020
13	Ibrahim Nazar	Pangkalan LPG 3 Kg	Jorong	13/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	24 Januari 2020
14	Nueholis/ CV. Seiping Jaya Ban	Pangkalan LPG 3 Kg	Kebun Raya Kintap	14/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	27 Januari 2020
15	Noor Bayah	Pangkalan LPG 3 Kg	Tabanio Kec. Takisung	15/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	27 Januari 2020
16	Zainal Arifin	Pangkalan LPG 3 Kg	Muara Asam-Asam Jorong	16/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	27 Januari 2020
17	Sunardi	Pangkalan LPG 3 Kg	Damit Hulu Batu Ampar	17/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	27 Januari 2020
18	A. Yani, Skm/UPT. Puskes Tj Habulu	Pelayanan Kesehatan	Kec. Bajuin	18/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	28 Januari 2020
19	Noor Inayah	Swalayan/ Alfamart	Jl. Raya Takisung Rt. 05/02 Ranggang	19/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	30 Januari 2020
20	Sapto	Pangkalan LPG 3 Kg	Takisung	19.1/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	30 Januari 2020
21	Gunawan F	Gudang Besi Bekas	Nusa Indah Bati-Bati	20/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	4 Februari 2020
22	H. Ida	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Maluka Baulin RT.02/01 Kurau	21/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	4 Februari 2020
23	PT. Global Widya S	Perumahan MBR	Angsau karang Taruna	22/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	12 Februari 2020
24	PT. Meltazam Berkah Sejati	Perumahan MBR	Kelurahan Karang taruna	23/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	11 Februari 2020
25	Ramli	Pangkalan LPG 3 Kg	Ds. Kintap Jl. Pusaka RT. 4/01 Kintap	24/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	12 Februari 2020
26	Riskima	Pangkalan LPG 3 Kg	Ds. Kebun Raya Rt 5/2 Kintap	25/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	12 Februari 2020
27	Badri	Pangkalan LPG 3 Kg	Ds. Kintap Rt 3/01 Kec. Kintap	26/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	12 Februari 2020
28	Sabh	Pangkalan LPG 3 Kg	Ds. Mekar sari Kec. Kintap	27/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	12 Februari 2020
29	Amsah Ahla	Pangkalan LPG 3 Kg	Ds. Sumber Jaya RT. 02/01 Kec. Kintap	28/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	12 Februari 2020
30	Dua Putra jaya	Agen Daging Sapi Kemasan	Sarang halang RT. 29/08 Pelaihari	29/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	13 Februari 2020
31	Nur Ruhmansyah	Peternakan ayam Petelur	Jl. Bajun Raya RT. 06/03 Kec. Bajuin	30/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	17 Februari 2020
32	PT. Indonesia Multi p	Stasiun dan Menara Radar	Ds. Sungai Bakau RT 3/02 Kec. Kurau	31/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	17 februari 2020
33	PT. Aneka Makmur Jaya(Muchtar Hidayat Adan)	Agen LPG 3 Kg	Jl. Pasantren Sirajul Huda RT 09/04 Kec.Karang Taruna Pelaihari	32/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	18 Februari 2020
34	Pangkalan Wati	Pangkalan LPG 3 Kg	km 26 Rt 4/02 Riam Adungan	33/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	20 Februari 2020
35	Pangkalan Zaitun	Pangkalan LPG 3 Kg	Ds. Pulau Sari Kec. Tambang Ulang	34/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	20 Februari 2020
36	Klinik Kesehatan Kodim 1009 Pelaihari	Klinik Kesehatan	RT. 01/01 Kel. Angsau Kodim Pelaihari	35/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	26 Februari 2020
37	Secankir Kopi	Pangkalan LPG 3 Kg	JL. Kenanga Rt.07/04 Ds. Kintap Kec. Kintap	36/SPPL-TL/DPRKPLH/II/2020	26 Februari 2020
38	Akmad Husyani	Pangkalan LPG 3 Kg	Rt. 06/03 Ds. Kandangan Lama Panyipatan	37/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	02 Maret 2020
39	Pasha	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl. A.Yani km 148 RT.07/03 Ds. Muara Kintap	38/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	03 Maret 2020
40		Pabrik Pentol dan Tahu Bakso	Ds. Sungai Riam Kel. Pelaihari	39/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	05 Maret 2020
41	PT. Ariqa Mega Tama	Perumahan MBR Tipe 36	Jl. Banyu Hiranng Bentok Darat Kec. Bati-Bati	40/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	05 Maret 2020
42	CV. Pandawa Inti Perkasa	Pengumpul Minyak Jelantah	Tirta jaya-Bajuin	41/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	11 Maret 2020

43	Pangkalan Jahra Hm. Efendi	Pangkalan LPG	Gunung Makmur Rt. 06/03 Takisung	42/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	18 Maret 2020
44	Pangkalan Bulan an Umi Kalsum	Pangkalan LPG	Ds. Benua Lawas Kel. Takisung RT. 09/02	43/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	18 Maret 2020
45	CV. Indra Perkasa	Jasa Boga/ Catering	Sebamban Baru RT. 01/01 Kec. Kintap	44/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	19 Maret 2020
46	Bony Dramita/ CV. Tiga Berkah Utama	Service Station & General Supply	Sungai Baru Kec. Jorong	45/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	19 Maret 2020
47	Bengkel Las Malik/Ahmad	Bengkel Las Listrik	Jl. Benua Anyar Rt. 09/03 Kec. Bati-Bati	46/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	24 Maret 2020
48	Pangkalan Bastiah	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl. Raya Batakan Kandangan Baru	47/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	24 Maret 2020
49	Sazkia & Selvia	Pabrik Tahu	Jl. Setia Budi Rt. 07/02 Ds. Padang Kec. Bati-Bati	48/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	24 Maret 2020
50	Klinik Almeer Health Dental Care	Klinik Kesehatan	Komp Gagas Permai Jl. Kaka tua No 31 Kel. Angsau	49/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	26 Maret 2020
51	CV. Berkah Putra Putri H. Rusdiani	Alfamart	Jl. A.Yani Ds. Padang RT. 04/03 Kec. Bati-Bati	50/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	27 Maret 2020
52	Komari	Ayam Petelur	Ds. Pandan sari RT. 08/02 Kintap	51/SPPL-TL/DPRKPLH/III/2020	30 Maret 2020
53	Siti Jaleha	Pangkalan LPG 3 Kg	Ds. Galam RT.03/01 kec. bajuin	52/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	7 April 2020
54	PT. Tower Bersama	Manara Seluler	Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati	53/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	8 April 2020
55	BTS Daya Mintra Telekomunikasi	Manara Telekomunikasi	Desa Mekar Sari Kec. Kintap	54/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	20 April 2020
56	BTS Daya Mintra Telekomunikasi	Manara Telekomunikasi	Pandan Sari Kec. Kintap	55/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	20 April 2020
57	BTS Daya Mintra Telekomunikasi	Manara Telekomunikasi	Desa Karang Rejo Kec. Jorong	56/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	20 April 2020
58	BTS Daya Mintra Telekomunikasi	Manara Telekomunikasi	Desa sungai Rasau Kec. Bumi Makmur	57/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	20 April 2020
59	Poltek Negeri Tanah Laut	Klinik Kesehatan	Desa Panggung Kec. Pelaihari	58/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	33 Januari 2020
60	Sarah santi Novalina	Waterboom	Kel Sarang Halang RT. 6	59/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	12 Mei 2020
61	Li Raudah	Penggilingan Batu kapur	Desa Ujung baru Kec. Pelaihari	59/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	12 Mei 2020
62	Haderi	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Kali Besar Kec. Kurau	60/SPPL-TL/DPRKPLH/IV/2020	14 mei 2020
63	Divasa	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Ambungan Kec. Pelaihari	61/SPPL-TL/DPRKPLH/V/2020	29 Mei 2020
64	Haris	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari	62/SPPL-TL/DPRKPLH/V/2020	29 Mei 2020
65	Nabil	Pangkalan LPG 3 Kg	Kelurahan Pebahanan	63/SPPL-TL/DPRKPLH/V/2020	29 Mei 2020
66	Bidang Perkim	Kusus Nelayan	Desa Muara Kintap kec. Kintap	64/SPPL-TL/DPRKPLH/V/2020	29 Mei 2020
67	PT. Dayamitra telekomunikasi	BTS/ Menara Telekomunikasasi	Desa jorong Kec. Jorong	65/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	29 Mei 2020
68	Ramona Guest house	Perhotelan	Angsau Pelaihari	66/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	29 Mei 2020
69	PT. Cipta Milenia Resident	Perumahan MBR	JL. Bakti Karang Taruna Pelaihari	67/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	9 Juni 2020
70	PT. Trakindo utama	Gudang Spare Part/ Alat Berat	Desa sungai cuka Kec. Kintap	68/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	11 Juni 2020
71	PT. Dayamitra telekomunikasi	BTS/Menara Telekomunikasi	Desa Sumber Makmur Takisung	69/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	15 juni 2020
72	Puskesmas Kurau	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Desa Kurau Kec. Kurau	70/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	15 juni 2020
73	Puskesmas Tajau Pecah	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Desa Batu Ampar Kec. Batam	71/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	15 juni 2020
74	Maslih	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Handil Babirik Kec. Bumi makmur	72/SPPL-TL/DPRKPLH/VI/2020	19 Juni 2020

	Apotek Hanan Rahayu		Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang	76/SPPL- TL/DPRKPLH/VI/2020	
75		Apotek			24 Juni 2020
76	Tanpa Nama Badan Usaha	Pembuatan Pupuk Cair	Desa Telaga Kec. Pelaihari	77/SPPL- TL/DPRKPLH/VI/2020	24 Juni 2020
77	Taman Hijau Rindang	Wisata Alam	Desa Takisung Kec. Takisung	78/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	2 Juli 2020
78	Hanum Meubel	Pengrajin Kayu	Jl. Dahlia desa Kintap Kec. Kintap	79/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	8 Juli 2020
79	Indomart	Mini Market	Jl. Pancasila no.18 Rt 2/1 Kec. Pelaihari	80/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	7 Juli 2020
80	Mini market	Mini Market	Jl. A. Yani kel Angsau Kec. Pelaihari	81/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	14 Juli 2020
81	CV. Berkat Utama Bersama	Alfamart	Desa Ujung kec. Bati-Bati	82/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	15 Juli 2020
82	Pangkalan Berkat usaha	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Batu Tungku RT. 04/02	83/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	15 Juli 2020
83	Pangkalan Lesman Brahma	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati	84/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	15 Juli 2020
84	Sumber padi	Penggilingan Padi	Desa Hadil Babirik	85/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	15 Juli 2020
85	Apotek Berkah Farma	Apotek	Desa Kurau Kec. Kurau	86/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	15 Juli 2020
86	Kantor Kec. Takisung/ Yudo Restanto	Kantor		87/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	15 Juli 2020
87	Umi Spa	Baby Spa	Jl. Balirejo Kel Angsau Kec. Pelaihari	88/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	22 Juli 2020
88	Alfianor	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa sungai cuka Kec. Kintap	89/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	22 Juli 2020
89	PT. Infrestruktur Terbarukan Kusuma	Menara Penelitian Angin	Desa Galam Kec. Bajuin	90/SPPL- TL/DPRKPLH/VII/2020	28 Juli 2020
90	Sri Ani Rushartanti	Pangkalan LGPG 3 Kg	Jl. Nusantara Indah Kec. Bati- bati	91/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	26 Agustus 2020
91	Suryarti	Pabrik Tahu"Sumber Rejeki"	Desa ujung Kec. Bati-bati	92/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	26 Agustus 2020
92	Hormansyah	Bengkel Las "Horman"	Kec. Pelaihari	93/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	26 Agustus 2020
93	Noorhayati	Rumah Bilyar"Ibu"	Jl. Ambawang Kel. Karang Taruna, Pelaihari	94/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	26 Agustus 2020
94	Sugeng Susarto/Hartono/ Hadi Presetyo	PT. BIT Telekomunikasi Nusantara Pembangunan Selter (RBS Outdour)	Desa Takisung Kec. Takisung	95/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	26 Agustus 2020
95	Alfamart Tajau	PT. Sumber alfaria Trijaya, Tbk	Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	96/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	31 Agustus 2020
96	Alfamart Sungai Jelai	PT. Sumber alfaria Trijaya, Tbk	Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang	97/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	31 agustus 2020
97	Nurfa Farma	Apotek	Simpang Empat Sungai Baru Asam-asam	98/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	31 Agustus 2020
98	Anoor	Penggilingan Padi	Desa Tambak Karya Kec. Kurau	99/SPPL- TL/DPRKPLH/VIII/2020	31 Agustus 2020
99	Sumiati	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Telaga Kec. Pelaihari	100/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	15 September 2020
100	Gusti Rizali Anwar	Pertenakan Ayam potong	Desa Bajuin Kecamatan Bajuin	101/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	15 September 2020
101	PT. Aura Berlian Kalimantan	MBR Type 36	Jl Alfatah, Kelurahan Karang taruna	102/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	16 September 2020
102	Arpani	Penggilingan Padi Mufti	Desa Pandahan Kec. Bati-Bati	103/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	22 September 2020
103	Rafika Cahaya Fitriani	Showroom 3 M dan Cafe Tepi Jalan	Kel. Sarang halang Kec. Pelaihari	104/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	22 September 2020
104	DPRKPLH/Perkim/Diansyah	Perumahan Masyarakat Korban Agrasi	Desa Muara Mintap Kec. Kintap	105/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	23 September 2020
105	Hotel Harapan Indah	Jasa Perhotelan	Kh. Mansyur Kelurahan Angsau	106/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	30 september 2020
106	Zainal Arifin	Penggilingan padi	Desa Handil Babirik Kec. Bumi makmur	107/SPPL- TL/DPRKPLH/IX/2020	30 september 2020
107	Siti Rahmah	Pangkalan LPG 3 Kg	Kait-Kait Kec. Bati- Bati	108/SPPL- TL/DPRKPLH/X/2020	5 Oktober 2020

108	Anwar Abidin	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur	109/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	5 Oktober 2020
109	Muhammad Syadikin	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl Swadaya kec. Kurau	110/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	5 Oktober 2020
110	Reski Amelia	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Sungai Riam Pelaihari	111/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	5 Oktober 2020
111	Norfiadi/ PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi	Desa sungai cuka Kec. Kintap	112/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	7 Oktober 2020
112	Alpianoor/UD. Borneo Putra	Penggergajian Kayu	Desa Karang Rejo, Jorong	113/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	20 Oktober 2020
113	PT. Pungung Raya/ Robby Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit Bidang A4	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	114/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	26 Oktober 2020
114	PT. Pungung Raya/ Robby Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit Bidang A5	Jl. S.d.a	115/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	26 Oktober 2020
115	PT. Pungung Raya/ Robby Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit Bidang A6	Jl. S.d.a	116/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	26 Oktober 2020
116	PT. Pungung Raya/ Robby Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit Bidang A 7	Jl. S.d.a	117/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	26 Oktober 2020
117	PT. Pungung Raya/ Robby Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit Bidang A8	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	118/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	26 Oktober 2020
118	PT. Pungung Raya/ Robby Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit Bidang A9	s.d.a	119/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	26 Oktober 2020
119	PT. Pungung Raya/ Robby Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit Bidang A 10	s.d.a	120/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	26 Oktober 2020
120	Klinik Kesehatan Pratama Aulia	Klinik Kesehatan	Desa Padang Kec. Bati-Bati	121/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	27 Oktober 2020
121	Mebel Yadi	Industri Mebel Rumah tangga	Desa Damit Hulu Kec. Batu Ampar	122/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	27 Oktober 2020
122	Apotek	Apotek	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	123/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	27 Oktober 2020
123	Puskesmas Kintap	Puskesmas	Jl. A. Yani No. 35 Desa Kintapura	124/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	27 Oktober 2020
124	Sumber Rejeki	Pabrik Tahu	Desa Ujung kec. Bati-Bati	125/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	27 Oktober 2020
125	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Tanjung 3 Desa tanjung	126/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
126	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN 3 Asam-Asam Kec. Jorong	127/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
127	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN 4 Asam-Asam Kec. Jorong	128/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
128	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SMP 7 Tirta Jaya Kec. Bajuin	129/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
129	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Jilatan Kec. Batu Ampar	130/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
130	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Riam Pinang Kec. Bajuin	131/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
131	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pemasangan Paving Blok	SDN Jorong 2 Kec. Jorong	132/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
132	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Jl. Poros Batalang Kec. Jorong	133/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
133	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Poros Batu Ampar	134/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
134	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Poros Tajau Mulya	135/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
135	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Gunung Mas Kec. Pelaihari	136/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
136	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Desa Bumi Asih Kec. Batu Ampar	137/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
137	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Desa Benua Tengah Kec. Takisung	138/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
138	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Jl. Beramban Rt. 21/7 Kec. Pelaihari	139/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
139	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	JL. Keramat Rt 7 Kec. Pelaihari	140/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
140	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Desa Benua Tengah Kec. Takisung	141/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
141	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Drainase	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	142/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
142	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Nusa Indah Kec. Bati-Bati	143/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
143	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Tabanio 3 Kec. Takisung	144/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
144	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Paving Blok	SDN Damit 1 Kec. Batu Ampar	145/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020

145	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Lap. Voly dan Taman Kantor	Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar	146/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
146	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Kunyit Desa Kunyit	147/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
147	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Paving Blok	SDN Ambawang Kec. Batu Ampar	148/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
148	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Gedung Serbaguna	Dusun III Desa Kintap Kec. kintap	149/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
149	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Bentok Darat 1 Kec. Bati-Bati	150/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
150	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Liang Anggang Desa Liang Anggang	151/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
151	DPUPRP Kab Tanah Laut	Rehabilitas Rumah dinas gol II Type A	JL.Hutan Kota Kel. Angsau	152/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
152	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Gedung	Kec. Bumi Makmur	153/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
153	DPUPRP Kab Tanah Laut	Rehabilitas Rumah dinas gol II Type A	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	154/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
154	Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	Dusun Rejo sari Rt. 03/07 Desa Bumi Asih	155/SPPL-TL/DPRKPLH/X/2020	28 Oktober 2020
155	Ahmat	Penggilingan Padi	Martadah Kec. Tambang ulang	165/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	3 November 2020
156	Wisata Mahoni	Wisata Alam	Desa Padang Kec. Bati-Bati	166/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	6 November 2020
157	PT. Anugerah Cahaya Alam	Perumahan MBR	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	167/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	6 November 2020
158	PT. Indomarco Prismatama	Indomaret	Kec. Bati-Bati	168/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	18 November 2020
159	PT. Indomarco Prismatama	Indomaret	Kec. Jorong	169/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	18 November 2020
160	PT. Indomarco Prismatama	Indomaret	Kec. Kintap km 150	170/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	18 November 2020
161	PT. Indomarco Prismatama	Indomaret	Kec. Kintap Km 102	171/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	18 November 2020
162	Aulia Rahman	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Benua lawas Kec. Takisung	172/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	19 November 2020
163	Toko Obat Desy	Toko Obat	Desa Pemuda Kec. Pelaihari	173/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	19 November 2020
164	Mashadi	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati	174/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	19 November 2020
165	Ariati Priatmi	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Ketapang Kec. Bajuin	175/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	19 November 2020
166	h. Chairan	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Ujung baru Kec. Bati-Bati	176/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	19 November 2020
167	Cv. Tiga Putra Kasatria	Alfamart	Desa Angsau Kec. Angsau	177/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	20 November 2020
168	Slep Padi GPL	Penggilingan Padi	Desa Mekar Sari Kec. Kintap	178/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	26 November 2020
169	Peternakan Ayam Pedaging	Ayam Pedaging	Desa Batakan Kec. Panyipatan	179/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	26 November 2020
170	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Paving Blok	SMP 1 Panyipatan Kec. Panyipatan	180/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
171	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Pagar	SDN Ranggung Kec. Takisung	181/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
172	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Paving Blok	SDN 1 Muara Kintap	182/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
173	DPUPRP Kab Tanah Laut	Pembangunan Paving Blok	SDN Tabanio Kec. Takisung	183/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
174	DPUPRP	Pembangunan Pagar	SDN Sungai Bakar Kec. Bajuin	184/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
175	DPUPRP	Pembangunan Pagar	SDN Tabanio Kec. Takisung	185/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
176	DPUPRP	Pembangunan Paving Blok	SMPN 3 Desa Muara Kintap	186/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
177	DPUPRP	Pembangunan Paving Blok	SMPN 5 Pelaihari	187/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
178	DPUPRP	Pembangunan Paving Blok	SDN 2 Kunyit Kec, bajuin	188/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
179	DPUPRP	Pembangunan Pagar	SDN Pagatan Besar Kec, Takisung	189/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
180	DPUPRP	Rehab Mushalla Bappeda	JI Ahmad syairani Komp.Perkantoran gases	190/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
181	DPUPRP 191	Pembangunan Pagar Wisata Bajuin	Air Terjun Bajuin	191/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020

182	DPUPRP	Pembangunan Gedung Arsip BPKAD	Perkantoran Gagas Pelaihari	192/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
183	DPUPRP	Pembangunan/ Rehab gedung bid. Bina Marga	Pelaihari	193/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
184	DPUPRP	Pembangunan Paving Blok	Desa Beluru Kec. Batu Ampar	194/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
185	DPUPRP	Pembangunan Pagar SDN 2 Pulau Sari	Desa Pulau sari	195/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
186	DPUPRP	Pembangunan Pagar SMP 5 Bati-Bati	Desa Bentok Darat Bati-Bati	196/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
187	DPUPRP	Pembangunan Pavi blok SDN 1 Pulau Sari	Desa Pulau sari Kec. Tambang Ulang	197/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
188	DPUPRP	Rehab Rumah Dinas SDN 1 jorong	Desa jorong Kec. Jorong	198/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
189	DPUPRP	Pembangunan Paving Blok	Desa Pantai Linuh Kec. Batu Ampar	199/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
190	DPUPRP	Pembangunan Pagar SDN 2 Tabanio	Desa tabanio Kec. Takisung	200/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
191	DPUPRP	Pembangunan Paving blok SDN 1 Tabanio	Desa tabanio Kec. Takisung	201/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
192	DPUPRP	Pembangunan Paving Blok SDN Atu-atu Pelaihari	Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari	202/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
193	DPUPRP	Pembangunan Paving Blok SDN Kunyit Kec. Bajuin	Desa Kunyit Kec. Bajuin	203/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
194	DPUPRP 204	Pembangunan Pagar SDN 2 Tebing Siring	Desa Tebing Siring Kec. Bajuin	204/SPPL-TL/DPRKPLH/XI/2020	30 November 2020
195	Siddiq Fathoni	Pangkalan LPG 3 Kg	Bati-Bati	205/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	4 Desember 2020
196	Achma	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Nusa Indah Kec. Bati-bati	206/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
197	Pangkalan Purnama	Pangkalan LPG 3 Kg	Panggung Kec. Pelaihari	207/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
198	CV. Sido Lancar	Bengkel Las	Desa damit Kec. Batu Ampar	208/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
199	Eka Sri Pratiwi	Pangkalan LPG 3 Kg	Komplek Kijang Mas Kec. Pelaihari	209/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
200	Sarang Burung Walet/ H. Ponimin	Sarang Burung Walet	Desa bajuin Kec. Bajuin	210/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
201	PT. Bit Tel. Nusantara	Pembangunan Shelter RBS Ourder	Desa Takisung Kec. Takisung	211/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
202	PT. Sinar Alam Angkasa Mandiri	MBR Type 36 m ²	Desa simpang empat sungai Baru	212/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
203	Trio Motor Pelaihari	Penjualan dan Bengkel Motor	Desa Asam-Asam Kec. Jorong	213/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
204	Ahmad Safitri	Pangkalan LPG 3 Kg		214/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	14 Desember 2020
205	DPUPRP			215/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	4 Desember 2020
206	DPUPRP			216/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	4 Desember 2020
207	DPUPRP			217/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	4 Desember 2020
208	DPUPRP			218/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	4 Desember 2020
209	DPUPRP			219/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	4 Desember 2020
210	PT. Berkah Tanjung Mandiri	MBR Type 36	Jl. Mangga Besar	220/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	18 Desember 2020
211	Sarbandi	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa suka Maju Rt. 10 Sabuhur jorong	221/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
212	Dashari	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Kandangan Lama Jl. Pendidikan	222/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
213	Bahrani	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Pandan Sari Kec. Kintap	223/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
214	Sholihin N	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Kintap Kec. Kintap	224/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
215	Hastini	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl. A. Yani Kec. Jorong	225/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
216	Mahlan	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl.Raya Takisung Kec. Takisung	226/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020

217	Reysa Azizah	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Pagatan Besar Kec. Takisung	227/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
218	Arifin	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Kintapura Kec. Kintap	228/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
219	Hj. Suryani	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl. Ayani Kel. Sarang halang Pelaihari	229/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
220	Musdianto	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar	230/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
221	Budi bersama	Pembuatan Es Balok	Desa Takisung Kec. Takisung	231/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
222	Junaidi	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl. A. Yani Desa asam-Asam Kec. Jorong	232/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	22 Desember 2020
223	Erwin	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	233/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	28 Desember 2020
224	Samiasih	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar	234/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	28 Desember 2020
225	Rayyan	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl. Perintis Tengah Kel. Pelaihari kec. Pelaihari	235/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	28 Desember 2020
226	Norlaila	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari	236/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	28 Desember 2020
227	Fatimah	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Bajuin Kec. Bajuin	237/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	28 Desember 2020
228	Rusnawati	Pangkalan LPG 3 Kg	Jl. A. Yani Desa Jorong Kec. Jorong	238/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	28 Desember 2020
229	Chairul Anwar	Pangkalan LPG 3 Kg	Desa Panggung Kec. Pelaihari	239/SPPL-TL/DPRKPLH/XII/2020	28 Desember 2020

3.g. Kepala UPT Laboratorium

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pada Tahun Anggaran 2020, UPT Laboratorium Lingkungan memiliki program tersendiri sehingga untuk mekanisme pembayaran dilakukan terpisah dari program-program lain di lingkup DPRKPLH.

Penganggaran UPT Laboratorium terdapat pada Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3) melalui Kegiatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan dan Kegiatan Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan.

Kegiatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan berkaitan dengan kegiatan kerumahtangaan dan administrasi laboratorium. Melalui kegiatan ini prasarana laboratorium yang menunjang proses pengujian sampel diadakan seperti alat tulis kantor, bahan pembersih, masker dan handscoon. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor juga rutin dilakukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan administrasi laboratorium. Disebabkan adanya pandemic covid-19, diadakan refocusing anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan sebesar 55,89% dari Rp.300.000.000,00 menjadi Rp. 132.334.400 dengan mengurangi belanja pada beberapa kode rekening dan menghapuskan beberapa rekening di antaranya rekening penggandaan, penjilidan dan belanja modal pembangunan ruang uji.

Namun, pada anggaran perubahan, kegiatan ini mendapatkan tambahan pagu menjadi Rp. 469.334.400,00 untuk pembelian alat laboratorium berupa aquadestilator dan alat laboratorium udara, bahan kimia, alat ukur, lemari pendingin

sampel serta konsultasi perencanaan pembangunan gedung laboratorium yang baru.

Sedangkan untuk Kegiatan Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan yang merupakan kegiatan inti di laboratorium telah dihasilkan sebagai berikut :

1. Melakukan pelayan dan pengujian laboratorium lingkungan

Jumlah sampel yang dilayani laboratorium sesuai SOP sebanyak 416 sampel , atau mencapai 118,56% dari target 350 sampel. Pelayanan dan pengujian di laboratorium lingkungan sesuai dengan Perbup Nomor 151 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan.

2. Melakukan pengadaan peralatan dan bahan laboratorium

Pengadaan peralatan dan bahan laboratorium pada tahun 2020 berupa pemilihan langsung untuk bahan kimia dan tender spektrofotometer terealisasi 100%. Sedangkan untuk alat ukur termasuk rekening yang dipangkas karena refocusing.

3. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium

Pemeliharaan peralatan laboratorium ini berupa belanja kalibrasi yang dilakukan rutin karena merupakan kewajiban sebuah laboratorium. Pada tahun 2020, dilakukan kalibrasi terhadap 20 jenis alat yang terdiri dari 75 item. Jadwal kalibrasi pada triwulan dua bulan Juni.

4. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia laboratorium

Personel laboratorium berjumlah 12 orang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi yang diperlukan di laboratorium. Sehubungan dengan adanya pandemic, pelatihan selama tahun 2020 diulakukan melalui webinar dan zoom meeting.

5. Melakukan penarikan retribusi jasa uji laboratorium

Retribusi uji laboratorium lingkungan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 155.750.000,00 dari target Rp. 150.000.000,00, atau mencapai 103,83 %. Sosialisasi yang dilakukan laboratorium pada awal tahun 2020 sebelum pembatasan karena pandemi covid-19, disertai surat edaran dari Bupati Tanah Laut yang menghimbau pengujian di UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut membawa hasil berupa datangnya pelanggan baru untuk menguji sampelnya di laboratorium sehingga berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 target Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut tidak terlepas tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kinerja laboratorium yang senantiasa

mengutamakan pelayanan maksimal kepada seluruh calon pelanggan yang menggunakan jasa laboratorium lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut. Namun pada tahun 2020, terdapat beberapa sasaran strategis UPT Laboratorium Lingkungan yang tidak terpenuhi yang dijabarkan pada tabel I berikut ini:

No .	Uraian Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
1	Mengikuti Uji Profesiensi	17 Parameter	Seluruh Parameter <i>Satisfactory</i>	Tidak terpenuhi	Dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Keputusan Kedua Huruf b tertulis “Rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja.
2	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia personel laboratorium	Seluruh personel Laboratorium	3 (tiga) Pelatihan	Tidak terpenuhi	Dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Keputusan Kedua Huruf b tertulis “Rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja.

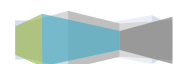
Dengan tidak tercapainya sasaran strategis tersebut, sangat menghambat laju perkembangan laboratorium, yang korelasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji profesiensi merupakan salah satu elemen kunci untuk menjamin kualitas suatu produk atau jasa supaya kualitas pengujian laboratorium mendapatkan pengakuan yang berlaku nasional dan internasional.

Uji profesiensi memungkinkan laboratorium memonitor hasil ujinya dari waktu ke waktu. Tren hasil pengujian dalam suatu jangka waktu yang cukup lama dapat diketahui sehingga bila ada penyimpangan yang terjadi dapat segera dipikirkan tindakan perbaikannya. Biasanya dalam penyelenggaraan uji profesiensi, penyelenggara mendistribusikan suatu material yang homogen ke masing-masing peserta. Material/contoh uji yang diujikan adalah yang semirip mungkin dengan yang biasanya dianalisis oleh masing-masing laboratorium sehingga dapat merepresentasikan kemampuan masing-masing laboratorium untuk bekerja di kondisi rutin. Laboratorium peserta kemudian menganalisis material tersebut dengan kondisi tertentu dan melaporkan hasilnya kepada penyelenggara. Penyelenggara kemudian mengumpulkan seluruh hasil dari seluruh peserta dan menginformasikan hasil kepada seluruh peserta, biasanya dalam bentuk nilai yang menunjukkan korelasi/hubungan terhadap akurasi hasil. Seluruh hasil pengujian pasti tidak akan terlepas dari adanya error atau galat. Error disini bukanlah suatu kesalahan yang disengaja melainkan kesalahan yang tak dapat dihindari baik pada prosedur pengujian di fisika maupun kimia. Dengan mengikuti kegiatan uji profesiensi akan terlihat apakah hasil uji suatu laboratorium akurat, memuaskan atau dapat diterima.

Adapun tujuan utama dilakukannya uji profesiensi adalah untuk menyediakan perangkat jaminan mutu bagi laboratorium – laboratorium dalam membandingkan kinerja suatu laboratorium terhadap laboratorium lain yang sejenis, sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan bila ada ketidaksesuaian. Uji profesiensi ini didesain sebagai peringatan bahwa suatu laboratorium sudah harus memodifikasi prosedurnya.

2. Tidak tercapainya target dari Peningkatan SDM laboratorium sangat berdampak kepada laboratorium, mengingat laboratorium sedang menuju proses akreditasi untuk parameter udara dan penambahan parameter air. Apabila akreditasi



parameter-parameter tersebut tidak segera terealisasi, maka berdampak terhadap menurunnya jumlah pelanggan yang berakibat langsung terhadap penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPT Laboratorium

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Indikator Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	350 sampel	416 sampel	118,85%
2.	Sasaran Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Indikator Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	11 jenis	11 jenis	100%
3.	Sasaran Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Indikator Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	20 jenis	20 jenis	100%
4.	Sasaran Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Indikator Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12 orang	12 orang	100%
5.	Sasaran Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Indikator Jumlah retribusi jasa uji Lab	Rp.150.000.000	Rp 155.750.000	103,83%



Tabel Perbandingan Kinerja Kepala UPT Laboratorium 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	150 sampel	97 sampel	180 sampel	350 sampel	416 sampel	118,85%
2	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	0	3 Jenis	16 jenis	11 jenis	11 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan	0	25 jenis	27 jenis	20 jenis	20 jenis	100%
4	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	0	11 orang	11 orang	12 orang	12 orang	100%
5	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Jumlah retribusi jasa uji Lab	Rp. 40.026.000	Rp. 73.861.500	Rp. 81.280.000	Rp. 150.000.000	Rp. 155.750.000	103,83%



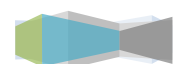
Pada tahun 2020 sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium yaitu :

3. Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan dengan indikator Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 118,85%
4. Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB dengan indikator Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 100%
5. Melakukan pemeliharaan peralatan LAB dengan indikator Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 100%
6. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab. capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 100%
7. Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab dengan indikator Jumlah retribusi jasa uji Lab capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 13,83%%

Untuk mendukung sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini didukung oleh Kepala TU Laboratorium dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kepala TU Laboratorium

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium DPRKLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan melalui Program Tata Lingkungan dengan kegiatan Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Ka TU Laboratorium dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Ka TU Laboratorium didukung 1 orang PNS dan 9 orang PTT



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala TU Laboratorium

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan pelayanan penatausahaan LAB	Indikator Jumlah pelayanan penatausahaan LAB yang di layani sesuai SOP	2 jenis	2 jenis	100%
2.	Sasaran Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Indikator Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi	19 jenis	19 jenis	100%
3.	Sasaran Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Indikator Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis	5 jenis	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kepala TU Laboratorium 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2020		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pelayanan penatausahaan LAB	Jumlah pelayanan penatausahaan LAB yang di layani sesuai SOP	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%
2	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi	7 jenis	10 jenis	15 jenis	19 jenis	19 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis	5 jenis	6 jenis	5 jenis	5 jenis	100%

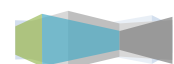




B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi APBD 2020 pada DPRKLH Kabupaten Tanah Laut

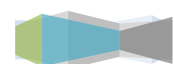
KODE	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.04 . 1.04.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.890.157.169,00	5.834.314.726,00	99,05	55.842.443,00
1.04 . 1.04.01.01 . 01.01	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	303.951.946,00	283.253.848,00	93,19	20.698.098,00
1.04 . 1.04.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	31.972.400,00	29.898.650,00	93,51	2.073.750,00
1.04 . 1.04.01.01 . 01.03	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	5.554.232.823,00	5.521.162.228,00	99,40	33.070.595,00
1.04 . 1.04.01.01 . 02	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	686.172.307,00	534.356.565,00	77,87	151.815.742,00
1.04 . 1.04.01.01 . 02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	247.547.300,00	238.387.000,00	96,30	9.160.300,00
1.04 . 1.04.01.01 . 02.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	438.625.007,00	295.969.565,00	67,48	142.655.442,00
1.04 . 1.04.01.01 . 02.04	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01.01 . 02.05	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01.01 . 02.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01.01 . 03	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	19.995.600,00	0,00	0,00	19.995.600,00
1.04 . 1.04.01.01 . 03.04	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	19.995.600,00	0,00	0,00	19.995.600,00
1.04 . 1.04.01.01 . 15	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.679.195.350,00	2.442.025.650,00	91,15	237.169.700,00
1.04 . 1.04.01.01 . 15.09	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	853.000.000,00	632.491.200,00	74,15	220.508.800,00
1.04 . 1.04.01.01 . 15.10	Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.700.000.000,00	1.683.359.400,00	99,02	16.640.600,00
1.04 . 1.04.01.01 . 15.11	Peningkatan Rumah Sederhana (DAK PENUNJANG)	126.195.350,00	126.175.050,00	99,98	20.300,00
2.05 . 1.04.01.01 . 15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	330.940.375,00	324.325.900,00	98,00	6.614.475,00
2.05 . 1.04.01.01 . 15.14	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	130.932.800,00	126.818.200,00	96,86	4.114.600,00
2.05 . 1.04.01.01 . 15.15	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	61.107.750,00	59.327.500,00	97,09	1.780.250,00
2.05 . 1.04.01.01 . 15.16	Pemantauan Kualitas Lingkungan	138.899.825,00	138.180.200,00	99,48	719.625,00
2.05 . 1.04.01.01 . 16	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	226.074.700,00	211.520.041,00	93,56	14.554.659,00
2.05 . 1.04.01.01 . 16.25	Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan	72.429.700,00	72.379.600,00	99,93	50.100,00
2.05 . 1.04.01.01 . 16.26	Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	49.495.000,00	41.345.591,00	83,53	8.149.409,00
2.05 . 1.04.01.01 . 16.27	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	104.150.000,00	97.794.850,00	93,90	6.355.150,00



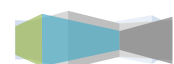
2.05 . 1.04.01.01 . 17	Program Tata Lingkungan	283.699.550,00	272.881.274,00	96,19	10.818.276,00
2.05 . 1.04.01.01 . 17.17	Verifikasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan dan/ atau usaha	52.319.200,00	51.889.100,00	99,18	430.100,00
2.05 . 1.04.01.01 . 17.18	Inventarisasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	87.425.000,00	81.187.700,00	92,87	6.237.300,00
2.05 . 1.04.01.01 . 17.19	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	55.558.250,00	51.407.474,00	92,53	4.150.776,00
2.05 . 1.04.01.01 . 17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	88.397.100,00	88.397.000,00	100,00	100,00
2.05 . 1.04.01.01 . 18	Program Tata Kota dan Kebersihan	20.322.983.973,00	18.308.972.497,00	90,09	2.014.011.476,00
2.05 . 1.04.01.01 . 18.09	Penerangan Jalan Umum	12.041.655.800,00	11.740.701.077,00	97,50	300.954.723,00
2.05 . 1.04.01.01 . 18.10	Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	1.217.480.000,00	1.113.487.870,00	91,46	103.992.130,00
2.05 . 1.04.01.01 . 18.11	Kebersihan dan Limbah	7.063.848.173,00	5.454.783.550,00	77,22	1.609.064.623,00
2.05 . 1.04.01.02 . 19	Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)	1.233.346.400,00	1.185.120.741,00	96,09	48.225.659,00
2.05 . 1.04.01.02 . 19.06	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	769.334.400,00	734.399.941,00	95,46	34.934.459,00
2.05 . 1.04.01.02 . 19.07	Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan	464.012.000,00	450.720.800,00	97,14	13.291.200,00
4.03 . 1.04.01.01 . 15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	129.683.300,00	120.978.500,00	93,29	8.704.800,00
4.03 . 1.04.01.01 . 15.06	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	22.499.600,00	19.894.000,00	88,42	2.605.600,00
4.03 . 1.04.01.01 . 15.07	Penyusunan laporan keuangan	84.686.600,00	80.124.300,00	94,61	4.562.300,00
4.03 . 1.04.01.01 . 15.08	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	22.497.100,00	20.960.200,00	93,17	1.536.900,00
JUMLAH		31.802.248.724,00	29.234.495.894,00	91,93	2.567.752.830,00

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

SASARAN STRATEGIS	KODE	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN)	ANGGARAN	REALISASI	%
	1.04 . 1.04.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.890.157.169,00	5.834.314.726,00	99,05
Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	1.04 . 1.04.01.01 . 01.01	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	303.951.946,00	283.253.848,00	93,19
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	1.04 . 1.04.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	31.972.400,00	29.898.650,00	93,51
	1.04 . 1.04.01.01 . 01.03	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	5.554.232.823,00	5.521.162.228,00	99,40



	1.04 . 1.04.01.01 . 02	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	686.172.307,00	534.356.565,00	77,87
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	1.04 . 1.04.01.01 . 02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	247.547.300,00	238.387.000,00	96,30
	1.04 . 1.04.01.01 . 02.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	438.625.007,00	295.969.565,00	67,48
	1.04 . 1.04.01.01 . 02.04	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	0,00	0,00	0,00
Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	1.04 . 1.04.01.01 . 02.05	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00	0,00	0,00
	1.04 . 1.04.01.01 . 02.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00
	1.04 . 1.04.01.01 . 03	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	19.995.600,00	0,00	0,00
	1.04 . 1.04.01.01 . 03.04	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	19.995.600,00	0,00	0,00
	1.04 . 1.04.01.01 . 15	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.679.195.350,00	2.442.025.650,00	91,15
Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas PSU	1.04 . 1.04.01.01 . 15.09	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	853.000.000,00	632.491.200,00	74,15
Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.04 . 1.04.01.01 . 15.10	Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.700.000.000,00	1.683.359.400,00	99,02
Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana	1.04 . 1.04.01.01 . 15.11	Peningkatan Rumah Sederhana (DAK PENUNJANG)	126.195.350,00	126.175.050,00	99,98
	2.05 . 1.04.01.01 . 15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	330.940.375,00	324.325.900,00	98,00
Meningkatnya pengendalian pencemaran	2.05 . 1.04.01.01 . 15.14	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	130.932.800,00	126.818.200,00	96,86
	2.05 . 1.04.01.01 . 15.15	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	61.107.750,00	59.327.500,00	97,09



dan perusahaan lingkungan hidup	2.05 . 1.04.01.01 . 15.16	Pemantauan Kualitas Lingkungan	138.899.825,00	138.180.200,00	99,48
	2.05 . 1.04.01.01 . 16	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	226.074.700,00	211.520.041,00	93,56
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	2.05 . 1.04.01.01 . 16.25	Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan	72.429.700,00	72.379.600,00	99,93
Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	2.05 . 1.04.01.01 . 16.26	Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	49.495.000,00	41.345.591,00	83,53
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	2.05 . 1.04.01.01 . 16.27	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	104.150.000,00	97.794.850,00	93,90
	2.05 . 1.04.01.01 . 17	Program Tata Lingkungan	283.699.550,00	272.881.274,00	96,19
Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	2.05 . 1.04.01.01 . 17.17	Verifikasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan dan/ atau usaha	52.319.200,00	51.889.100,00	99,18
	2.05 . 1.04.01.01 . 17.18	Inventarisasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	87.425.000,00	81.187.700,00	92,87
	2.05 . 1.04.01.01 . 17.19	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	55.558.250,00	51.407.474,00	92,53
	2.05 . 1.04.01.01 . 17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	88.397.100,00	88.397.000,00	100,00
	2.05 . 1.04.01.01 . 18	Program Tata Kota dan Kebersihan	20.322.983.973,00	18.308.972.497,00	90,09
Meningkatnya penyebaran jaringan PJU	2.05 . 1.04.01.01 . 18.09	Penerangan Jalan Umum	12.041.655.800,00	11.740.701.077,00	97,50



(Penerangan Jalan Umum)					
Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	2.05 : 1.04.01.01 : 18.10	Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	1.217.480.000,00	1.113.487.870,00	91,46
	2.05 : 1.04.01.01 : 18.11	Kebersihan dan Limbah	7.063.848.173,00	5.454.783.550,00	77,22
	2.05 : 1.04.01.02 : 19	Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)	1.233.346.400,00	1.185.120.741,00	96,09
	2.05 : 1.04.01.02 : 19.06	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	769.334.400,00	734.399.941,00	95,46
	2.05 : 1.04.01.02 : 19.07	Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan	464.012.000,00	450.720.800,00	97,14
	4.03 : 1.04.01.01 : 15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	129.683.300,00	120.978.500,00	93,29
Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	4.03 : 1.04.01.01 : 15.06	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	22.499.600,00	19.894.000,00	88,42
	4.03 : 1.04.01.01 : 15.07	Penyusunan laporan keuangan	84.686.600,00	80.124.300,00	94,61
	4.03 : 1.04.01.01 : 15.08	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	22.497.100,00	20.960.200,00	93,17
	JUMLAH		31.802.248.724,00	29.234.495.894,00	91,93

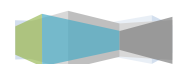
No	SASARAN STRATEGIS	IK SARGIS	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	Kepala Dinas				
		Indeks kualitas air	Kepala Dinas				
		Indeks kualitas udara ambient	Kepala Dinas				
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	Kepala Dinas				



		Persentase RTH yang terbangun	Kepala Dinas				
2	Meningkatkan kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	Kepala Dinas				
3	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	104.150.000		
4	Meningkatkan Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas PSU	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman	853.000.000		
5	Meningkatkan penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	Program Tata Kota dan Kebersihan	Penerangan Jalan Umum	12.041.655.800		



6	Meningkatkan Kebersihan, dan Keindahan	1. Presentase sarana prasarana kebersihan sesuai standar 2. Presentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	Program tata kota dan kebersihan	Kebersihan dan Limbah	7.063.848.173		
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	Program tata kota dan kebersihan	Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	1.217.480.000		
7	Meningkatkan wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	Program Tata Lingkungan	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	88.397.100		
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	Program Tata Lingkungan	Inventarisasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	87.425.000		
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	Program Tata Lingkungan	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	55.558.250		



			Program Tata Lingkungan	Verifikasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan dan/atau usaha	52.319.200		
8	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	49.495.000		
9	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan	72.429.700		
10	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas lingkungan	138.899.825		



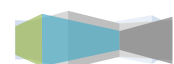
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	130.932.800		
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian kerusakan lingkungan	61.107.750		
11	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Program penanganan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman	1.700.000.000		
12	Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana	Program penanganan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Peningkatan rumah sederhana (DAK PENUNJANG)	126.195.350		



13	Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	22.497.100		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	22.499.600		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	84.686.600		



14	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	247.547.300		
		Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	31.972.400		
		Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	5.554.232.823		
		Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemeliharaan Saranan dan prasarana perkantoran	438.625.007		
		Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehabilitas sedang/ berat gedung kantor	-		



15	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya adminitrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarna Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kemampuan teknis aparatur	-		
		Persentase terkelolanya adminitrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarna Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		
		Persentase terkelolanya adminitrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	Program penyebaran informasi pembangunan dan pelayanan SKPD	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	19.995.600		
		Persentase terkelolanya adminitrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	303.951.946		
		JUMLAH					



Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2019

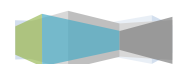
No	2020				2019			
	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	303.951.946	283.253.848	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan	176.483.550	170.895.300
		Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	31.972.400	29.898.650		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan	2.339.523.750	2.306.900.150
		Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	5.554.232.823	5.521.162.228	Program peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota	Pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum	12.610.596.600	10.213.064.779
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	247.547.300,00	238.387.000,00		Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota	1.330.430.844	1.149.501.700
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	438.625.007,00	295.969.565,00	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	159.500.000	109.706.975



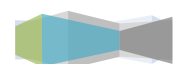
		Perkantoran					
		Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	0,00	0,00		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	69.127.915 60.862.000
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00	0,00		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	568.595.833 152.738.746
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	0,00		Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.445.000 51.280.000
3	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	19.995.600,00	0,00		Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.880.000 14.017.800
4	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	853.000.000,00	632.491.200,00		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	29.250.000 17.236.200



	n Permukiman	Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.700.000.000,00	1.683.359.400,00		
		Peningkatan Rumah Sederhana (DAK PENUNJANG)	126.195.350,00	126.175.050,00		
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	130.932.800,00	126.818.200,00	Penyediaan alat tulis kantor	51.266.600 48.814.500
		Pengendalian Kerusakan Lingkungan	61.107.750,00	59.327.500,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.250.000 22.232.300
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	138.899.825,00	138.180.200,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.529.500 12.461.000
					Penyediaan makanan dan minuman	50.736.000 37.400.000
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	680.000.000 663.552.539
6	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum	72.429.700,00	72.379.600,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	27.000.000 25.800.000



		Lingkun gan						
		Pengel olaan Pengad uan dan Penyel esaian Sengke ta Lingkun gan Hidup	49.495.000,0 0	41.345.591, 00		Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	5.311.6 86.244	5.198.9 37.381
		Pening katan Peran Serta Masyar akat Dalam Pengen dalian Lingkun gan Hidup	104.150.000, 00	97.794.850, 00	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23.424. 700	18.385. 000
7	Program Tata Lingkun gan	Verifika si Izin Perlind ungan dan Pengel olaan Lingkun gan Hidup untuk Kegiata n dan/ atau usaha	52.319.200,0 0	51.889.100, 00		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	22.500. 000	21.720. 800
		Invent arisi data dan Inform	87.425.000,0 0	81.187.700, 00	Program Pengembanga n Perumahan	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	269.963 .750	257.419 .650



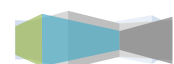
		asi Lingku ngan Hidup						
		Pence gahan Dampa k Lingku ngan Usaha dan Kegiat an	55.558.250,0 0	51.407.474, 00	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan rumah sederhana	99.591. 050	91.878. 750
		Pengen dalian Dampa k Peruba han Iklim	88.397.100,0 0	88.397.000, 00		Peningkatan rumah sederhana (DAK)	148.750 .000	133.959 .800
8	Progra m Tata Kota dan Kebersi han	Penera ngan Jalan Umum	12.041.655.8 00,00	11.740.701. 077,00	Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	300.820 .050	56.634. 600
		Perta manan dan Ruang Terbuk a Hijau	1.217.480.00 0,00	1.113.487.8 70,00		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	541.101 .800	358.549 .400
		Kebers ihan dan Limba h	7.063.848.17 3,00	5.454.783.5 50,00		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.691.4 10.600	2.287.5 17.640
9	Progra m Peneliti an dan Pengem	Penge mbang an Labora torium	769.334.400, 00	734.399.94 1,00		Peningkatan kemampuan aparat	3.544.7 09.556	2.752.7 79.478



	bangun Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)	Lingku ngan				pengelolaan persampahan		
		Penguji an dan Pelayan an Laborat orium Lingkun gan	464.012.000, 00	450.720.80 0,00		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)	419.169 .000	417.030 .500
10	Progra m Perenca naan, Penge ndalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Penyus unan perenc anaan dan kinerja SKPD	22.499.600,0 0	19.894.000, 00	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penilaian kota sehat/ adipura		
		Penyus unan lapora n keuan gan	84.686.600,0 0	80.124.300, 00		Pemantauan Kualitas Lingkungan	253.035 .500	239.045 .100
		Penge ndalia n, evalua si dan pelapo ran kinerja	22.497.100,0 0	20.960.200, 00		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	215.000 .000	195.491 .500



					Pengelolaan B3 dan Limbah B3	123.655.800	77.844.900
					Pengkajian dampak lingkungan	127.400.000	78.408.900
					Penyusunan AMDAL	76.679.414	49.618.500
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	361.436.500	302.140.200
					Pengembangan laboratorium lingkungan	300.000.000	254.755.412
					Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan	1.296.500.000	1.073.394.690
					Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	76.599.800	44.498.200
					Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan (DAK)	350.000.000	346.000.000
				Program Perlindungan dan Konservasi	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	259.963.000	148.185.000



					Sumber Daya Alam			
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan data dan informasi lingkungan	303.000.000	269.609.000
					Program peningkatan pengendalian polusi	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	134.175.000	126.819.000
						Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	128.800.000	118.202.700
					Program kerjasama informasi dengan mas media	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	15.000.000	14.935.000
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Penyusunan tabulasi data aset tetap	31.500.000	26.088.000
	JUMLAH		31.802.248.724	29.234.495.894	JUMLAH		38.071.952.156	30.206.157.890



No.	2020			2019		
	Belanja Langsung	ANGGARAN	REALISASI	Belanja Langsung	ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	9.844.221.291	6.580.290.582	Belanja Pegawai	9.257.356.598	6.999.979.054
2.	Belanja Barang dan Jasa	21.936.533.874	19.839.327.913	Belanja Barang dan Jasa	26.423.510.392	19.170.952.777
	JUMLAH	31.780.755.165	26.419.618.495	JUMLAH	35.680.866.990	26.170.931.831



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban pertama terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **15 Sasaran Strategis 25 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 115,28% dengan rincian 9 (sembilan) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **lebih dari 100%**, 11 (sebelas) indikator dengan tingkat capaian kinerja **100%**, 5 (lima) indikator dengan tingkat capaian kinerja **kurang dari 100%**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan DPRKPLH dan seluruh pejabat struktural DPRKPLH dalam meningkatkan penerapan SAKIP di masing-masing lingkup Sekretariat/Bidang /UPT DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.
2. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi DPRKPLH dan Kabupaten.
3. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari individu pegawai ,level Eselon IV, level Eselon III sampai dengan indikator kinerja level eselon II.

